

**PEMBERDAYAAN, POLA HUBUNGAN DAN
KELANGSUNGAN PEKERJAAN DI SEKTOR
INDUSTRI DAN JASA SKALA KECIL:**

**Kasus Kabupaten Sidoarjo dan Malang
Provinsi Jawa Timur**

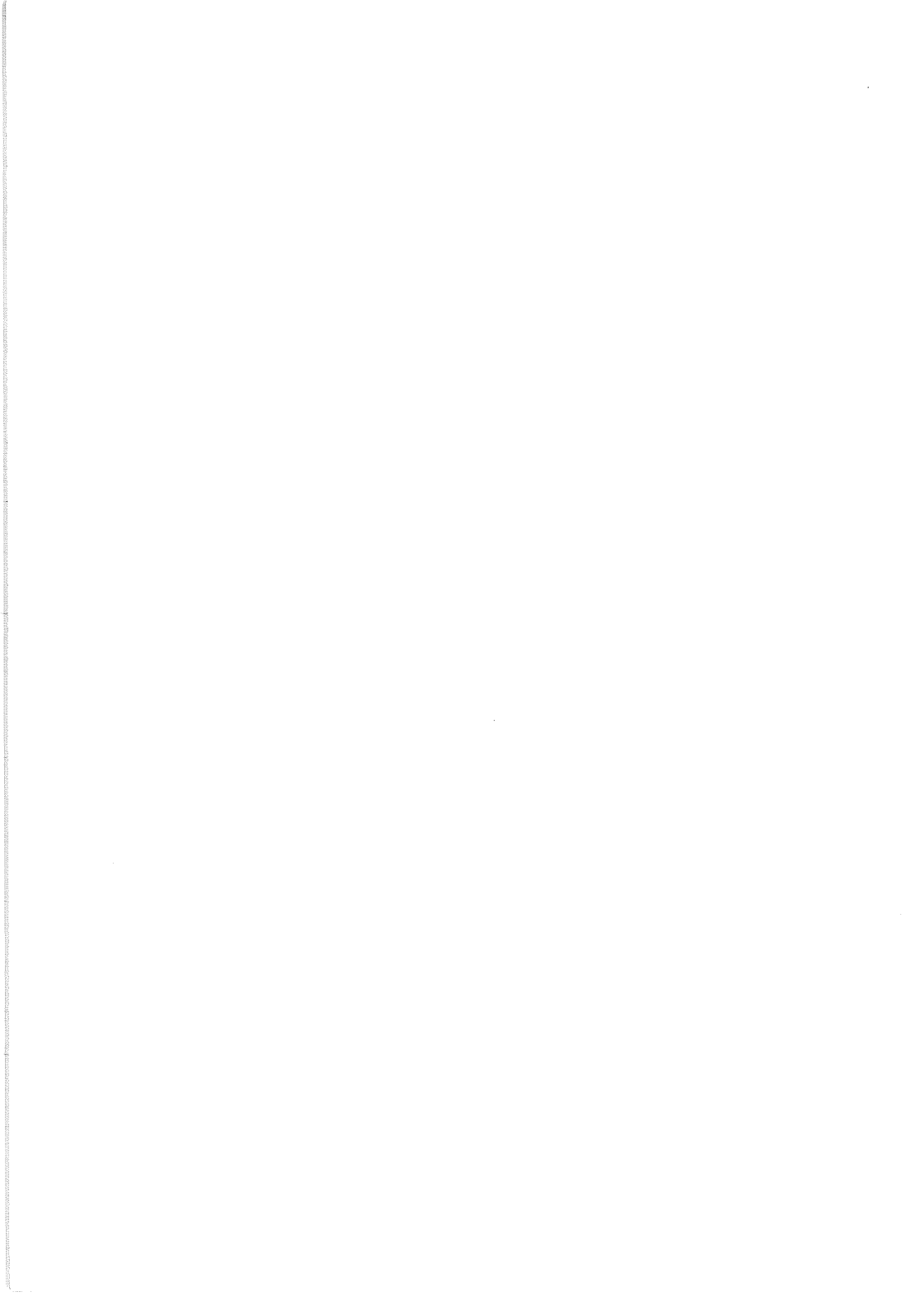
Oleh:

**Devi Asiati
Laila Nagib
Daliyo
Eniarti Djohan
Nawawi
Dewi Harfina
Triyono**



LIPI

**Bidang Ketenagakerjaan
PUSAT PENELITIAN KEPENDUDUKAN
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
(PPK-LIPI)
2011**



KATA PENGANTAR

Usaha kecil dan menengah, terutama sektor industri dan jasa, mempunyai peran penting dalam perekonomian Indonesia, baik pada peningkatan dan pendistribusian pendapatan maupun penyerapan tenaga kerja. Hal ini terbukti pada saat krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2000, sektor tersebut mampu menjadi katup pengaman perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, pengembangan usaha kecil dan menengah perlu dilakukan agar dapat berkembang lebih kompetitif bersama pelaku ekonomi lainnya. Untuk kelangsungan pekerjaan dan usaha kecil sektor industri dan jasa diperlukan hubungan kerja dan kemitraan antar stakeholders, yaitu pekerja, pengusaha, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya.

Studi mengenai Pemberdayaan, Pola Hubungan dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Industri dan Jasa Skala Kecil: Kasus Kabupaten Sidoarjo dan Malang, merupakan salah satu kegiatan penelitian di Pusat Penelitian Kependudukan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia pada tahun 2011. Penelitian ini merupakan tahap kedua dari empat tahap penelitian.

Kegiatan penelitian ini tidak terlepas dari kerjasama dan bantuan berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo dan Malang dan instansi terkait. Begitu juga dengan pihak pekerja dan pengusaha pada usaha industri krupuk di Kabupaten Sidoarjo, industri pengolahan buah dan jasa pariwisata di Kabupaten Malang. Untuk itu kami mengucapkan terima kasih atas bantuan yang diberikan. Ucapan terimakasih yang sama juga kami sampaikan kepada anggota peneliti yang melakukan penelitian ini. Meskipun tim penulis telah berusaha sebaik mungkin dalam batasan kemampuan yang dimiliki, namun

kekurangan dan kekeliruan masih mungkin terjadi. Oleh karena itu, kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan untuk lebih sempurnanya buku ini.

Jakarta, Desember 2011
Kepala Pusat Penelitian Kependudukan-
LIPI

Dr. Sri Sunarti Purwaningsih
NIP. 196105211987032001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii	
DAFTAR ISI	v	
DAFTAR TABEL	ix	
DAFTAR GAMBAR	xi	
DAFTAR DIAGRAM	xiii	
BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Perumusan Masalah	5
	1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian	5
	1.4. Ruang Lingkup Penelitian	6
	1.5. Kerangka Berfikir	7
	1.6. Metode Penelitian	14
	1.7. Daerah Penelitian	16
BAB II	HUBUNGAN KERJA, KELANGSUNGAN KERJA DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA: TINJAUAN LITERATUR	17
	2.1. Pengantar	17
	2.2. Hubungan Kerja dalam Hukum Positif Ketenagakerjaan Indonesia	19
	2.3. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja yang Menjamin Kelangsungan Kerja	22
	2.4. Pemberdayaan Tenaga kerja: Definisi dan Konsep	24
	2.5. Model-model Pemberdayaan UMKM	27

BAB III	SETTING SEKTOR INDUSTRI DAN JASA DI KABUPATEN SIDOARJO DAN MALANG	33
	3.1. Sektor Industri dan Jasa Kabupaten Sidoarjo	33
	3.2. Sektor Industri dan Jasa Kabupaten Malang	42
	3.2.1. Industri Kecil	43
	3.2.2. Sektor Jasa	48
BAB IV	HUBUNGAN KERJA DAN KELANGSUNGAN PEKERJAAN PADA INDUSTRI KERUPUK SIDOARJO	55
	4.1. Pengantar	55
	4.2. Karakteristik Usaha Industri Kerupuk	57
	4.3. Hubungan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	65
	4.3.1. Pola Hubungan Kerja	65
	4.3.2. Pemberdayaan Tenaga Kerja	72
	4.4. Kemitraan dan Kelangsungan Usaha	77
	4.4.1. Pola Kemitraan Berbasis Kekuatan Hubungan Kekeluargaan	79
	4.4.2. Pola Kemitraan Berbasis Program Pemberdayaan Ekonomi	85
	4.4.3. Strategi Pengembangan Kemitraan	87
BAB V	HUBUNGAN KERJA DAN KELANGSUNGAN PEKERJAAN DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH DI KABUPATEN MALANG	93
	5.1. Pengantar	93
	5.2. Karakteristik Industri Pengolahan Buah di Kecamatan Poncokusmo	96
	5.2.1. Usaha Pengolahan Kripik Buah	99
	5.2.2. Usaha Pengolahan Sari Apel LM	103
	5.2.3. Usaha Pengolahan Sari Apel RY	106
	5.2.4. Industri Pengolahan Sari Belimbing	108
	5.3. Hubungan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	110

5.3.1. Bentuk Hubungan Kerja di Usaha Pengolahan Buah	110
5.3.2. Pemberdayaan Tenaga Kerja	116
5.4. Kemitraan dan Kelangsungan Usaha	121
5.4.1. Usaha Pengolahan Sari Apel RY	123
5.4.2. Usaha Pengolahan Sari Apel LM	125
5.4.3. Usaha Pengolahan Sari Apel LM	127
BAB VI AGROWISATA DI KABUPATEN MALANG: HUBUNGAN KERJA dan KELANGSUNGAN USAHA DI SEKTOR JASA	131
6.1. Pengantar	131
6.2. Usaha Industri Pariwisata Di Kawasan Poncokusumo	135
6.3. Hubungan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja	147
6.4. Kemitraan dan Kelangsungan Usaha	152
BAB VII KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	157
7.1. Kesimpulan	157
7.1.1. Industri Pengolahan Buah Kabupaten Malang	158
7.1.2. Usaha Jasa Pariwisata Kabupaten Malang	163
7.2. Rekomendasi	167
DAFTAR PUSTAKA	173

DAFTAR TABEL

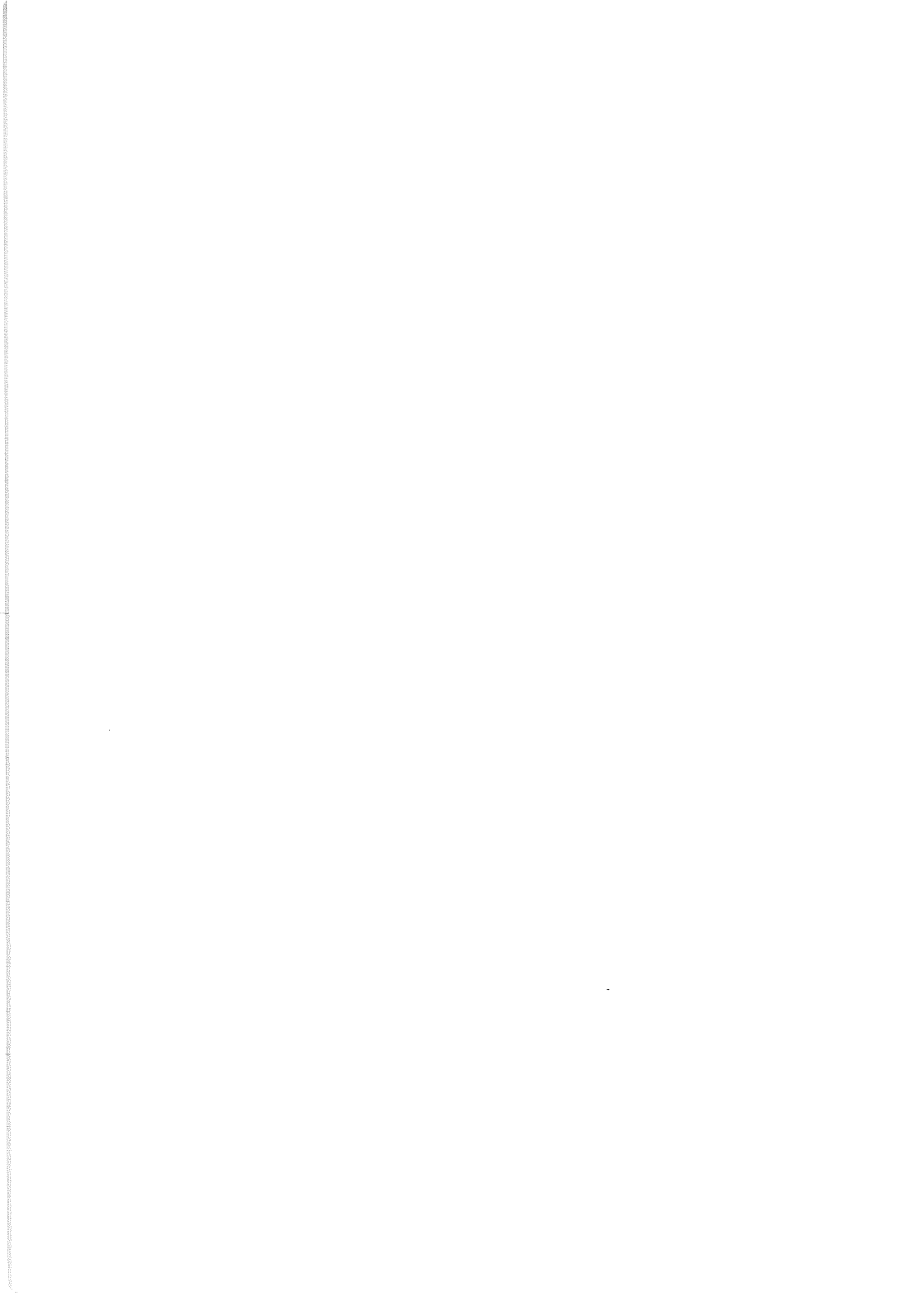
Tabel 3.1.	Jenis Industri Jasa Pariwisata di Kabupaten Malang, Tahun 2009	49
Tabel 4.1.	Sistim Upah dan Penggunaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan pada Usaha Industri Krupuk di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.	72
Tabel 4.2.	Kemitraan Kelembagaan Menurut Jenis Kegiatan di Industri Kerupuk Kedung Rejo Kabupaten Sidoarjo, 2011	86
Tabel 5.1.	Usaha Pengolahan Buah di Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang, 2011	114

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.	Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo	34
Gambar 3.2.	Peta Penyebaran Sentra Industri Kabupaten Sidoarjo	41
Gambar 3.3.	Peta Administrasi Kabupaten Malang	43
Gambar 3.4.	Penjemuran bahan makanan kecil di Talok Kecamatan Turen	45
Gambar 3.5.	Agro wisata Belimbing di Desa Argosuko	51
Gambar 4.1.	Produksi Krupuk Ikan	58
Gambar 4.2.	Produksi Krupuk Uli	58
Gambar 4.3.	Bagian Pengolahan/Produksi Kerupuk	61
Gambar 4.4.	Bagian Pematangan Kerupuk	62
Gambar 4.5.	Bagian Penataan “Noto” Kerupuk	63
Gambar 5.1.	Usaha Pengolahan Kripik Buah di Kecamatan Poncokusumo	101
Gambar 5.2.	Usaha Pengolahan Sari Apel LM	104
Gambar 5.3.	Usaha Pengolahan Sari Apel RY di Kecamatan Poncokusumo	107
Gambar 6.1.	Tanaman Apel di Pekarangan Warga Desa Poncokusumo	139
Gambar 6.2.	Kondisi kamar <i>homestay</i> di Poncokusumo	143
Gambar 6.3.	Jalan Desa Poncokusumo	145
Gambar 6.4.	Produk-produk Industri Kecil Makanan di Poncokusumo	146

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 3.1.	Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Malang (Persentase)	44
Diagram 3.2.	Komposisi Tenaga Kerja Industri Kecil Kabupaten Malang	47
Diagram 4.1.	Skema Kemitraan Produksi Industri Kecil Kerupuk di Kedung Rejo Kecamatan Jambon Kabupaten Sidoarjo	81



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia menghadapi tantangan yang berat dalam pembangunan nasional ke depan, terutama berkaitan dengan aspek ketenagakerjaan. Tingkat pengangguran yang masih tinggi, sedangkan pasar kerja belum sepenuhnya mampu menampung angkatan kerja yang terus bertambah. Sementara itu, kebutuhan pasar kerja akan keterampilan dan kompetensi tenaga kerja mulai bergeser akibat persaingan yang makin ketat di era globalisasi. Tantangan ini semakin berat karena Indonesia belum berhasil sepenuhnya mengatasi krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1997, terutama pada kondisi ketenagakerjaan, meskipun kondisi perekonomian mulai berangsur membaik. Penyediaan kesempatan kerja yang layak dan hak atas pekerjaan merupakan kewajiban pemerintah dan hak individu yang dijamin undang-undang 1945 dan UU ketenagakerjaan. Mengacu kepada salah satu pasal UU 1945, setiap individu berhak memperoleh pekerjaan yang layak. Dalam hal ini, Undang-Undang No.13 th 2003, pasal 39 mengemukakan bahwa : (1) "Pemerintah bertanggung jawab mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja". (2). Pemerintah dan masyarakat bersama-sama mengupayakan perluasan kesempatan kerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja. Artinya kelangsungan kerja melalui perluasan kesempatan kerja merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dunia usaha.

Usaha sektor industri dan jasa berskala kecil dan menengah merupakan sektor ekonomi yang mempunyai peran sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Peran penting usaha kecil dan menengah dapat diketahui dari kontribusinya dalam penyerapan tenaga kerja dan menjadi sumber pendapatan sebagian besar penduduk. Berdasarkan data Kementerian UKM dan BPS 2006, sumbangan UKM terhadap penyerapan tenaga kerja adalah sebesar 96 persen. Data BPS juga memperkirakan PDB (*product domestic bruto*) sebesar 57% bersumber dari unit usaha ini dan menyumbang hampir 15% dari ekspor barang Indonesia. Peran penting ini semakin nyata karena ketahanannya dalam menghadapi krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1998 dan sekaligus menjadi penggerak perekonomian Indonesia pada saat itu. Usaha sektor industri dan jasa berskala kecil mampu bertahan dibanding sektor ekonomi yang berskala besar, karena kecilnya ketergantungan pada bahan baku impor dan potensi pasar yang tinggi mengingat harga produk yang dihasilkan relatif rendah sehingga terjangkau oleh golongan ekonomi lemah (<http://usaha-umkm.blog.com/tag/pemberdayaan-umkm/page/3/>).

Krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia makin menyadarkan perlunya reorientasi pembangunan ekonomi dengan pendekatan yang lebih memperkuat fondasi ekonomi rakyat, baik sektor pertanian maupun sektor industri dan sektor jasa terutama yang berbasis pertanian (agroindustri dan agrobisnis) (Nagib, dkk, 2000). Indonesia memiliki potensi hasil pertanian dan perikanan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Produk hasil pertanian dapat dijadikan sebagai bahan baku sektor industri kecil, yang banyak diandalkan oleh masyarakat sebagai sumber mata pencaharian. Menurut Saragih (2001b), dalam penguatan ekonomi rakyat, industrialisasi pertanian merupakan syarat kebutuhan (*necessary condition*) bagi pengembangan ekonomi rakyat yang sebagian besar berada pada kegiatan ekonomi berbasis pertanian, dan

syarat kecukupan (*sufficient condition*) berupa pengembangan organisasi bisnis petani yang dapat merebut nilai tambah yang tercipta pada setiap mata rantai ekonomi dalam industrialisasi pertanian. Dengan demikian, pentingnya sektor industri kecil dalam perkonomian menjadi alasan yang sangat penting bagi pengembangan sektor industri kecil dan rumah tangga. Selain itu, sebagian besar industri kecil dan rumah tangga berada di daerah perdesaan dan jika hal ini dikaitkan dengan peningkatan jumlah angkatan kerja dan terbatasnya luas lahan garapan maka industri kecil merupakan salah satu jalan keluar untuk mengatasi masalah ekonomi dan ketenagakerjaan.

Perkembangan usaha sektor pertanian dapat berpengaruh pada perkembangan sektor usaha jasa, seperti jasa transportasi, jasa perdagangan, dan jasa pariwisata. Penelitian PPK LIPI tahun 2007 di Kabupaten Solok diketahui bahwa berkembangnya sektor perdagangan dan transportasi tidak terlepas dari sektor pertanian karena hasil pertanian merupakan komoditi utama pada sektor perdagangan dan transportasi (Asiati dkk, 2010). Hubungan kemitraan antara usaha industri dan jasa dengan pihak usaha pertanian perlu dilakukan sehingga kegiatan usaha yang dapat berjalan secara berkelanjutan. Penelitian PPK-LIPI tahun 2010 menunjukkan bahwa hubungan kemitraan yang terjadi antara petani hortikultura dengan perusahaan besar - Perusahaan Condidio - di Kabupaten Pasuruan dapat menjamin keberlangsungan pasokan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan mitra. Sebaliknya, pembinaan pada petani yang dilakukan perusahaan dapat meningkatkan hasil produksi pertanian dan adanya jaminan dalam pemasaran.

Dalam perkembangannya, usaha kecil baik di sektor industri dan jasa yang potensial dalam perekonomian rakyat banyak yang terpuruk akibat berbagai faktor internal, seperti meningkatnya harga bahan

baku, keterbatasan pemasaran, kesulitan memperoleh modal dan keterbatasan akses informasi (Nagib dkk, 2000). Disamping itu, terdapat beberapa kendala seperti sistem pengelolaan usaha masih tradisional, produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah dan terbatasnya akses kepada lembaga keuangan dan lain-lain. Disisi tenaga kerja, produktifitas tenaga kerja dapat dicapai dengan melakukan pemberdayaan pekerja untuk meningkatkan daya saing maupun kesejahteraan pekerja. Kegiatan ini lebih banyak terjadi pada perusahaan-perusahaan yang berskala besar dan sudah mapan, sedangkan perusahaan berskala kecil masih terbatas. Pada perusahaan skala besar tersebut, hubungan pekerja dengan pengusaha telah diatur dalam suatu hubungan industrial tripartit. Namun, sistem hubungan tersebut belum menjamin pemberdayaan dan perlindungan pekerja karena dalam hubungan tripartit lebih menekankan pada pola hubungan kemitraan yang tidak ada konflik antara pemangku kepentingan. Kondisi ini tentunya akan lebih parah di sektor industri dan jasa berskala kecil karena pada umumnya belum mempunyai aturan yang mengatur hubungan kemitraan antara pemangku kepentingan.

Untuk menuju kelangsungan pekerjaan yang berkesinambungan, perlu diketahui pola hubungan antara pekerja dan pemberi kerja serta bagaimana pemberdayaan yang diberikan kepada pekerja serta pemberdayaan usaha (pemberi kerja/pengusaha). Pemberdayaan terhadap pemberi kerja mengingat pemberi kerja bertanggung jawab kepada siapa pun dan pihak mana pun yang berpengaruh terhadap kegiatan produksi. (Sukada dkk, 2007). Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengetahui pemberdayaan dan hubungan kerja antara pekerja, pengusaha, dan pihak-pihak yang terkait dalam upaya pengembangan usaha menuju kelangsungan pekerjaan di sektor industri dan jasa berskala kecil.

1.2. Perumusan Masalah

Sektor industri dan jasa, terutama usaha kecil, merupakan sektor ekonomi yang sangat penting dalam perekonomian Indonesia. Sektor ini mampu menyerap tenaga kerja paling besar dibanding sektor ekonomi yang berskala besar. Indonesia sebagai negara agraris, yaitu dengan bermacam hasil pertanian dan perikanan, pengembangan industri dan jasa yang berbasis hasil pertanian menjadi penting untuk dikembangkan. Namun, terdapat beberapa kendala yang masih dialami oleh kelompok usaha ini. Antara lain adalah pengelolaan usaha yang masih tradisional, produktivitas tenaga kerja yang relatif rendah, terbatasnya akses kepada lembaga keuangan, dan sulitnya akses pemasaran. Dalam kaitannya dengan pemberdayaan di sektor industri dan jasa berskala kecil, termasuk pekerjaannya masih kurang. Hubungan kerja yang saling menguntungkan antara pekerja dengan pemberi kerja, dan hubungan kemitraan antara pihak industri dengan pihak lainnya, seperti perusahaan pemasok bahan baku, maupun pemerintah merupakan salah satu cara untuk pengembangan industri dan jasa skala kecil.

Penelitian ini menjawab beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana karakteristik usaha kecil sektor industri dan jasa.
2. Bagaimana bentuk hubungan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja untuk kelangsungan pekerjaan.
3. Bagaimana bentuk pemberdayaan pada industri dan jasa skala kecil untuk kelangsungan usaha.

1.3. Tujuan dan Sasaran Penelitian

Penelitian tahun 2011 ini merupakan tahun kedua dari rangkaian penelitian selama empat tahun yang berakhir pada tahun 2014.

Tujuan penelitian pada tahun kedua ini adalah mengkaji pemberdayaan dan pola hubungan kerja menuju kelangsungan kerja di sektor industri dan jasa. Secara khusus tujuan penelitian pada tahun kedua ini dapat dibagi sebagai berikut:

1. Mengetahui karakteristik usaha kecil sektor industri dan jasa
2. Mengkaji pola hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja dan pemberdayaan tenaga kerja untuk kelangsungan pekerjaan.
3. Mengkaji pemberdayaan usaha/kemitraan di sektor industri dan jasa untuk kelangsungan usaha.

Sasaran Penelitian

1. Pemahaman tentang hubungan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja di sektor industri dan jasa kecil sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan berkaitan dengan penyiapan tenaga kerja dan kelangsungan usaha.
2. Terbangunnya kerjasama antar *stakeholders*, terutama dengan pemerintah daerah terkait, untuk pemberdayaan dan kelangsungan kerja.

1.4. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada dua hal: pertama, melihat hubungan kerja antara tenaga kerja dan pengusaha dan pemberdayaan yang diterima oleh tenaga kerja dari hubungan kerja tersebut. Hubungan kerja yang saling menguntungkan dan saling membutuhkan kedua belah pihak merupakan salah satu bentuk pemberdayaan tenaga kerja pada unit usaha tersebut. Kedua, mengkaji pemberdayaan/hubungan kemitraan antara usaha industri dan jasa dengan pihak mitra dan pemerintah untuk pengembangan usaha. Kajian pada dua hal tersebut untuk menjaga kelangsungan pekerjaan disektor industri dan jasa.

Keberlangsungan pekerjaan dalam penelitian ini adalah bertahannya usaha kecil sektor industri dan jasa dilihat dari kontinuitas kegiatan produksi dan keberlangsungan tenaga kerja bekerja di tempat kerja.

Kajian dilakukan pada sektor industri yang berbasis pertanian (agroindustri) skala kecil mikro dan usaha jasa yang berbasis pertanian. Penelitian ini dilakukan pada 2 jenis usaha industri, yaitu Industri Krupuk Ikan di Kabupaten Sidoarjo dan Industri Pengolahan Buah di Kabupaten Malang, serta satu jenis usaha jasa yaitu Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Malang.

Skala usaha industri dan jasa yang digunakan adalah usaha skala kecil dan mikro menurut definisi BPS, yaitu industri/usaha dengan jumlah tenaga kerja kurang dari 20 orang. BPS mengklasifikasi industri berdasarkan jumlah pekerjanya, yaitu 1) industri/usaha rumah tangga dengan pekerja 1-4 orang, 2) industri kecil dengan pekerja 5-19 orang; 3) industri menengah dengan pekerja 20-99 orang dan 4) industri besar dengan pekerja 100 orang atau lebih (BPS, 1999).

1.5. Kerangka Berfikir

Keberlangsungan pekerjaan dalam dunia usaha sangat ditentukan oleh pihak pengusaha dan pekerja. Hubungan kerja yang harmonis yaitu hubungan yang saling memanfaatkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, antara pengusaha dengan pekerja, maupun antara pengusaha dengan perusahaan/unit usaha lainnya yang terkait dalam suatu kegiatan usaha sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan usaha. Di samping itu, ketersediaan faktor produksi serta pemasaran menjadi faktor penting demi berjalannya kegiatan usaha. Untuk mempertahankan keberlangsungan usaha, hal yang perlu dilakukan adalah melakukan hubungan kerja dan kemitraan dengan pihak lain. Beberapa strategi diperlukan untuk menjaga

keberlangsungan usaha, seperti melakukan hubungan sub-kontrak dimana keberlangsungan produksi sangat ditentukan oleh hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja yang terlibat. Sedangkan strategi pengusaha untuk melanggengkan hubungan dengan pekerja antara lain: memanfaatkan keterikatan historis, menaikkan harga jual, memberi uang muka, melakukan arisan, membantu kebutuhan perajin (Sumintarsih, 2003, Nagib dkk, 2000). Menurut Ahimsa-Putra (2003), strategi pelestarian hubungan merupakan usaha yang dilakukan pengusaha (kerajinan) untuk mempertahankan keberlangsungan hubungannya dengan seseorang atau kelompok untuk mencapai tujuan bersama.

Ada beberapa pola kemitraan antara usaha kecil dengan pengusaha, yaitu 1) Pola Inti Plasma, yaitu perusahaan mitra bertindak sebagai perusahaan inti yang menampung, membeli hasil produksi, memberikan pelayanan dan bimbingan kepada petani (sebagai plasma), sesuai rencana dan kesepakatan bersama; 2) Pola Subkontrak, yaitu hubungan kemitraan antara kelompok mitra dengan perusahaan mitra, di mana kelompok mitra memproduksi komponen yang diperlukan perusahaan mitra sebagai bagian dari produksinya; 3) Pola Dagang Umum, yaitu perusahaan mitra memasarkan hasil produksi mitra atau kelompok mitra memasok kebutuhan yang diperlukan perusahaan mitra; 4) Pola Keagenan, yaitu hubungan kemitraan yang didalamnya kelompok diberi hak khusus untuk memasarkan barang dan jasa usaha perusahaan mitra; 5) Pola Kerjasama Operasional Agribisnis (KOA), yaitu kelompok mitra menyediakan lahan, sarana dan tenaga dan perusahaan mitra menyediakan biaya, atau modal dan/ atau sarana untuk mengusahakan atau membudidayakan satu komoditi pertanian/perkebunan (Keputusan Menteri Pertanian No. 940/Kpts/ OT.210/10/1997 tgl 13 Okt. 1997). Di sektor perikanan pola kemitraan lebih banyak bersifat dagang umum dan kerjasama operasional (Arifin, Z, Ir., 2009).

Melalui kemitraan ini diharapkan terjadi alih teknologi dan manajemen dari perusahaan besar kepada yang lebih kecil dan peningkatan daya saing UKM. Pengembangan kelembagaan kemitraan usaha akan mendapatkan beberapa manfaat dalam rangka meningkatkan daya saing komoditas, seperti dicapainya skala ekonomi usahatani maupun dalam pengangkutan, adanya transfer teknologi dan informasi dari perusahaan kepada masyarakat petani, peningkatan terhadap akses terhadap pasar, serta adanya keterpaduan dalam pengambilan keputusan sehingga usahatani yang dilakukan sesuai dengan dinamika permintaan pasar (Saptana dkk, tanpa tahun).

Salah satu tantangan dunia usaha adalah dimilikinya tenaga kerja yang berkualitas dan mampu bersaing dengan tenaga kerja dari negara lain. Pengembangan dunia usaha yang bersifat kompetitif dalam era globalisasi memerlukan profesionalisme dan produktivitas yang tinggi. Peningkatan kualitas tenaga kerja dapat dilakukan melalui tiga jalur, yaitu pendidikan, pelatihan maupun pengembangan di tempat kerja. Pendidikan merupakan jalur peningkatan kualitas dasar, pelatihan lebih menekankan pada pembentukan dan pengembangan profesionalisme dan kompetensi. Pengembangan ditempat kerja merupakan jalur pemantapan aplikasi kompetensi sumber daya manusia untuk menghasilkan produktivitas tinggi. Keterkaitan ketiga jalur ini dalam menyiapkan tenaga kerja, memerlukan dukungan lembaga pendidikan, lembaga pelatihan dan pengusaha (Swasono, 1996).

Dalam pengembangan kegiatan usaha dan keberlanjutan pekerjaan perlu pemberdayaan tenaga kerja dan pengusaha (industri kecil). Peran pemerintah dalam pemberdayaan industri kecil antara lain menciptakan iklim usaha yang mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas produk maupun jaringan pemasarannya. Pembinaan UKM oleh pemerintah perlu didukung oleh sumber daya lain seperti pelaku

bisnis melalui kemitraan inter-relasi atau keterkaitan usaha antara UKM dengan usaha besar dengan prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan atau dikenal dengan '*win-win solution*', seperti pola sub-kontrak, wara laba, inti-plasma dan pola kemitraan lainnya (Dipta, I. W, 2008). Peraturan Pemerintah (PP) No. 44 Tahun 1997 merupakan pelaksanaan dari UU No 9 Tahun 1995, salah satu upaya pemberdayaan usaha kecil adalah kemitraan.

Dari sisi kegiatan usaha, menurut Iwantono, S, (2004), pemberdayaan lebih ditujukan pada kegiatan mikro yang harus dilakukan agar UKM dapat menjadi pelaku usaha yang *capable* dalam kegiatannya. Ada beberapa isu dalam kaitan dengan pemberdayaan antara lain: (a) peningkatan produktivitas, kualitas produk, pengembangan produk dan upaya pemberdayaan yang berkaitan dengan kegiatan produksi; b) perbaikan/promosi/penemuan teknologi; c) pengadaan/perbaikan/modernisasi peralatan; d) manajemen dan organisasi, termasuk antara lain: kalkulasi harga, pemasaran, efisiensi keuangan, efisiensi penggunaan tenaga kerja dan peralatan, kontrol dalam mata rantai produksi hingga penyerahan dan usaha-usaha untuk mengefektifkan manajemen; e) informasi dan konsultasi, antara lain: data base perusahaan kontraktor dan subkontrak, sistem dan informasi mengenai usaha (termasuk sumber pendanaan dll) dan upaya mendorong pembentukan lembaga-lembaga pelayanan konsultasi usaha.

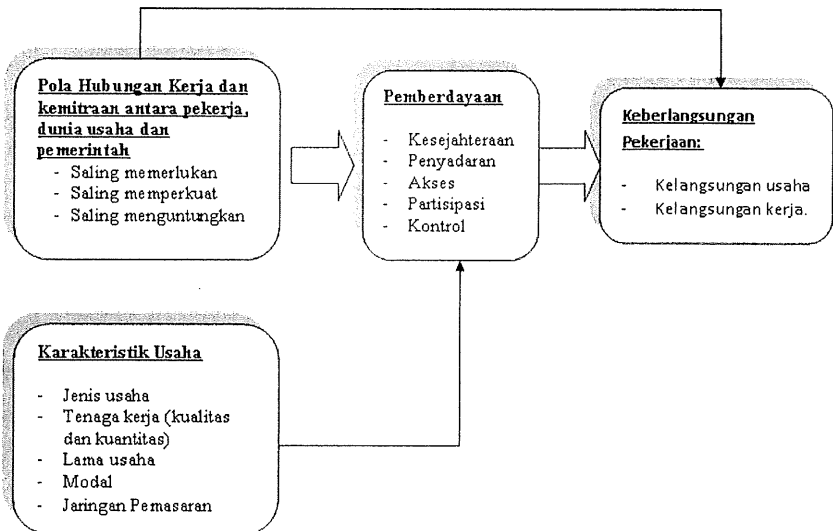
Sementara dari sisi masyarakat/pekerja, Sumodiningrat (2007) dalam bukunya "Pemberdayaan Sosial" menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat meliputi: 1) menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; 2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana (fisik dan

sosial) serta kelembagaan; 3) melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak imbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Menurutnya pemberdayaan sebagai suatu strategi yang tepat dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep yang hampir sama dan banyak digunakan dalam analisa pemberdayaan masyarakat terutama perempuan dikemukakan oleh Sara Hlupekile Long Wee, seorang konsultan jender dan pembangunan (March, et.al. 1999). Dalam konsep Longwe, pembangunan berarti meningkatkan kemampuan orang dalam mengurus kehidupannya sendiri, dan keluar dari perangkap kemiskinan. Framework Longwe menekankan pada 5 aspek yang merupakan '*level of equity and empowerment*' yaitu: *welfare* (kesejahteraan), *access* (akses), *conscientisation* (penyadaran), *participation* (partisipasi), dan *Control*. Kelima aspek ini diyakini merupakan tahapan atau proses menuju kesetaraan antarkelompok masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. **Kesejahteraan** : penekanan Longwe pada pertanyaan apakah ada kesetaraan akses terhadap sumberdaya pembangunan (*resources*) seperti ketersediaan pangan, pendapatan dan pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat. **Akses**: penekanan pada apakah tersedia ruang atau kemudahan yang sama bagi kelompok masyarakat seperti kesetaraan akses lahan, tenaga kerja, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran dan semua pelayanan umum dan pemanfaatan fasilitas? Kesamaan akses Informasi berarti tidak ada hambatan untuk memperoleh informasi yang meliputi ilmu pengetahuan, program dan kinerja pemerintah, hak dan kewajiban dalam bermasyarakat, ketentuan tentang pelayanan umum, perkembangan permintaan dan penawaran pasar, dsb. **Penyadaran** : Longwe menekankan pada kesadaran akan pengertian perbedaan sex dan jender, kesetaraan dalam pembagian pekerjaan dan tidak adanya dominasi satu pihak ke pihak lain sehingga

memungkinkan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan. **Partisipasi:** penekanan pada kesetaraan partisipasi dalam proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan administrasi. Penekanan partisipasi pada bagaimana masyarakat diberdayakan dan peran apa yang akan dimainkan setelah menjadi bagian dari kelompok yang diberdayakan. **Kontrol:** penekanan pada pengawasan terhadap proses pengambilan keputusan melalui penyadaran dan mobilisasi untuk mencapai kesetaraan pengawasan terhadap faktor-faktor produksi dan distribusi keuntungan. Dengan kesetaraan pengawasan, tidak perlu satu kelompok mendominasi kelompok lain, demikian pula kelompok laki-laki terhadap perempuan, kelompok yang kuat terhadap yang lemah.

Skema kerangka pemikiran



Konsep dan definisi operasional

- Hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan pemerintah, termasuk waktu. Hubungan kerja terjadi karena ada perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja/buruh (UU No. 13/2003/Ketenagakerjaan).
- Kemitraan menurut UU No 9 tahun 1995 tentang 'Usaha kecil', adalah kerjasama usaha antara usaha kecil dengan usaha menengah dan besar disertai dengan pembinaan dan pengembangan oleh usaha menengah/besar dengan memperhatikan prinsip saling membutuhkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan.
- Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (UU no 20 tahun 2008).
- Kriteria industri kecil yang digunakan dalam penelitian ini adalah berdasarkan definisi BPS, yaitu 1) usaha mikro yang menggunakan jumlah tenaga kerja kurang dari 4 orang dan 2) industri kecil yang menggunakan tenaga kerja sebanyak 5-19 orang.
- Keberlangsungan pekerjaan dalam penelitian ini dilihat dari kontinuitas kegiatan produksi (kelangsungan usaha) dan kelangsungan bekerja tenaga kerja.

1.6. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif sesuai dengan tujuan dari penelitian, yaitu mencari informasi yang berfokus pada pemahaman suatu hubungan antarpemangku kepentingan dalam rangka pemberdayaan kelompok agar terjadi kelangsungan kerja para pekerja di sektor industri dan jasa. Strategi pendekatan kualitatif yang digunakan adalah studi kasus dengan mengambil beberapa unit usaha industri dan jasa yang dilihat secara holistik. Maksudnya, seluruh gejala yang diteliti dipahami sebagai sebuah sistem yang kompleks dari berbagai aspek yang akan dicari. Pilihan studi kasus dalam kajian ini mempertimbangkan efisiensi waktu dan perlunya pendalaman fokus kajian.

Pengumpulan data

Pengumpulan data untuk kajian kasus-kasus ini akan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara terfokus, pengamatan langsung pada fokus penelitian, dan studi kepustakaan. Wawancara dilakukan terhadap informan kunci yang menguasai permasalahan kajian yang diperoleh secara *snowballing*. Pertanyaan diajukan lebih spesifik berdasarkan pedoman wawancara yang disusun sesuai dengan fokus kajian. Hal ini dimaksudkan untuk dapat memancing informan dalam memberikan jawaban atau komentar baru mengenai isu penelitian (Yin 1996:109-110).

Informan kunci yang akan menjadi subjek penelitian ini adalah pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan hubungan kerja dan pemberdayaan pada industri kecil dan jasa, yaitu:

- Pihak tenaga kerja adalah pekerja di usaha industri dan jasa.
- Pihak dunia usaha adalah pengusaha pada sektor industri kecil dan jasa, asosiasi pengusaha pertanian dan perikanan, perusahaan dan BUMN terkait.
- Pihak pemerintah, antara lain adalah BAPPEDA, Dinas Perindustrian, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi dan UKM, dan dinas terkait lainnya.

Pengamatan dilakukan secara terfokus sebagai pendukung untuk lebih memahami konteks permasalahan maupun fenomena yang dikaji. Dalam pengamatan akan dilengkapi dengan pengambilan foto-foto yang akan membantu peneliti dalam memahami karakteristik kasus penting terkait dengan fokus kajian (Yin, 1996 akan terjauh disilang akan menjadi ramayana).

Kajian kepustakaan atau pengumpulan data sekunder yang merupakan salah satu cara untuk memperoleh informasi dalam penelitian ini sebagai dokumentasi yang dapat mendukung dan menambah bukti dari sumber-sumber lain. Informasi ini dapat diperoleh dari hasil penelitian yang telah lalu, baik dalam bentuk teori maupun permasalahan dan lokasi yang sama dengan penelitian ini. Informasi lain adalah artikel atau kliping yang muncul di media cetak maupun elektronik dan dokumentasi dari instansi yang berkaitan dengan kajian ini.

Analisis Data

Analisa penelitian dilakukan secara deskriptif analisis berdasar kasus-kasus yang diperoleh di lapangan. Strategi analisis diawali dengan mendiskrips semua kasus yang diperoleh berdasar informasi diperoleh dari ketiga teknik yang digunakan. Kemudian, dilakukan

pengkategorian dan penjelasan isu dari kasus-kasus dikaitkan dengan tujuan penelitian sebagai analisa akhir dari laporan penelitian.

1.7. Daerah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di dua daerah di Provinsi Jawa Timur, yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Malang yang memiliki potensi sektor pertanian dan industri pengolahan yang cukup besar. Kabupaten Sidoarjo adalah kota industri ke-2 di Provinsi Jawa Timur setelah Surabaya, memiliki potensi pertanian dan potensi perikanan yang cukup besar. Kabupaten Sidoarjo merupakan sentra industri kecil yang menggunakan bahan baku hasil perikanan, seperti industri krupuk dan makanan. Industri kerajinan rakyat dan industri kecil mencakup 97% dari seleuruh industri yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Pada tahun 2005, jumlah industri besar sebanyak 446 buah, industri kecil 2.053 dan kerajinan rakyat sebanyak 11.842 yang tersebar diseluruh kecamatan di Kabupaten Sidoarjo, sedangkan jumlah sektor perdagangan sebanyak 1.007 buah (<http://www.damandiri.or.id/file/hadiyahfitriyahunairbab5.pdf>).

Kabupaten Malang merupakan salah satu daerah pertanian penghasil buah-buahan dan sayur-satukan. Industri yang berbasis hasil pertanian dominan di Kabupaten Malang, yaitu sebanyak 65 persen merupakan agroindustri, seperti keju, jenang apel, makanan dan kue dll. Perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan merupakan unit usaha terbesar yang ada di Kabupaten Malang. Jumlah usaha perdagangan mengalami peningkatan dari 6.702 pada tahun 2002 menjadi 11.478 unit pada tahun 2008. Kabupaten Malang juga terkenal dengan sektor pariwisata yang menunjang sektor pertanian.

BAB II

HUBUNGAN KERJA, KELANGSUNGAN KERJA DAN PEMBERDAYAAN TENAGA KERJA: TINJAUAN LITERATUR

2.1. Pengantar

Pembangunan ketenagakerjaan memiliki dimensi luas, tidak hanya terkait dengan penciptaan kesempatan kerja yang dapat mendukung iklim investasi dan kegiatan ekonomi, tetapi juga meliputi perbaikan dalam hal hubungan kerja, kelangsungan kerja dan perbaikan kesejahteraan dan kualitas hidup pekerja yang telah diamanatkan dalam konstitusi Indonesia. Dalam artian sempit, dimensi ketenagakerjaan mencakup sebelum, saat dan setelah seseorang terlibat dalam pasar kerja yang mencakup berbagai macam aspek di dalamnya.

Hingga saat ini, pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia dihadapkan pada berbagai macam isu, baik yang berskala global, nasional maupun lokal. Hal ini menimbulkan konsekuensi perlunya dilakukan berbagai macam penyesuaian terhadap paradigma pembangunan ketenagakerjaan. Indonesia sebagai suatu negara dengan jumlah penduduk yang besar dan tersebar diberbagai daerah dan kepulauan, menghadapi permasalahan yang dilematis berkaitan dengan ketenagakerjaan. Di satu sisi tingginya proporsi penduduk usia produktif menyediakan peluang yang besar untuk berperan aktif dan positif dalam pembangunan ekonomi. Sementara dilihat dari rendahnya kualitas sumber daya manusia, berpotensi menjadi beban yang dapat menghambat pembangunan, karena berbagai masalah yang

dihadapi sehingga sulit memanfaatkan berbagai peluang yang tersedia. Hal ini menjadi tantangan bagi Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin kompetitif untuk mencapai produktivitas kerja yang berdaya saing dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Salah satu aspek pengembangan SDM adalah bidang ketenagakerjaan yang merupakan faktor kunci dalam pembangunan ekonomi, yaitu bagaimana menciptakan tenaga kerja yang berkualitas sehingga dapat menjadi aset dalam pembangunan dan berdaya saing tinggi dalam persaingan global. Indonesia berpotensi meraih berbagai peluang dalam pengembangan ketenagakerjaan, apabila tidak terlambat dalam menyiapkannya baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan ketenagakerjaan adalah aspek sosial demografi, aspek sosial ekonomi dan aspek hukum dan politik. Mengingat strategisnya posisi ketenagakerjaan dalam pembangunan ekonomi, maka berbagai permasalahan terkait dengan pengembangan ketenagakerjaan penting untuk ditelaah dari berbagai aspek, sehingga dapat memanfaatkan peluang yang tersedia sekaligus menyiapkan diri dalam menghadapi tantangan ke depan yang semakin kompetitif.

Diantara berbagai permasalahan di bidang ketenagakerjaan adalah hubungan kerja yang sangat berkaitan dengan kelangsungan kerja yang dipengaruhi oleh hubungan kemitraan antara tenaga kerja, dunia usaha dan pemerintah. Selama ini hubungan kemitraan antar pelaku ekonomi kurang seimbang disebabkan lemahnya posisi tawar tenaga kerja sebagai akibat dari ketidak seimbangan antara *supply* dan *demand* tenaga kerja. Hubungan kemitraan yang tidak seimbang semakin terasa pada kegiatan ekonomi berskala kecil dan ekonomi informal yang tidak tersentuh oleh aturan dalam hubungan industrial. Sehingga pola hubungan yang dominan adalah hubungan

kekeluargaan atau hubungan *patron-client* antara pekerja dan pemberi kerja. Dalam konteks tersebut, maka diperlukan pemberdayaan pekerja untuk mencapai hubungan kerja yang harmonis untuk mencapai kelangsungan kerja.

2.2. Hubungan Kerja dalam Hukum Positif Ketenagakerjaan Indonesia

Dalam hukum positif ketenagakerjaan Indonesia yaitu UU No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Ini artinya segala hal yang terkait dengan tiga unsur tersebut, yakni pekerjaan, upah dan perintah kerja masuk dalam dimensi hubungan kerja, tidak melihat apakah itu sektor formal dan informal. Dalam peraturan tersebut, definisi pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Sementara pemberi kerja adalah orang perseorangan, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang memperkerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Selanjutnya dalam Pasal 50 UU 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Jadi, hubungan kerja adalah hubungan terikat antara pekerja dan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja. Dengan adanya perjanjian kerja akan ada perikatan antara pengusaha dan pekerja yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selanjutnya menurut Ardian (2005), syarat sahnya perjanjian kerja menyangkut beberapa hal: 1) adanya kesepakatan antara pihak (pekerja dan pemberi kerja) tanpa adanya paksaan, penyesatan dan penipuan; 2) pihak-pihak yang bersangkutan

mempunyai kemampuan untuk melakukan kegiatan kerja sesuai hak dan kewajiban; 3) ada objek pekerjaan yang dilakukan serta dapat dilakukan; 4) pekerjaan yang dilakukan tidak bertentangan dengan norma sosial dan hukum. Jika kedua belah pihak menyatakan mampu memenuhi keempat prasyarat tersebut maka hubungan kerja seharusnya baru dapat dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengandung artian bahwa hubungan kerja dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia memiliki dua dimensi yaitu kepentingan dan keadilan. Dimensi kepentingan dalam hal ini menyangkut posisi pemberi kerja yang memiliki kepentingan terhadap usaha atau aktivitas ekonomi yang dilakukan dan menyertakan pekerja sebagai pelaku yang mendapatkan perintah dari pemberi kerja. Sementara dimensi keadilan terkait dengan unsur-unsur dari *term* hubungan kerja yaitu adanya peraturan yang mengatur tentang kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dan menerima balas jasa berupa upah atas pelaksanaan perintah kerja yang dilakukan. Sebagaimana didefinisikan oleh Prof. Supomo (2001:23) bahwa hubungan kerja adalah kondisi dan kesepakatan baik tertulis maupun tidak, yang berkenaan dengan suatu kejadian di mana seseorang bekerja pada orang lain dengan menerima upah karena menjalankan perintah pekerjaan atau aktivitas tertentu yang bernilai.

Namun demikian, dalam peraturan ketenagakerjaan Indonesia selain hukum positif (UU 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan) terdapat juga sumber aturan lainnya yang bersifat otonom yaitu sumber hukum materil yang timbul antara pekerja dan pemberi kerja yang tertuang dalam perjanjian kerja. Dalam hal ini, hubungan kerja sangat erat kaitannya dengan perjanjian kerja yang telah disepakati antara pemberi kerja dan pelaksana kerja (pekerja). Bahkan dalam prakteknya, sumber hukum yang bersifat otonom ini lebih kuat dibanding dengan hukum positif yang ditentukan oleh pemerintah

karena kebebasannya dalam menentukan setiap kesepakatan seperti upah dan jenis pekerjaan antara pemberi kerja dan pekerja. Beberapa jenis aturan yang bersifat otonom tersebut diantaranya : Perjanjian Kerja Bersama (perjanjian yang dibuat oleh serikat pekerja dengan pemberi kerja/pengusaha); Perjanjian Kerja (perjanjian yang dibuat antara pekerja/buruh dengan pemberi kerja/pengusaha); Peraturan Perusahaan (dibuat sepihak oleh pemberi kerja/pengusaha).

Dari sudut pandang sosial, menurut Smith (1996) hubungan kerja mengandung minimal dua dimensi sebagai prinsip dasar yang saling mengikat yaitu kerjasama yang saling menguntungkan dan saling ketergantungan. Kedua dimensi ini kemudian diturunkan ke dalam hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing pihak (pengusaha dan pekerja). Pekerja diantaranya memiliki hak untuk upah dan memiliki kewajiban yang menjadi hak pengusaha dan begitupun sebaliknya sehingga ada mekanisme saling ketergantungan antara pengusaha dan pekerja. Jika dua hal tersebut dilanggar, yaitu hak dan kewajiban masing-masing pihak, maka dimensi hubungan kerja menjadi tidak berlaku karena tidak mungkin tercipta kerjasama dan saling ketergantungan.

Terkait pencapaian hubungan kerja yang harmonis yaitu adanya kerjasama yang saling menguntungkan dan ketergantungan, Smith (1996) menekankan pada terpenuhi beberapa prinsip diantara kedua belah pihak (pengusaha dan pekerja). Prinsip-prinsip tersebut adalah: 1) Profit (keuntungan), dalam hal ini kedua belah pihak dalam melakukan hubungan kerja dilandaskan pada upaya memperoleh keuntungan. Pengusaha melalui modal yang ditanam, sementara pekerja dari kegiatan (bekerja) yang dilakukan; 2) Profesionalitas-produktivitas. Profesionalitas antara pekerja dan pemberi kerja (pengusaha) mencakup *term profession* (profesi), *vocation* (keahlian), *occupation* (jabatan), *job* (pekerjaan), *ethic* (etos kerja), *carrier*

(jenjang karir), *work* (perkejaan) dan *bussines sustainability* (kelancaran usaha). 3) *Loyalty* (loyalitas) dan *Morality* (moralitas), keduanya menentukan kedisiplinan, kepatuhan, itikad baik, tanggung jawab antara pekerja dan pengusaha dalam melakukan kegiatan kerja secara bersama.

2.3. Prinsip-prinsip Hubungan Kerja yang Menjamin Kelangsungan Kerja

Dalam hubungan kerja terdapat satu faktor yang sangat penting yaitu keberadaan tenaga kerja yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan kegiatan produksi. Secara otomatis, produktivitas produksi usaha akan meningkat jika ditopang oleh ketersediaan sumber daya tenaga kerja yang terampil, cerdas, kreatif, rajin, tekun, ulet dan professional serta dibarengi oleh adanya penghargaan yang tinggi dari pemberi kerja terhadap berbagai usaha dan prestasi yang telah disumbangkan oleh tenaga kerja. Kedua hal tersebut, yaitu ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan penghargaan tinggi yang diberikan merupakan bagian terpenting yang mempengaruhi keberlanjutan hubungan kerja (kelangsungan kerja dan usaha).

Selanjutnya Keslo dan Adler (1998) mengemukakan tiga prinsip keadilan dalam hubungan kerja yang diyakini dapat menjamin kelangsungan hubungan kerja dan sekaligus kelangsungan usaha. Ketiga prinsip tersebut adalah: 1) prinsip partisipasi; 2) prinsip distribusi; dan 3) prinsip keselarasan (*harmony*). Berikut uraian dari masing-masing prinsip tersebut:

1. Prinsip Partisipasi : prinsip ini terkait erat dengan bagaimana seorang pekerja sebagai “input” dalam kegiatan produksi dapat memberikan “output” untuk kelangsungan usaha dan sekaligus kerja yang dilakukan. Sementara dari sisi pengusaha, bagaimana

memberikan kesempatan kepada pekerja untuk melakukan kegiatan operasional kerja berdasarkan kemampuan yang dimiliki oleh tenaga kerja. Prinsip ini tidak mensyaratkan adanya hasil yang sama, tetapi mensyaratkan agar setiap pekerja dalam proses produksi dijamin untuk membuat kontribusi produktif, baik melalui pekerjaan oleh pekerja maupun modal oleh pemberi kerja. Prinsip hubungan kerja ini, menolak aroganisme, pemaksaan dan ketidakterbukaan.

2. Prinsip Distribusi: prinsip ini mengandung pemahaman bahwa setiap “output” yang dihasilkan oleh pekerja maupun “input” yang diusahakan oleh pemberi kerja mengandung hak-hak yang harus dipenuhi (*out-take*) sesuai dengan kontribusi yang telah diberikan. Dalam hal ini, tenaga kerja mendapatkan upah, kondisi kerja, jaminan kerja, kepastian kerja, kesejahteraan dan lainnya dari pemberi kerja. Sementara pemberi kerja menerima kewajiban dari pekerja melalui produktivitas dan profesionalisme kerja. Dalam hal ini masing-masing pihak (pekerja dan pemberi kerja) mendistribusikan hak dan kewajibannya secara seimbang sehingga tercipta hubungan kerja yang berkelanjutan.
3. Prinsip keselarasan (*harmony*): prinsip ini mengandung pemahaman adanya keseimbangan antara keinginan pemberi kerja dan pekerja sehingga tidak terjadi distorsi dalam hubungan kerja. Biasanya, tidak bekerjanya prinsip keselarasan ini dipengaruhi oleh tidak adanya keterbukaan dari pihak pemberi kerja (pengusaha) terhadap pengembangan usaha yang dilakukan akibat sifat egaliter yang menganggap bahwa pekerja merupakan pihak yang sangat tergantung pada pemberi kerja. Prinsip keselarasan dalam hubungan kerja ini menawarkan adanya sikap saling ketergantungan antara pemberi kerja untuk kegiatan usahanya dan tenaga kerja untuk dapat bekerja.

Prinsip pertama dan kedua dalam pencapaian hubungan kerja yang berkelanjutan merupakan dua sifat dasar dari hubungan kerja di mana masing-masing pihak memberikan dan mendapatkan apa yang semestinya (*to what she or he is due*). Sementara pada prinsip ketiga, keselarasan mencerminkan adanya kepercayaan (*trust*) yang menjadi esensi dasar dan berlaku umum dalam membangun suatu hubungan, termasuk hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja dalam kegiatan produksi usaha.

2.4. Pemberdayaan Tenaga kerja: Definisi dan Konsep

Pemberdayaan atau dalam bahasa Inggris disebut *empowerment*, mempunyai makna dasar “daya” yang juga berarti kekuatan (*power*). Berdasarkan arti tersebut, pemberdayaan tenaga kerja dapat diartikan sebagai upaya menciptakan tenaga kerja agar dapat lebih berdaya, dalam artian produktivitas dalam kegiatan produksi, sekaligus peningkatan kualitas hidup melalui penghargaan (upah) yang diterima. Johnson (1998) mengemukakan bahwa *empowerment* sebagai suatu hal yang memiliki pusat perhatian dalam membantu kelompok tertentu (dalam hal ini dapat dikaitkan untuk kelompok pekerja) untuk tumbuh dan berkembang melalui berbagai fasilitasi dan dukungan agar mereka mampu memutuskan, merencanakan dan mengambil tindakan untuk mengelola dan mengembangkan lingkungan fisiknya serta kesejahteraan sosialnya. Berdasarkan definisi tersebut, proses pemberdayaan tenaga kerja, sebagai sebuah kelompok sosial, tentunya tidak bisa berjalan sendiri tetapi memerlukan peran *collective* dari pemberi kerja, pemerintah, lembaga non pemerintah dan termasuk kelompok tenaga kerja itu sendiri.

Luthfi (2003) dan Kevin (1996) keduanya menyatakan pemberdayaan sebagai upaya menumbuhkan kekuasaan dan wewenang yang lebih besar kepada kelompok tertentu (marginal) yang memiliki

keberdayaan rendah. Strategi yang ditempuh dengan memberikan kesempatan kepada kelompok marginal untuk mendapatkan akses sama yang diterima oleh kelompok yang sudah lebih mapan. Misalnya, dalam hal pendidikan, kesehatan, kegiatan ekonomi (produksi), pekerjaan, pelatihan, pengembangan diri, fasilitas publik dan sebagainya. Sementara White (dalam Handayani, 1999) menyatakan pemberdayaan bukan sekedar memberikan kesempatan kepada kelompok marginal (berdaya rendah) untuk dapat menggunakan sumber daya dan akses publik, tetapi juga upaya untuk melepaskan ketergantungan yang terus menerus (menciptakan kemandirian).

Sementara itu, konsep lain tentang pemberdayaan menyatakan bahwa pemberdayaan mempunyai dua makna, yakni mengembangkan, memandirikan, menswadayakan dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Makna lainnya adalah melindungi, membela dan berpihak kepada yang lemah, untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan terjadinya eksploitasi terhadap yang lemah. Sementara itu Prijono (1996) mengemukakan bahwa pemberdayaan mengandung dua kecenderungan, yakni primer dan sekunder. Kecenderungan primer berarti proses pemberdayaan menekankan proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Sedangkan kecenderungan sekunder melihat pemberdayaan sebagai proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihannya (Prijono, 1996).

Dalam pengertian yang lebih luas, Sumodiningrat (2007) dalam bukunya "Pemberdayaan Sosial" menyatakan bahwa pemberdayaan

masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui penciptaan suasana/iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; peningkatan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana (fisik dan sosial) serta kelembagaan; dan perlindungan atau pemihakan kepada yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidakimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Menurutnya pemberdayaan sebagai suatu strategi yang tepat dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Di samping definisi dan konsep di atas, terdapat juga konsep yang lebih spesifik tentang pemberdayaan yang ditujukan pada kelompok tertentu (perempuan) dikemukakan oleh Sara Hlupekile Long Wee, seorang konsultan jender dan pembangunan (March, et.al. 1999). Dalam konsep Longwe, pembangunan berarti meningkatkan kemampuan orang dalam mengurus kehidupannya sendiri, dan keluar dari perangkap kemiskinan. Framework Longwe menekankan pada 5 aspek yang merupakan '*level of equity and empowerment*' yaitu: *welfare* (kesejahteraan), *access* (akses), *conscientisation* (penyadaran), *participation* (partisipasi), dan *Control*. Kelima aspek ini diyakini merupakan tahapan atau proses menuju kesetaraan antarkelompok masyarakat dalam mencapai kesejahteraan.

Yunan (2009) mengemukakan bahwa salah satu indikator dari keberdayaan adalah kemampuan dan kebebasan untuk membuat pilihan yang terbaik dalam menentukan atau memperbaiki kehidupannya. Konsep pemberdayaan merupakan hasil dari proses interaksi di tingkat ideologis dan praksis. Pada tingkat ideologis, pemberdayaan merupakan hasil interaksi antara konsep *top-down* dan *bottom-up*, antara *growth strategy* dan *people centered strategy*. Sedangkan di tingkat praksis, proses interaksi terjadi melalui

pertarungan antar ruang otonomi. Maka, konsep pemberdayaan mencakup pengertian pembangunan masyarakat (*community development*) dan pembangunan yang bertumpu pada masyarakat (*community/group based development*). *Community development* adalah suatu proses yang menyangkut usaha masyarakat dengan pihak lain (di luar sistem sosial) untuk menjadikan sistem tatanan yang lebih baik, mengembangkan kemandirian dan kepedulian masyarakat dalam mengatasi permasalahan kehidupannya, mengembangkan fasilitas dan teknologi sebagai upaya meningkatkan daya inisiatif, pelayanan masyarakat dan sebagainya. Secara filosofis, *community development* mengandung makna ‘membantu masyarakat agar bisa menolong diri sendiri’, yang berarti bahwa substansi utama dalam aktivitas pembangunan masyarakat adalah masyarakat itu sendiri.

2.5. Model-model Pemberdayaan UMKM

Krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 1997 telah menyadarkan banyak pihak tentang besarnya peran UMKM dalam sendi perekonomian Indonesia. Konglomerasi usaha besar di beberapa sektor yang sebelumnya dibanggakan ternyata tidak mampu meredam gejolak ekonomi yang saat itu berdampak buruk terhadap perekonomian Indonesia. Sebaliknya, UMKM yang juga sempat terpuruk namun mampu bangkit secara cepat dan menjadi penopang kegiatan ekonomi. Orientasi pembangunan pada usaha-usaha skala besar yang gagal pada satu sisi dan tumbuhnya UMKM di sisi lain, telah membuka mata berbagai pihak, terutama pemerintah dan dunia usaha akan pentingnya peranan UMKM dalam perekonomian nasional, terutama di dalam penyerapan tenaga kerja dan penciptaan kesempatan kerja.

Menyadari keadaan mendesaknya kebutuhan UMKM di Indonesia, maka berbagai program pemberdayaan dan pengembangan UMKM

telah banyak dilakukan, terutama oleh pemerintah. Berbagai model dan pengembangan UMKM tersebut sebagian besar mengambil konsep yang telah dilaksanakan di negara lain yang dinilai telah berhasil. Berikut ini adalah penjelasan beberapa model pemberdayaan UMKM yang banyak diterapkan di Indonesia.

a. Model Pemberdayaan Grameen Bank

Model pemberdayaan Grameen Bank pertama kali diperkenalkan oleh Muhammad Yunus dari Banglades yaitu melalui pemberian kredit usaha kepada kelompok rumah tangga miskin (perempuan). Upaya tersebut dilakukan Muhammad Yunus untuk mendekatkan kelompok miskin terhadap fasilitas kredit yang waktu itu belum terakses oleh sebagian besar kelompok miskin di Banglades. Perbedaan antara Grameen Bank dengan fasilitas kredit perbankan konvensional adalah tidak adanya jaminan atau agunan dan pengajuan kredit dilakukan melalui kelompok dengan sistem pengembalian angsuran mingguan atau bulanan. Konsep Grameen Bank ini kemudian banyak diterapkan dalam pembangunan di Indonesia khususnya di daerah pedesaan melalui program-program seperti Kredit Usaha Keluarga Sejahtera (KUKESRA), Program Simping Pinjam PNPM, Kredit Candak Kulak (KCK) dan lainnya. Namun demikian keberhasilan dari program-program tersebut masih dipertanyakan dibanding konsep Grameen Bank yang telah diakui internasional sangat berhasil mengurangi kemiskinan di Banglades.

b. Model Pemberdayaan Inkubator

Sesuai dengan istilahnya, model pemberdayaan inkubator adalah memberikan berbagai fasilitas produksi kepada pelaku usaha UMKM dalam suatu lokasi (sentra industri) melalui kemudahan sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan UMKM. Model pemberdayaan

inkubator biasanya berasal dari inisiatif pemerintah untuk dapat mengoptimalkan kegiatan UMKM dalam satu kawasan tertentu sehingga kegiatan produksi mudah dipantau dan dikoordinasikan secara efisien.

Pemberdayaan UMKM melalui model inkubator pertama kali diterapkan di China pada tahun 1993 yang diperkenalkan oleh Rustam Alkaka ahli UNDP kelahiran India. Model indikator UMKM diakui menjadi salah satu keberhasilan yang mendukung kebangkitan ekonomi China saat ini yang berhasil menciptakan peningkatan daya saing UMKM tidak hanya di dalam negeri tetapi juga pemenuhan pasar luar negeri. Di Indonesia, model pemberdayaan UMKM melalui pendekatan inkubator ini banyak diterapkan di daerah-daerah yang memiliki sentra-sentra kegiatan ekonomi (termasuk di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur), namun dalam prakteknya rancang bangun inkubator tersebut kurang didukung oleh kelengkapan sarana dan prasarana ekonomi pendukung.

c. Model *Community Based Development (CBD)*

Model CBD telah lama dipraktekkan di banyak negara maju dan cukup berkembang sejak awal tahun 1970. Namun demikian, khusus di Indonesia, model CBD dalam pemberdayaan UKM baru diperkenalkan sekitar pertengahan tahun 1980-an. Menurut Hidayat dan Darwin (2001) dalam Nadjib (2003) praktek CBD di negara berkembang diawali dari kegagalan pola pembangunan sentralistik (*to down planning*) yang tidak mampu mengakomodasikan kepentingan kelompok marginal dalam masyarakat. Kegagalan tersebut kemudian diakomodasi dengan penerapan strategi bottom up planning, dimana mensyaratkan adanya partisipasi seluruh kelompok masyarakat dalam menentukan perencanaan pembangunan.

Prinsip dasar dari CBD menurut Rubin dalam Hidayat dan Darwin (2001) adalah kegiatan yang dilakukan harus memiliki *break event* – dan berkelanjutan, melibatkan masyarakat dalam perencanaan dan pengawasan, adanya kegiatan pelatihan dan pengembangan usaha, memaksimalkan sumber daya lokal, dan perantara antara kepentingan pemerintah dan dunia usaha (mikro).

d. Model Pemberdayaan Modal Ventura

Model pemberdayaan UMKM modal ventura pertama diperkenalkan pada tahun 1939 di Amerika Serikat dan telah dipraktekkan di banyak negara, termasuk di Indonesia, sebagai alternatif pembiayaan bagi dunia usaha untuk mengembangkan usaha. Secara umum modal ventura didefinisikan sebagai modal yang disediakan oleh profesional dalam rangka investasi disertai bimbingan terhadap suatu perusahaan yang masih baru tetapi mempunyai pertumbuhan yang cepat. Untuk menunjang permodalan yang kuat biasanya dalam modal ventura terdiri dari sekumpulan individu yang mempunyai modal yang besar ataupun bisa berupa dana pensiun, yayasan ataupun investor asing (NVCA, 2003 dalam Mulyaningsih 2003). Di Indonesia pemberayaan UMKM dengan model modal ventura berkembang sejak akhir awal tahun 1980 dan kini telah berkembang hampir di seluruh daerah di Indonesia melalui pengembangan usaha daerah (PMDN) maupun usaha asing (PMA).

e. Model Pemberdayaan UMKM Baitul Mal Wal Tamwil (BMT)

Model pemberdayaan UMKM melalui pendekatan BMT digagas oleh *Islamic Development Bank* pada tahun 1978 sebagai pelaksanaan keinginan banyak negara islam saat itu untuk memiliki lembaga keuangan yang bersifat islami. Dalam perkembangannya kegiatan pemberdayaan model BMT banyak diadopsi seiring dengan

meningkatnya perbankan syariah di banyak negara berpenduduk agama Islam, termasuk di Indonesia.

Model BMT sebenarnya tidak berbeda dengan penyaluran kredit usaha yang selama ini dilakukan oleh bank-bank konvensional di Indonesia. Namun demikian dalam aktivitasnya, BMT memiliki perbedaan diantaranya: 1) pembiayaan dengan sistem bagi hasil (musyarakah dan mudharabah), 2) jual beli dengan pembayaran ditangguhkan; dan 3) investasi atau penyertaan. Dalam perkembangannya, model BMT tidak hanya mencakup UMKM tetapi merambah pada usaha perdagangan kecil perorangan. Operasional BMT biasanya didanai dalam bentuk yayasan atau koperasi dan penyaluran kredit dilakukan secara manual minim birokrasi administrasi yang berbelit. Model BMT sangat cocok dan dibutuhkan pada usaha perseorangan yang membutuhkan dana bantuan tetapi tidak *bankable* jika harus berhubungan dengan lembaga keuangan perbankan resmi.

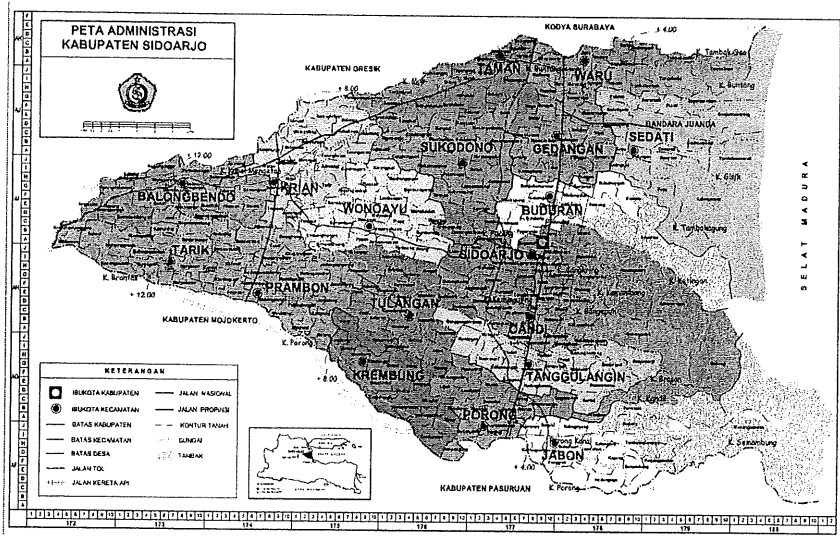
BAB III

SETTING SEKTOR INDUSTRI DAN JASA DI KABUPATEN SIDOARJO DAN MALANG

3.1. Sektor Industri dan Jasa Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang wilayahnya berbatasan dengan wilayah Kota Surabaya. Kota Surabaya merupakan kota terbesar kedua setelah Jakarta dan merupakan kota industri yang cukup besar. Sementara Kabupaten Sidoarjo yang sangat dekat dengan Kota Surabaya memiliki potensi menerima luapan perkembangan industri yang ada di kota ini. Oleh karena itu, berbagai industri/ perusahaan pengolahan dan jasa di Surabaya telah merambah ke wilayah kabupaten Sidoarjo. Selain itu, wilayah Kabupaten Sidoarjo memiliki potensi alam, baik potensi darat maupun potensi laut yang dapat dimanfaatkan. Kabupaten ini memiliki wilayah pantai dan wilayah perairan yang cukup luas. Oleh karena itu, sebagian penduduk di daerah ini mempunyai usaha perikanan tambak/ pantai dan usaha perikanan laut. Dengan makin meningkatnya usaha perikanan tambak dan laut tersebut penduduk wilayah ini telah lama mengembangkan usaha agroindustri, utamanya industri pengolahan dari hasil tambak dan laut, seperti usaha kerupuk ikan/ udang, usaha pengolahan/ pengasapan bandeng, usaha pembuatan terasi dan usaha pembuatan bandeng presto.

Gambar 3.1
Peta Administrasi Kabupaten Sidoarjo



Menurut BPS Kabupaten Sidoarjo (2010), di daerah ini sejak tahun 2002 sampai sekarang sektor industri pengolahan terus menunjukkan peningkatan. Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kabupaten Sidoarjo juga mengalami peningkatan yang berarti. Nilai tambah yang diciptakan meningkat dari Rp 19.133.352,57 juta pada tahun 2007 menjadi Rp 21.087.155,48 juta pada tahun 2008. Pada tahun 2008 kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB telah mencapai 47,7 persen.

Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM Kabupaten Sidoarjo (2010) membagi industri pengolahan di wilayah ini menjadi 3 kelompok berdasarkan besarnya aset yang dimiliki industri. Pengelompokan industri tersebut adalah :

- *Pertama*, industri besar adalah industri yang nilai asetnya di atas Rp 600 juta, di sini termasuk PMDN dan PMA.
- *Kedua*, industri kecil (UMKM – Usaha Menengah Kecil Mikro) adalah industri yang memiliki nilai asetnya antara Rp 5 juta – Rp 600 juta.
- *Ketiga*, kerajinan rakyat adalah industri yang nilai asetnya di bawah Rp 5 juta.

Menurut data tahun 2007 di Kabupaten Sidoarjo terdapat 487 unit industri besar. Dari seluruh industri tersebut telah mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 57.692 orang. Sementara jumlah industri kecil pada tahun yang sama mencapai 5.151 unit dan dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak, yakni 82.603 orang. Sementara jumlah kerajinan rakyat di kabupaten ini telah mencapai 169.258 unit. Dari seluruh kerajinan rakyat tersebut ternyata lebih banyak menyerap tenaga kerja, yakni sebanyak 313.552 orang.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sidoarjo membagi wilayah usaha UMKM dalam bentuk cluster-cluster. Mereka menyebutnya dengan label '*Kampung-kampung Potensi UMKM Sidoarjo*' (F. Apridawati, 2011) atau dapat pula disebut dengan sentra-sentra industri. Ada 7 kampung/ sentra industri yang sudah/sedang dikembangkan (lihat Peta 2), yaitu :

1. *Kampung Bebek dan Telur Asin.*

Kampung bebek dan telur asin merupakan kawasan/ sentra para peternak bebek/ itik. Sentra ini terdapat di Desa Kebonsari, Kecamatan Candi. Sentra ini merupakan kelompok peternak bebek. Kelompok peternak bebek ini dibentuk pada tanggal 24 Maret 1992. Anggotanya pada awal mula hanya sebanyak 11

orang dan hanya bermodalkan 500 ekor bebek. Anggotanya kemudian terus berkembang menjadi 47 orang pada awal tahun 2011. Menurut pengakuan ketua kelompok peternak bebek (Nur Hidayat) pada tahun 2010 pendapatan tertinggi pernah mencapai Rp 1,8 milyar dalam satu bulan atau produk yang dihasilkan dapat mencapai 1,5 juta telur. Seiring dengan makin meningkatnya harga pakan, pendapatan peternak bebek makin menurun. Sebagai akibatnya jumlah anggota (peternak bebek) makin berkurang. Jumlah populasi bebek sampai awal tahun 2011 tinggal sebanyak 74.250 ekor dan rata-rata per anggota memiliki 1.500 ekor bebek.

Ilustrasi 3.1:

Keberhasilan pengembangan peternakan bebek di Kampung bebek 'Sumber Pangan' di wilayah Kebonsari, Candi Sidoarjo pernah menerima penghargaan sebagai Juara Pertama tingkat nasional atas prakarsa dan prestasinya dalam mendorong dan mewujudkan pemantapan Ketahanan Pangan Regional, pada tanggal 3 Desember 2010. Penghargaan telah diberikan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara. Pada tahun sebelumnya 2008 meraih juara II dan tahun 2009 meraih juara I dalam Lomba Kelompok Tani Ternak Itik tingkat Provinsi Jawa Timur (*Ekonomika Sidoarjo, Maret 2011*).

2. *Kampung Batik Tulis*

Kampung Batik Tulis merupakan kawasan para pengrajin pembuatan batik tulis. Nampaknya Kabupaten Sidoarjo tidak mau kalah dengan daerah-daerah lain, seperti Yogyakarta, Solo, Pekalongan dan Madura yang telah lama mengembangkan kerajinan batik (lihat Ilustrasi 3.2). Kerajinan batik tulis akhir-akhir ini sedang terus dikembangkan di Kabupaten Sidoarjo, tepatnya di Kelurahan Sidoarjo, Kecamatan Jenis, wilayah kota Sidoarjo. Sejarah batik tulis di kelurahan ini sebetulnya juga telah ada sejak zaman sebelum kemerdekaan. Jumlah pengrajin batik tulis di sentra tersebut saat ini baru mencapai 29 rumah tangga. Namun menurut informasi, pemasaran produk batik tulis di Kelurahan Sidoarjo ini sudah mencapai daerah lain, termasuk kota Jakarta.

Ilustrasi 3.2:

Menurut informasi batik tulis tradisional Sidoarjo ada sejak tahun 1675 atau setahun setelah berdirinya masjid tertua Masjid Jamik Al Abror di daerah ini. Pengembang batik di Jetis, Sidoarjo adalah Mbah Mulyadi yang memberi pelatihan cara-cara membatik kepada penduduk, di samping mengajar membaca Al Quran sebagai tugas utamanya. Kemudian batik menjadi mata pencaharian penduduk untuk dijual ke pasar Jetis. Batik tradisional Jetis dikenal sebagai batik tulis halus dan selanjutnya berkembang menjadi corak berbagai warna yang menjadi ciri khas batik Jetis. Corak yang dikembangkan antara lain motif *burung merak*, *kupu-kupu*, *bunga kenongo* dan *kembang bayem*. Sementara latarnya memiliki motif *beras utah*, *cecekan* dan *sunduk kentang* (*Ekonomika Sidoarjo, Maret 2011*)

3. *Kampung Pot Bunga*

Kampung Pot Bunga merupakan kawasan pengrajin pembuatan pot bunga. Kampung pot bunga dikembangkan di Desa Kamasen, Kecamatan Balongbendo. Awal kegiatan kerajinan pot bunga di desa ini sejak tahun 1974. Kelompok pengrajin pot bunga yang beranggotakan 31 orang ini diberi nama *Paguyuban Pos Daya Perajin Pot Agawe Santosa*. Kelompok ini dibentuk untuk menciptakan kebersamaan sesama pengrajin, saling gotong royong, saling asih, asah dan asuh. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, kegiatan pembuatan pot bunga dapat memberikan kesempatan kerja bagi anggota rumah tangga. Bagi ibu-ibu rumah tangga di sini setelah selesai mengerjakan kegiatan rumah tangga dapat membantu membuat pot bunga. Juga bagi anak-anak usia sekolah, setelah pulang sekolah ada yang ikut membantu memproduksi pot bunga usaha orang tuanya. Pemasaran produk pot bunga mencapai Mojokerto, Madura, Surabaya, Yogyakarta, Jakarta, Bali, Sumatera dan Kalimantan. Untuk memenuhi selera pasar jenis produk telah dideversifikasi, seperti gentong, pancuran air dll.

4. *Kampung Jamur*

Kampung jamur merupakan kawasan para petani pembudidaya jamur. Kampung jamur terdapat di Desa Wadung Asih, Kecamatan Buduran. Ketua kelompok petani jamur ini adalah Sdr. Sunarto. Nama kelompok petani jamur di Desa Wadung Asih adalah '*Maju Makmur*', jenis jamur yang dibudidayakan adalah jamur tiram. Jumlah anggota kelompok sebanyak 35 orang. Karena hasilnya cukup menjanjikan para pembudidaya jamur tiram ini telah merambah ke desa sekitarnya, yaitu Desa Pasung, Siwalanpanji, Buduran dan Sukorejo.

5. *Kampung Sepatu dan Sandal*

Kampung sepatu dan sandal merupakan kawasan/sentra para pengrajin pembuatan sepatu dan sandal. Sentra tersebut berada di Desa Mojosantren, Kecamatan Krian. Keterampilan membuat sepatu sudah dikenal warga daerah ini sejak zaman penjajahan Belanda. Mereka pernah bekerja di perusahaan sepatu pada zaman penjajahan Belanda. Kemudian beberapa rumah tangga mulai mengembangkan kerajinan sepatu pada tahun 1948. Usaha kerajinan sepatu tersebut cukup berkembang pada tahun 1970 – 1980. Kemudian juga berkembang lagi pada tahun 1985 hingga tahun 2000. Pada awal tahun 2011 jumlah pengrajin sepatu dan sandal telah mencapai sebanyak 56 pengrajin. Produknya tidak hanya menghasilkan sepatu dan sandal, tapi juga sudah merambah ke pembuatan tas. Di daerah ini juga sudah ada toko tempat penjualan produk.

6. *Kampung Jajanan* .

Kampung jajanan merupakan sentra para pengrajin jajanan tradisional. Sentra ini terletak di Kedung Sumur. Sentra jajanan tradisional ini dimulai sekitar tahun 1961. Jenis jajanan tradisional yang diproduksi antara lain : *kompyang, roti goring, cakue, kue lumpur, gempo, kucur, onde-onde, horok-horok* dan sebagainya. Daerah pemasarannya adalah di Sidoarjo sendiri, Malang, Jember, Probolinggo dan Banyuwangi. Jumlah pengrajin pada awal tahun 2011 mencapai 35 rumah tangga. Tenaga kerja yang dimanfaatkan umumnya adalah anggota rumah tangga sendiri, famili dan para tetangga terdekat.

7. *Kampung Kerupuk*

Kampung kerupuk merupakan sentra para pengrajin kerupuk. Kampung kerupuk sudah lama dikembangkan di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jambon. Sentra kerupuk ini merupakan satu-satunya sentra agroindustri yang mengolah hasil pertanian dan perikanan. Nampaknya industri pengolahan kerupuk rakyat ini menjadi *trademark* Kabupaten Sidoarjo dengan industri *kerupuk ikan/ udang Sidoarjo*. Kerajinan industri kerupuk mulai dikembangkan sejak tahun 1976. Pelopor kerupuk adalah Haji Darrim, Ny Mutini dan Ny Suryani. Pada awal tahun 2011 jumlah pengusaha kerupuk di sentra ini tercatat berjumlah 52 unit. Industri kerupuk tersebut dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu :

- (1). Jenis industri kerupuk yang memproduksi *kerupuk ikan dan udang*. Saat ini jumlah pengusaha yang masih aktif (berproduksi) sebanyak 21 pengusaha. Skala usaha ini umumnya lebih besar dari pada jenis industri kerupuk yang lain, dilihat dari asset usaha, bahan baku yang digunakan dan jumlah tenaga kerjanya. Beberapa pengusaha memang ada yang khusus hanya memproduksi kerupuk ikan/ udang. Namun juga ada pengusaha yang memproduksi produksi keduanya, yaitu kerupuk ikan dan kerupuk non ikan,
- (2). Jenis industri kerupuk yang memproduksi *kerupuk non ikan/udang*. Jumlah pengusaha jenis kerupuk ini yang masih berproduksi sebanyak 31 orang pengusaha. Umumnya mereka termasuk pengusaha yang modalnya kecil dan jumlah tenaga kerjanya lebih sedikit.

3.2. Sektor Industri dan Jasa di Kabupaten Malang

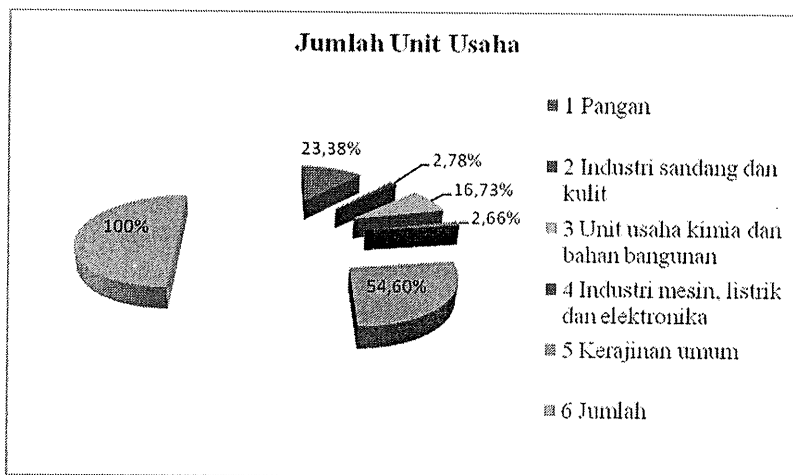
Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang terletak pada posisi strategis, yaitu di wilayah selatan bagian tengah provinsi ini. Kabupaten Malang terletak pada jalur transportasi yang menghubungkan antara wilayah bagian barat dan bagian timur Provinsi Jawa Timur. Sebagian besar wilayah Kabupaten Malang merupakan dataran tinggi. Dengan kondisi geografis tersebut menyebabkan daerah ini menjadi pusat perekonomian dari dahulu sampai sekarang serta sebagai salah satu pusat hunian penduduk di Jawa Timur. Hal ini dikuatkan dengan jumlah penduduk Kabupaten Malang menempati urutan kedua setelah Kotamadya Surabaya dengan jumlah penduduk pada tahun 2009 sebesar 2.425.248 orang (<http://www.malangkab.go.id/index1.php?kode=85>).

Keuntungan letak geografis dan potensi alam yang begitu indah, maka Kabupaten Malang telah menjadi salah satu tujuan wisata di daerah Jawa Timur. Secara historis, sejak dahulu Malang sudah terkenal sebagai daerah yang nyaman sebagai tempat peristirahatan. Bahkan sejak zaman kolonial, Kabupaten Malang ini juga sebagai salah satu kota yang penting di Jawa Timur.

Luas wilayah Kabupaten Malang adalah 3.238,26 km², merupakan daerah yang terluas ke 2 di wilayah Jawa Timur (Kabupaten Malang Dalam Angka, 2010). Luas wilayah ini didukung dengan potensi alam yang melimpah berupa lahan pertanian yang subur dan panorama alam yang indah. Kondisi tersebut merupakan daya tarik tersendiri bagi para wisatawan. Sejak lama Kabupaten Malang terkenal sebagai salah satu daerah penghasil buah apel. Daerah penghasil apel terbesar di Kabupaten Malang adalah Kecamatan Poncokusumo, selain itu kecamatan ini juga sebagai penghasil buah belimbing (http://poncokusumo.malangkab.go.id/?page_id=5).

Kabupaten Malang. Pada tahun 2010 jumlah industri kecil tercatat sebanyak dari 2.553 unit. Jumlah industri kecil tersebut memberikan kontribusi yang besar terhadap kesempatan kerja dan pendapatan masyarakat.

Diagram 3.1:
Jumlah Industri Kecil di Kabupaten Malang (Persentase)

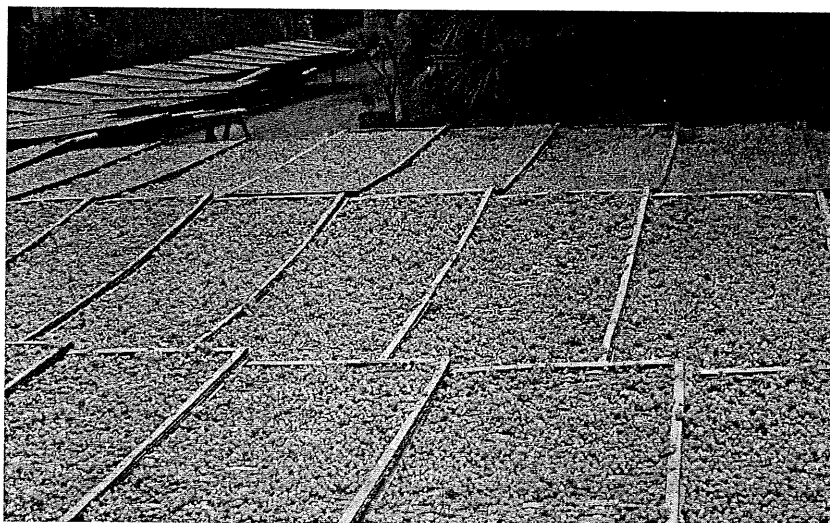


Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kab. Malang Tahun 2010

Diagram 3.1 di atas menunjukkan bahwa jumlah industri kerajinan umum menempati posisi pertama dengan persentase 54,6 persen. Posisi kedua ditempati industri pengolahan pangan dengan jumlah 23,3 persen. Disusul industri kimia dan bahan bangunan sebesar 16,7 persen. Industri sandang dan kulit, industri mesin, listrik dan elektronika jumlahnya sedikit yaitu kurang dari 3 persen dari total industri kecil yang ada. Industri kerajinan umum hampir menyebar ke seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Jenis industri yang tergolong sebagai industri kerajinan umum antara lain : anyaman bambu, kerajinan kayu, tampar mending dan tikar mending. Kerajinan anyaman bambu terkonsentrasi di Kecamatan

Poncokusumo. Industri pengolahan pangan yang menempati posisi kedua dari seluruh industri di Kabupaten Malang, berpusat di Kecamatan Turen dan Donomulyo. Sentra industri pengolahan makanan di Kecamatan Turen meliputi makanan kecil, seperti pembuatan marning, krupuk dan macaroni. Hal ini tidak terlepas dari potensi wilayah Kecamatan Turen yang memiliki potensi komoditas jagung yang begitu besar.

Gambar 3.4
Penjemuran bahan makanan kecil di Talok Kecamatan Turen



Sumber : PPK – LIPI, 2011.

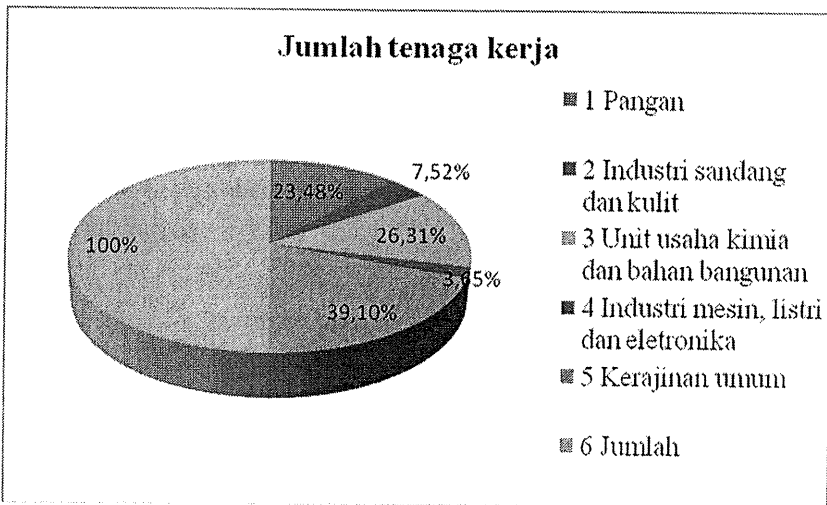
Industri tempe dan tahu hampir menyebar ke seluruh wilayah kecamatan. Sedang industri rengginang terkonsentrasi di Kecamatan Sumberpucung. Industri kimia dan bangunan meliputi industri pembuatan genteng, barang dari gypsum, barang dari semen serta kapur. Industri pembuatan genteng berpusat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Turen, Gondanglegi dan Singosari. Industri gypsum

terdapat di Desa Dawuhan, Kecamatan Poncokusumo. Industri kapur berada di Kecamatan Sumbermanjing.

Industri yang menempati posisi keempat adalah industri sandang (industri border) dan kulit. Industri border banyak terdapat di Kecamatan Pakis, sedangkan industri kulit di Kecamatan Bululawang. Jenis industri yang terakhir yang memiliki unit usaha terkecil adalah industri listrik dan elektronika. Adapun jenis industri yang termasuk dalam golongan industri listrik dan elektronika antara lain : kompor dan besi. Industri kompor berkembang di Desa Taman Harjo, Kecamatan Singosari. Industri besi berkembang di Desa Gedongwetan dan Kedok yang semuanya termasuk wilayah Kecamatan Turen.

Industri kecil yang berkembang di Kabupaten Malang mampu menciptakan lapangan kerja yang cukup banyak. Tenaga kerja yang terserap pada industri kecil adalah sebanyak 6.905 orang. Industri kerajinan umum mampu menyerap tenaga kerja sebesar 2700 orang atau 39,1 persen dari seluruh tenaga kerja yang terserap pada industri kecil, diikuti oleh industri pengolahan pangan yang mampu menyerap sekitar 23,4 persen tenaga kerja.

**Diagram 3.2 :
Komposisi Tenaga Kerja Industri Kecil Kabupaten Malang**



Sumber: Dinas Koperasi dan UKM Kab. Malang, 2010

Industri pengolahan pangan ini berkembang seiring dengan permintaan pasar yang begitu besar. Jenis industri pengolahan makanan yang menyerap tenaga kerja cukup banyak adalah industri tahu, tempe dan kue kering. Kemudian industri usaha kimia dan bahan bangunan mampu menyerap 26,3 persen dari jumlah tenaga kerja yang bergerak di bidang industri kecil. Kemudian disusul oleh industri sandang dan kulit dengan persentase 7,5 persen. Industri mesin, listrik dan elektronika menempati urutan paling bawah dengan jumlah persentase tenaga kerja hanya sebesar 3,6 persen.

Keberadaan industri kecil tersebut bagi Kabupaten Malang telah mampu memberikan andil dalam meningkatkan perekonomian daerah. Berkembangnya industri kecil telah mampu mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Industri

kecil sebagai salah satu soko guru perekonomian nasional sudah mampu dan membuktikan bahwa sektor ini mampu bertahan dari goncangan krisis. Hal ini disebabkan oleh ketahanan industri ini dengan memanfaatkan bahan baku lokal..

3.2.2. Sektor Jasa

Industri jasa berkembang secara dinamis mengikuti perkembangan situasi politik dan ekonomi baik internal maupun eksternal. Industri jasa yang saat ini sedang berkembang di Kabupaten Malang adalah jasa pariwisata . Industri ini berkembang didukung dengan kondisi wilayah Kabupaten Malang yang memiliki udara yang sejuk, selain itu didukung panorama alam yang begitu indah dan hampir tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Perkembangan sektor pariwisata ditunjang oleh berbagai produk jasa pelayanan antara lain : perhotelan, biro perjalanan, restoran, rumah makan, jasa konsultan pariwisata, industri pembuatan cinderamata dan jasa pemandu wisata.

Untuk meningkatkan sektor pariwisata Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah merumuskan dan mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 20 Tahun 2003. Dalam Perda tersebut berisi perizinan usaha pariwisata. Perda tersebut dikeluarkan sebagai pedoman dalam pengembangan jasa usaha pariwisata. Selain itu sebagai pedoman dalam pengaturan jasa pariwisata yang ada di Kabupaten Malang.

Saat ini industri jasa penunjang pariwisata tersebut yang telah berkembang di Kabupaten Malang adalah penginapan, rumah makan, obyek wisata, biro jasa dan transportasi. Adapun rincian jumlah jenis jasa yang ada di Kabupaten Malang disajikan dalam Tabel 3.1.

Tabel 3.1:
Jenis Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Malang, Tahun 2009

No	Jenis Industri Jasa Pariwisata	Jumlah
1	Rumah Makan	93
2	Hotel dan penginapan	75
3	Biro Jasa	10
4	Usaha transportasi	7

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Malang, 2009.

Pada tahun 2009, jumlah rumah makan di Kabupaten Malang sebanyak 93 unit usaha dan jumlah hotel dan penginapan adalah sebanyak 75. Usaha biro jasa adalah 10 unit dan jumlah usaha transportasi adalah 7 unit usaha. Usaha rumah makan terbanyak berada di Kecamatan Singosari yang memiliki beberapa obyek wisata. Selain itu wilayah ini juga berperan sebagai pintu gerbang untuk menuju kabupaten maupun Kota Malang. Jumlah rumah makan yang berada di Singosari mencapai 37 unit. Kemudian Kecamatan Kepanjen menempati posisi kedua dengan sebanyak 21. Banyaknya jumlah rumah makan kemungkinan karena Kepanjen sekarang merupakan Ibukota Kabupaten Malang.

Kemudian untuk usaha jasa penginapan sebagian besar berpusat di dua kecamatan, yaitu Kecamatan Poncokusumo dan Wonosari. Kedua daerah tersebut merupakan daerah pengembangan agrowisata sehingga keberadaan penginapan dapat menunjang sektor agrowisata. Meskipun banyak penginapan ataupun *homestay* yang berada di Poncokusumo namun sampai saat jumlah hunian masih rendah. Di Kecamatan Wonosari sebagian besar hotel yang ada masih termasuk kelas melati. Penginapan-penginapan tersebut untuk melayani pengunjung wisata agro teh. Wisatawan agrowisata teh di Wonosari antara lain dapat menikmati minuman teh, dapat melihat proses pembuatan teh serta

menikmati panorama kebun teh dan memanfaatkan sarana permainan yang ada.

Usaha biro wisata (agen dan travel) adalah sebanyak 10 unit yang tersebar di Kecamatan Lawang, Ngajum, Turen, Singosari dan Pakis. Keberadaan usaha biro jasa wisata ini tidak terlepas dari perkembangan pariwisata di Kota Malang dan Kota Batu yang memiliki akses dan jaringan yang cukup luas dalam mendatangkan wisatawan. Kemudian usaha jasa transportasi berjumlah 7 unit dengan penyebarannya di Kecamatan Kepanjen, Singosari, Tumpang dan Pakisaji. Hal ini berkaitan dengan ketersediaan sarana dan prasarana transportasi, yaitu berbagai jenis kendaraan, jalan, terminal bus, stasiun kereta api dan pelabuhan udara. Oleh karena itu, penyebarannya sebagian besar berada di suburban Kota Malang.

Obyek Wisata di Malang.

Jenis obyek wisata yang ada di Kabupaten Malang antara lain : wisata budaya, wisata alam, dan wisata minat. Wisata budaya yang ada antara lain : berbagai candi yang tersebar di Kabupaten Malang, seperti Candi Singosari, Candi Jago, Candi Kidal serta wisata religi Pesarean Gunung Kawi. Kemudian wisata alam meliputi wisata pantai yang terletak di Malang bagian selatan, seperti Pantai Ngliyep, Balekambang dan Pantai Sendang Biru dan wisata air yaitu air terjun Coban Rondo dan Coban Pelangi.

Agrowisata apel terdapat di Kecamatan Poncokusumo. Selain itu, di kecamatan ini juga telah berkembang wisata agro belimbing tepatnya di Desa Argosuko. Desa Argosuko sangat potensial sebagai daerah pengembangan buah belimbing. Wisatawan dapat memetik buah belimbing dengan mudah tanpa harus memanjat karena pohon belimbing yang ada di desa ini pendek-pendek, kelebihan lainnya

buah belimbing di sini cukup besar. Oleh sebagian penduduk, belimbing di desa ini telah dimanfaatkan sebagai bahan pembuatan jus belimbing.

Gambar 3.5
Agro wisata Belimbing di Desa Argosuko



Sumber : PPK LIPI 2011

Pemerintah Kabupaten Malang telah menyiapkan Poncokusumo sebagai pengganti Kota Batu (yang telah berpisah dengan Kabupaten Malang) untuk dijadikan sebagai lokasi agrowisata. Kecamatan Poncokusumo sebagai lumbung apel dikembangkan sebagai desa wisata yang mandiri serta sebagai kawasan wisata alam yang prospektif dengan kawasan Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru.

Selain itu, Poncokusumo juga menerapkan *integrated farming*. Antara usaha peternakan dan usaha pertanian. Di desa ini usaha pertanian

telah memanfaatkan kotoran sapi menjadi pupuk kandang atau *biourine* yang diperlukan untuk pertanian (<http://tudearka.wordpress.com/2009/12/21/sendisendi->). Dengan demikian desa wisata Poncokusumo dikemas sebagai desa wisata yang melingkupi agrowisata peternakan, pertanian dan industri olahan. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur pada 2010 telah menyetujui rencana Desa Poncokusumo sebagai desa wisata ini dengan syarat harus dilengkapi peternakan, agrobisnis, tanaman pangan, dan pengelolaan *bioenergi* dengan nama "Safari Mapan Bener". Ada enam desa wisata di Kabupaten Malang, salah satunya adalah termasuk Desa Poncokusumo (<http://tudearka.wordpress.com/2009/12/21/sendisendi->).

Wisata ritual juga telah dikembangkan, seperti : wisata ritual Suku Tengger di Desa Ngadas dan Gubugklakah dengan upacara adat Kasodho dan Unan-Unan. Kemudian ada wisata ritual pertapaan Carmel di Desa Ngadireso (http://poncokusumo.malangkab.go.id/?page_id=5). Potensi-potensi wisata tersebut merupakan modal utama dalam pengembangan pariwisata bagi Kabupaten Malang.

Pada prinsipnya pengembangan pariwisata harus ditopang oleh 3 elemen utama, yaitu : (1). kebijakan pemerintah terhadap sektor pariwisata; (2). obyek pariwisata; (3). serta sarana dan prasarana yang ada (Dinas Pariwisata Kab. Malang, 2011). Kebijakan pemerintah akan berpengaruh terhadap pelaksanaan dan program yang ditetapkan. Desa Poncokusumo sudah ditetapkan sebagai desa wisata sejak tahun 1999. Namun sampai saat ini implementasi kebijakan tersebut belum mampu mengangkat Poncokusumo sebagai salah satu tujuan utama wisata di Kabupaten Malang.

Kebijakan penetapan desa wisata merupakan salah satu cara untuk menggali APBD sekaligus untuk menggerakkan sektor ekonomi masyarakat. Tujuan pembentukan desa wisata Poncokusumo dilatar belakangi adanya potensi budaya maupun potensi alam yang dimiliki desa tersebut. Selain itu kebijakan tersebut juga didorong oleh lepasnya Kecamatan Batu beserta 2 Kecamatan lainnya yang telah menjadi kota mandiri, yang mengakibatkan menurunnya APBD Kabupaten Malang dari sektor pariwisata. Untuk menggantikan peran Kota Batu maka pemerintah Kabupaten Malang menetapkan Desa Poncokusumo sebagai desa wisata Potensi yang ditawarkan desa ini banyak, mulai dari wisata budaya di lereng Bromo sampai dengan wisata agro.

BAB IV

HUBUNGAN KERJA DAN KELANGSUNGAN PEKERJAAN PADA INDUSTRI KERUPUK SIDOARJO

4.1. Pengantar

Ketenagakerjaan Indonesia masih dihadapkan pada permasalahan klasik, yaitu tingkat pengangguran yang tinggi sebagai akibat keterbatasan kesempatan kerja. Sementara itu, dunia usaha khususnya usaha kecil yang menjadi andalan bagi sebagian besar tenaga kerja untuk bekerja, masih sangat rentan terhadap fluktuasi kondisi perekonomian yang bisa berdampak pada kelangsungan usaha. Sering dijumpai kasus pemutusan hubungan kerja karena kondisi perusahaan yang mengharuskan pengurangan tenaga kerja.

Dunia ketenagakerjaan Indonesia masih didominasi oleh usaha kecil dan menengah, sekitar 99 persen unit usaha di Indonesia adalah usaha UKM. Usaha Kecil Menengah (UKM) berperan startegis dalam perekonomian Indonesia. *Pertama*, jumlah industri yang cukup besar dan terdapat pada semua sektor ekonomi. *Kedua*, memiliki potensi besar dalam penyerapan tenaga kerja, *Ketiga*, memiliki kemampuan untuk memanfaatkan bahan baku local, memegang pranan utama dalam pengadaan produk dan jasa bagi masyarakat dan secara langsung menunjang kegiatan usaha yang berskala lebih besar. *Keempat*, usaha kecil dan menengah memberi sumbangan yang cukup besar bagi Produk Domestik Bruto (PDB) (Wiralestari dkk). Meskipun sejarah telah membuktikan bahwa usaha kecil tetap eksis berkembang meskipun krisis ekonomi melanda perekonomian

Indonesia pada tahun 1997 dan usaha kecil mampu menjadi katup pengaman perekonomian Indonesia, namun berbagai kendala masih dialami oleh usaha kecil berkaitan dengan pengelolaan usaha, sumber daya manusia, permodalan, pemasaran dan lain-lain. Hal ini dapat berpengaruh pada kelangsungan usaha dan kelangsungan pekerjaan. Disisi lain, kelangsungan usaha juga dapat ditentukan oleh hubungan antar stakeholders dalam dunia ketenagakerjaan, yaitu tenaga kerja dan pengusaha maupun dan pihak lainnya. Hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan antar stakeholders dapat berpengaruh pada kelangsungan pekerjaan.

Kabupaten Sidoarjo adalah satu daerah yang memanfaatkan potensi sumberdaya hasil pertanian dalam meningkatkan sektor industri pengolahan. Industri krupuk ikan merupakan salah satu industri yang memanfaatkan bahan baku hasil pertanian sebagai bahan baku (agroindustri) di Sidoarjo. Sentra industri krupuk yang berada di Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon sekaligus merupakan cikal bakal industri kerupuk di Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2009 kegiatan usaha industri kerupuk di Kedung Rejo ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai salah satu sentra ekonomi strategis Kabupaten Sidoarjo. Hampir sebagian besar rumah tangga di Kedung Rejo khususnya di Tanggulwulung dan Kaliwiru merupakan pelaku industri kerupuk, walaupun jumlahnya mengalami kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir. Kegiatan industri kerupuk di daerah ini sebenarnya sudah dimulai cukup lama, yaitu sekitar tahun 35 tahun lalu oleh beberapa keluarga sebagai *pioneer*. Hingga saat ini produk industri kerupuk dari Desa Kedung Rejo telah menjangkau pasar yang cukup luas tidak hanya di wilayah Jawa Timur tetapi bahkan antar provinsi dan antarpulau di Indonesia. Namun demikian, keberhasilan pengembangan industri kerupuk di Kedung Rejo tampaknya belum optimal mengingat potensi yang ada sebenarnya masih bisa dapat dimaksimalkan. Pada tahun 2010, kapasitas produksi

industri kerupuk dari Kedung Rejo mencapai 491,3 ton per bulan dengan daya serap tenaga kerja mencapai 552 orang.

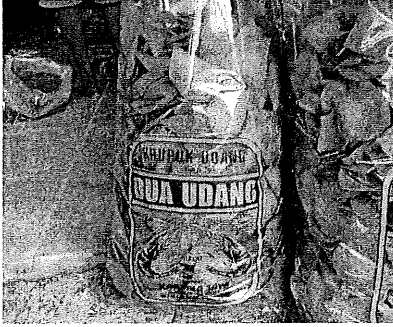
Bab ini membahas tentang hubungan kerja dan kelangsungan pekerjaan pada industri kecil krupuk Sidoarjo. Pembahasan meliputi tiga bagian yaitu gambaran usaha industri kerupuk, hubungan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja serta kemitraan dan kelangsungan usaha. Bahan pembahasan mendasarkan pada dokumentasi dan wawancara dari Dinas Perindustrian dan UKM Kabupaten Sidoarjo, wawancara dengan para informan di tingkat sentra industri kerupuk. Mereka adalah aparat desa, para pengelola sentra dan para pengusaha beserta para tenaga kerjanya.

4.2. Karakteristik Usaha Industri Krupuk

Jenis Usaha Industri Kerupuk

Jenis usaha industri kerupuk di Desa Kedungrejo, Kecamatan Jambon, Kabupaten Sidoarjo pada pokoknya dapat dikelompokkan menjadi dua menurut jenis produksinya. Pertama, industri kerupuk yang memproduksi kerupuk ikan/ udang. Jenis kerupuk ini bahan utamanya tepung tapioca dan ikan kerapu/tenggiri/ gabus atau udang. Sedang bahan baku lainnya adalah telur, gula dan garam. Jenis kerupuk ini dikenal dengan kerupuk ikan (kerupuk ikan cap udang) dan kerupuk udang. Kedua, industri kerupuk yang bahan bakunya hanya tepung tapioka. Sedang bahan penunjang lainnya telur, gula, garam, bawang dan lain-lain. Jenis kerupuk ini dikenal dengan *kerupuk puli* atau *kerupuk sodok* atau *kerupuk klabangan*.

Gambar 4.1.
Produksi Krupuk Ikan



Gambar 4.2.
Produksi Krupuk Uli



Jumlah Perusahaan Kerupuk

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa usaha kerajinan industri kerupuk di Desa Kedungrejo telah dimulai sejak tahun 70 an. Ada beberapa orang perintis usaha kerajinan kerupuk kecil-kecilan. Keahlian atau keterampilan diperoleh sebelumnya mereka sebagai pekerja/ buruh pada pengusaha industri kerupuk ikan di Desa Banjar, Kecamatan Bangil, Kabupaten Pasuruan. Jumlah warga Desa Kedungrejo yang bekerja sebagai pekerja di industri kerupuk ikan di Kabupaten Pasuruan waktu itu sekitar 15 orang. Sehubungan pada tahun 70 an industri kerupuk ikan di Pasuruan tersebut mengurangi jumlah produksi dan ada juga yang mengalami kebangkrutan, maka para pekerja yang berasal dari Desa Kedungrejo berhenti kerja dan pulang kembali ke Kedungrejo. Di Desa Kedungrejo mereka mencoba membuka usaha kerajinan kerupuk ikan dan juga memperkenalkan serta mensosialisasikan cara pembuatan kerupuk ikan tersebut kepada famili dan tetangga sekampung. Mulailah berkembang kerajinan/ industri kerupuk ikan di Desa Kedungrejo. Jumlah pengusaha/pengrajin kerupuk waktu itu pernah mencapai

sekitar 70 rumah tangga. Usaha tersebut kemudian menyebar ke hampir semua dusun/kampung di Desa Kedungrejo. Pada awal tahun 2011 ini jumlah pengusaha kerupuk di Desa Kedungrejo ini masih aktif sekitar 30. Penyebab berkurangnya jumlah usaha kerupuk adalah masalah permodalan, bahan baku semakin mahal dan ada persaingan pemasaran.

Skala dan Permodalan

Menurut Dinas Perindustrian, Perdagangan dan UKM di Kabupaten Sidoarjo semua usaha industri kerupuk yang ada di Desa Kedungrejo masih diklasifikasikan sebagai industri kecil. Meskipun ada beberapa pengusaha industri kerupuk di Desa Kedungreja ada yang asetnya lebih dari Rp 1 milyar. Permodalan yang digunakan dalam usaha industri kerupuk pada umumnya berasal dari : modal sendiri atau keluarga, pinjam ke bank dan bantuan dari sumber lain. Pengusaha kerupuk ikan CH biasa memanfaatkan Bank Danamon di Kota Bangil, Kabupaten Pasuruan. Sebab kantor bank ini letaknya tidak begitu jauh dari Desa Kedungrejo. Lain dengan pengusaha kerupuk ikan H.SB biasanya pinjam di Bank BRI Cabang Bangil. Pada tahun 2011 telah pinjam Rp 200 juta untuk menambah modal.

Bahan Baku

Bahan baku utama pembuatan kerupuk ikan adalah tepung tapioka dan ikan (kerapu, tenggiri, gabus, udang). Sedangkan untuk kerupuk non-ikan, bahan baku utamanya hanya tepung tapioka. Bahan baku tapioka selama ini masih mendatangkan dari luar Kabupaten Sidoarjo. Biasanya bahan baku tersebut dikirim/ didatangkan oleh para supplier dari Jawa Tengah. Menurut seorang pengusaha (H. SB) tepung tapioka untuk usaha kerupuknya mendatangkan dari daerah Pati - Jawa Tengah. Jumlah bahan yang digunakan rata-rata mencapai 1 ton

per hari. Pengiriman bahan baku dilakukan sebulan sekali, sehingga jumlahnya mencapai sekitar 30 ton. Harga tepung tapioka saat penelitian dilakukan adalah Rp 510.000 per ton. Beberapa pengusaha kerupuk yang lain juga ada mendatangkan tepung tapioka dari daerah Pati - Jawa Tengah.

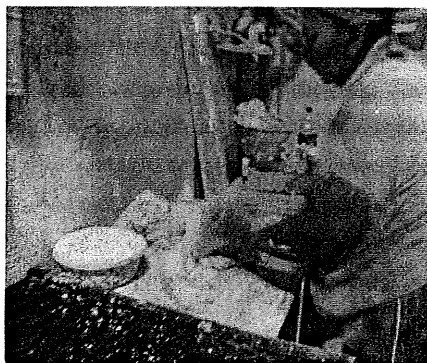
Bahan baku utama lain, yaitu ikan (ikan tenggiri) biasanya mendatangkan dari Lamongan, Gresik dan Juono. Sementara nelayan Sidoarjo sendiri akhir-akhir ini sudah mampu menyediakan bahan baku ikan, sebab produksi ikan di perairan Sidoarjo sudah semakin berkurang. Kebanyakan produksi ikan yang terbanyak di Sidoarjo hanya ikan bandeng. Jenis ikan ini menurut para informan tidak dapat digunakan sebagai campuran membuat kerupuk ikan, sebab tulangnya terlalu banyak sulit dilepaskan. Produk ikan bandeng di pesisir Sidoarjo umumnya digunakan untuk membuat *produk bandeng presto*. Menurut salah seorang informan mantan pengusaha industri kerupuk, untuk membuat kerupuk ikan kelas satu dahulu mereka pernah menggunakan ikan kerapu merah/ ikan gabus segar. Pada tahun 80-an mereka membuat kerupuk ikan, bahan baku ikan gabus masih bisa disediakan oleh suaminya sendiri. Kebetulan suaminya sebagai ABK (Anak Buah Kapal) di wilayah Pasuruan. Namun sekarang suaminya sudah berhenti menjadi ABK.

Tenaga Kerja

Jumlah tenaga kerja dalam setiap unit usaha kerupuk ikan di Desa Kedungrejo sangat bervariasi. Jumlah tenaga kerja setiap unit berkisar antara 10 – 30 orang, tergantung pada besarnya usaha. Secara umum kegiatan usaha industri kerupuk ikan, terbagi dalam 5 bagian (divisi), yaitu :

Bagian produksi pembuatan gelondongan : tugasnya mengaduk tepung, ikan dan bahan lainnya (seperti telur, gula dll). Adonan bahan-bahan ini biasanya sudah diatur oleh pemiliknya, sebab ukuran campurannya masing-masing bisa berbeda dan biasanya dirahasiakan. Bahan-bahan tersebut selanjutnya dibuat gelondongan. Kegiatan ini

Gambar 4.3.
Bagian Pengolahan/Produksi



dapat dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki maupun perempuan. Kemudian gelondongan-gelondongan yang sudah jadi dimasukkan ke dalam oven (atau diasap). Pengasapan biasanya dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki, sebab kegiatan ini secara fisik cukup berat. Jadi produk dari bagian ini berupa gelondongan-gelondongan bahan kerupuk yang siap untuk dipotong-potong menjadi lembaran kerupuk basah. Upah tenaga kerja yang diterima di bagian pembuatan gelondongan ini adalah Rp 50.000 per hari, ditambah dengan makan siang 2 kali. Jaminan sosial yang lain adalah menerima uang lebaran setahun sekali sebanyak Rp 300.000 per orang. Sementara jaminan tunjangan kesehatan belum ada, sehingga apabila ada tenaga kerja yang sakit harus keluar biaya sendiri. Jam kerja para tenaga kerja di bagian ini adalah dari pukul 05.00 sampai pukul 11.00 siang.

Gambar 4.4.
Bagian Pemotongan Kerupuk



Bagian pemotongan : tugasnya memotong-motong (*merajang*) gelondongan bahan kerupuk menjadi potongan-potongan tipis kerupuk basah. Pemotongan krupuk glondongan dilakukan menggunakan mesin pemotong. Pekerjaan ini memerlukan ketelitian, kehati-hatian dan kekuatan fisik, sebab menggunakan alat yang cukup berat. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki dan yang trampil. Ada pabrik yang kegiatan pemotongan gelondongan ini cukup dilakukan oleh keluarganya (suami) sendiri. Kebetulan pengusahanya adalah perempuan. Pekerja bagian ini betul-betul orang yang dipercaya, sebab salah-salah potong, perusahaan akan rugi. Sebab banyak bahan yang terbuang, bila potongan terlalu tebal atau terlalu tipis sehingga kurang laku dijual ke pasar. Bagian ini tidak memerlukan banyak tenaga kerja, dalam satu perusahaan yang mengerjakan tenaga kerja 20 – 30 orang, biasanya pekerja bagian ini cukup hanya satu/ dua orang saja. Upah yang diterima bagian pemotongan ini Rp 50.000 per hari. Jam kerja bagian ini adalah dari pukul 05.00 sampai pukul 11.00.

Bagian penataan : tugas bagian ini adalah menata lembaran potongan-potongan kerupuk basah ke atas sarangan bambu. Pekerjaan ini memerlukan ketelatenan dan gerak cepat untuk mengejar panas matahari. Oleh karena itu, pekerjaan ini memerlukan tenaga kerja perempuan dalam jumlah yang banyak. Sebab begitu gelondongan bahan kerupuk selesai dipotong harus segera digelar/ ditata di sarangan dan harus segera dijemur. Pekerjaan ini biasanya harus sudah selesai sebelum pukul 12.00 siang, sebab mengejar sinar/ panas matahari. Oleh karena itu, jam kerja tenaga kerja pada bagian ini dari

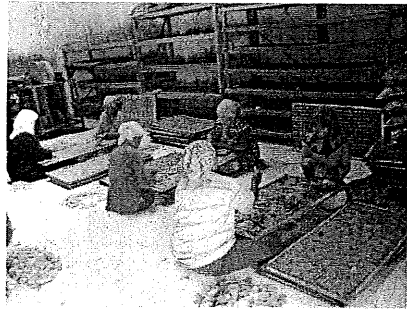
pukul 06.00 sampai pukul 12.00. Upah yang diterima masing-masing tenaga kerja hanya Rp 10.000 per hari, ditambah makan siang sekali. Tenaga kerja bagian ini tidak menerima jaminan sosial yang lain.

Bagian penjemuran dan pengepakan: tugasnya menjemur

kerupuk basah di sarangan-sarangan diangkut ke halaman, pinggir jalan atau tempat terbuka lainnya dan sore hari mengangkut kerupuk-kerupuk kering di sarangan dibawa ke gudang. Kerupuk-kerupuk yang sudah kering dimasukkan ke kantong-kantong plastik yang sudah ada labelnya. Kemudian kerupuk dalam kantong tersebut ditimbang, biasanya seberat 5 kilogram per kantong. Pekerjaan ini memerlukan tenaga fisik yang kuat dan cekatan. Biasanya pekerjaan ini dilakukan oleh tenaga kerja laki-laki yang masih muda. Upah yang diterima hanya Rp 25.000 per hari, ditambah dengan sekali makan siang.

Bagian pembelian bahan dan pemasaran : tugas bagian pembelian adalah membeli bahan baku utama dan bahan baku penunjang pembuatan kerupuk. Pekerjaan ini biasanya dilakukan oleh pemilik perusahaan. Biasanya pemilik cukup pesan/ order dan kemudian barang dikirim langsung ke perusahaan. Kemudian mengenai pemasarannya, biasanya dilakukan oleh pemilik perusahaan dan diangkut dengan kendaraannya sendiri.

Gambar 4.5.
Bagian Penataan “Noto” Kerupuk



Pemasaran Kerupuk

Pemasaran kerupuk pada umumnya ke luar Kabupaten Sidoarjo, namun masih wilayah Provinsi Jawa Timur, seperti Surabaya, Malang, Blitar, Kediri dan Tulungagung. Juga pemasaran sampai wilayah Jawa lainnya (Jawa Tengah, Jakarta) dan Sumatera. Selama ini belum ada yang menembus pasar luar negeri. Pemasaran biasanya dilakukan oleh pemilik atau keluarga pemilik perusahaan. Kendaraan angkut yang digunakan adalah kendaraannya sendiri. Jadi belum ada kerjasama atau kemitraan dengan orang lain, lembaga dan jasa angkutan yang lain (lihat Ilustrasi 4.1).

Ilustrasi 4.1:

Haji Suef merupakan usaha industri kerupuk yang terbesar di Desa Kedungrejo. Merek produksinya 'Sueb Jaya'. Usaha ini dilakukan sejak tahun 1983. Modal yang digunakan akhirnya ini pinjam ke Bank BRI Cabang Bangil. Pada tahun 2011 pinjam ke bank tersebut sebanyak Rp 200 juta. Karena angsuran lancar, pengusaha ini pernah mendapatkan penghargaan berupa uang tunai sebanyak Rp 25 juta. Produksi kerupuk per hari dapat mencapai satu kuintal kerupuk kering (siap jual). Pemasaran produk dikirim sampai Blitar, Kediri, Tulungagung dan Jawa Tengah. Pemasaran saat ini dilakukan sendiri pemilik usaha, kemudian disetor ke distributor masing-masing kota. Sebelumnya penjualan produk melalui seller. Kebetulan sellernya anaknya sendiri (Sdr Asrofil), namun tetap diperhitungkan secara bisnis meskipun dengan anaknya sendiri. Saat ini anaknya sudah membuka usaha kerupuk sendiri, sehingga kerupuk merek Sueb Jaya dipasarkan sendiri oleh Haji Sueb. Sekali kirim ke distributor sebanyak 500 bal atau 2,5 ton. (Hasil Wawancara Mendalam, 2011)

Selama ini di daerah kajian belum ada lembaga semacam koperasi atau lembaga untuk pemasaran bersama yang memasarkan produk kerupuk dari Desa Kedungrejo. Pemasaran produk dipasarkan secara langsung sendiri-sendiri ke konsumen atau penampung di luar daerah. Oleh karena itu, persaingan antar pengusaha dalam pemasaran kerupuk cukup ketat dan cenderung ada persaingan yang kurang sehat. Antar pengusaha kadang saling menjatuhkan dalam penentuan harga.

4.3. Hubungan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Berdasarkan UU Ketenagakerjaan No 13 Tahun 2003, hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dan pekerja berdasarkan perjanjian kerja. Hubungan kerja didasari oleh perjanjian kerja antara pengusaha/pemberi kerja dan pekerja/buruh yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban masing-masing. Hubungan kerja terjadi menyangkut tiga hal, yaitu adanya pekerjaan, upah dan perintah kerja. Idealnya antara pekerja dan pemberi kerja terjadi hubungan kemitraan yang saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan (*win-win solution*). Disisi tenaga kerja, sebagai mitra maka hubungan kerja yang terjadi seharusnya dapat memberdayakan mereka sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas tenaga kerja. Pada bagian ini akan membahas hubungan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja pada usaha industri kerupuk di Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo.

4.3.1. Hubungan kerja pada industri kerupuk Sidoarjo.

Hubungan kerja yang terjadi pada usaha industri krupuk ikan memiliki ketiga unsur yang terdapat pada suatu hubungan kerja, seperti yang terdapat pada UU no. 13, yaitu pekerjaan, upah dan perintah kerja. Dalam hal ini, ada pekerjaan yang dilakukan dalam beberapa tahap

jenis/proses produksi, pemilik usaha sebagai pemberi perintah kerja atas jenis-jenis pekerjaan yang dilakukan, serta upah yang diberikan pada pekerja sebagai balas jasa dari setiap pekerjaan yang dilakukan.

Bentuk Hubungan Kerja

Bentuk hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja pada industri krupuk yaitu sebagai pekerja harian. Hubungan kerja yang terjadi relatif sederhana karena pihak yang terlibat hanya dua pihak, yaitu pengusaha/pemberi kerja dan tenaga kerja/pekerja. Hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pemberi kerja adalah dalam bentuk hubungan pekerjaan. Tenaga kerja melakukan pekerjaan pengolahan krupuk yang diperintahkan oleh pemberi kerja dan pemberi kerja membayar upah atas balas jasa yang diberikan tenaga kerja. Namun demikian, hubungan kerja tidak didasarkan atas kesepakatan tertulis tetapi berdasarkan kesepakatan kerja tidak tertulis antara pemilik usaha dengan pekerja berdasarkan rasa saling percaya dan ketergantungan antar satu pihak dengan pihak lainnya.

Hampir semua usaha industri krupuk ikan di Desa Kedung Rejo masih dikelola secara tradisional (kekeluargaan) dan hal ini berpengaruh pada hubungan kerja. Tenaga kerja yang terlibat dalam hubungan kerja adalah keluarga atau tetangga (sistim kekerabatan) sehingga antara satu sama lain saling kenal (tetangga atau teman). Hubungan sosial dan kekerabatan antara pekerja dengan pengusaha menjadi pengikat antara pekerja dan pengusaha. Hubungan kerja pada usaha-usaha ekonomi informal pada umumnya terjadi atas dasar persaudaraan atau hubungan pribadi dan hubungan sosial serta bukan atas dasar persetujuan kontrak kerja dengan jaminan formal, seperti contohnya para pekerja/buruh yang bekerja di sektor pertanian (Asiati, dkk, 2010).

Dalam hubungan yang tidak memiliki kesepakatan tertulis biasanya tidak ada aturan yang mengikat tenaga kerja untuk bekerja. Hal ini dapat berpengaruh pada kelangsungan hubungan kerja karena sewaktu-waktu baik pekerja maupun pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Pekerja dapat memutuskan pekerjaan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik usaha pengolahan buah, begitu juga sebaliknya pengusaha dapat memutuskan pekerjaan secara sepihak. Tenaga kerja memiliki pertimbangan tertentu untuk dapat bertahan bekerja, selain upah. Kesempatan kerja sangat terbatas terutama untuk mereka yang sudah berusia relatif tua dan minim keahlian seperti para perempuan dan ibu-ibu yang bekerja untuk membantu suami dalam mencukupi kebutuhan keluarga. Mereka tidak mungkin lagi mencari pekerjaan lain karena masalah umur dan keahlian yang terbatas. Disamping itu, hubungan kerja yang sudah terjalan sejak lama menyebabkan pekerja memiliki 'hutang budi' atas pengalaman kerja dan keahlian tertentu yang telah diperoleh selama bekerja.

Pemilik usaha atau pengusaha merupakan pengendali kegiatan usaha, termasuk tenaga kerja, memiliki beberapa strategi dalam menjaga kelangsungan pekerjaan dan hubungan kerja. Pada usaha krupuk ikan, beberapa strategi dilakukan yaitu dengan memberi makan pekerja setiap hari sebanyak 1 – 2 kali atau memberi fasilitas hiburan dalam bekerja sehingga pekerja merasa betah dan menikmati pekerjaannya. Demikian juga dengan sikap pemilik usaha terhadap pekerja juga berpengaruh pada kelanggengan tenaga kerja untuk bekerja. Tenaga kerja akan bertahan awet karena pengawasan tidak melekat, pekerja diberi kebebasan untuk melakukan pekerjaan sendiri tanpa diawasi karena mereka dianggap sudah bisa bekerja sendiri. Berbagai pendekatan dan strategi yang dilakukan oleh pemilik usaha membuat keterikatan kerja antara tenaga kerja dengan pemilik usaha cenderung bertahan lama (langgeng). Mobilitas bekerja pekerja relatif rendah.

Pada umumnya mereka tetap bekerja pada tempat yang pertama kali bekerja dan jarang yang berpindah bekerja pada industri lain. Perpindahan pekerjaan biasanya dilakukan karena usaha tempat bekerja berhenti berproduksi.

Sistim pengupahan

Berdasarkan sistim pembayaran upah maka sistim hubungan kerja berbentuk sistim hubungan kerja upah harian. Upah yang diberlakukan berdasarkan sistim harian dan diterima sekali seminggu setiap hari sabtu. Besarnya upah yang diterima tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan, meliputi : 1) produksi (mencampurkan adonan dan mencetak glondongan), 2) pemotongan, 3) penataan atau "noto", dan 4) penjemuran dan pengepakan. Setiap tenaga kerja menerima upah sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan, kecuali pada bagian produksi. Tenaga kerja di bagian produksi mendapat upah dengan sistim borongan kerja per hari. Mereka adalah satu tim yang terdiri dari 4-5 orang pekerja yang melakukan pekerjaan mulai mencampurkan sampai membuat adonan glondongan. Besar upah yang diterima tergantung pada berapa banyak krupuk yang dapat diolah dalam sehari.

Besarnya tingkat upah ditentukan oleh beban pekerjaan pada masing-masing jenis pekerjaan yang dilakukan. Berikut adalah besar upah dan pekerjaan yang dilakukan pada masing-masing jenis pekerjaan yang dilakukan pada pengolahan krupuk ikan di Desa Kedung Rejo Sidoarjo.

1. Bagian Pegolahan/produksi krupuk

Sistim penggajian pada bagian produksi berdasarkan borongan sehingga besar-kecil upah yang diterima masing-masing pekerja

tergantung pada banyaknya jumlah tenaga kerja dalam satu tim, biasanya 3-4 orang dengan rata-rata upah sebesar Rp. 35.000 - Rp. 50.000 per hari. Selain mendapat upah, pekerja juga diberi makan 2x sehari.

Pekerjaan di bagian produksi merupakan proses pembuatan krupuk yang paling berat karena terdiri dari beberapa kegiatan yaitu: 1) Mencampurkan dan mengaduk bahan (ikan, tepung, bumbu dan sombu), 2) Adonan diulet dan dicetak menjadi glondongan, 3) Glondongan direbus selama 4 jam dan terakhir 4) Adonan dicuci dan dinginkan. Pekerjaan pada bagian produksi selesai setelah adonan yang didinginkan dibawa ke bagian pemotongan untuk dipotong. Pekerjaan yang dilakukan cukup berat sehingga membutuhkan tenaga yang cukup kuat untuk mengangkat dan mengaduk adonan dan bekerja ditengah udara yang panas dari alat pembakaran (tungku). Berdasarkan pengamatan, pekerja yang bekerja di bagian produksi bekerja dengan keringat yang bercucuran dan bukan tidak unguin juga ada tetesan keringat yang bercampur dengan adonan krupuk mengingit sebagian mereka bekerja tidak menggunakan kain penyerap keringat di kepala.

Selain pekerjaan yang cukup berat, tenaga kerja produksi bertanggung jawab pada kualitas krupuk yang dihasilkan. Percampuran bumbu dan bahan serta adonan bahan tersebut sangat menentukan rasa krupuk ikan yang dihasilkan. Kualitas krupuk ikan juga ditentukan oleh "sombu" yaitu percampuran beberapa zat warna yang menghasilkan warna tertentu. Sombu dibuat oleh pemilik usaha dan merupakan rahasia pemilik usaha krupuk. Sombu yang dihasilkan diperoleh dari beberapa kali eksperimen percampuran warna yang dilakukan oleh pemilik usaha sehingga menghasilkan suatu "sombu" yang cocok. Krupuk ikan yang dihasilkan oleh beberapa industri di Desa Kedung Rejo memiliki ciri khas masing-masing sesuai dengan warna krupuk

ikan yang dihasilkan oleh "sombu". Menurut informasi, krupuk yang bagus adalah pada saat di goreng warna krupuk tidak berubah dan hal tersebut ditentukan oleh sombu. Kualitas krupuk pertama kali dilihat dari warna krupuk dan setelah itu baru dari rasanya.

Tenaga kerja pada bagian produksi merupakan satu tim dan ada pembagian pekerjaan. Masing-masing kegiatan dilakukan oleh orang yang berbeda sehingga ada beberapa orang tenaga kerja yang bekerja di bagian produksi dan mereka merupakan satu kelompok pekerja yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. Biasanya pekerjaan mencetak adonan dilakukan oleh perempuan dan laki-laki dan pekerjaan mengukus termasuk mengangkat dilakukan oleh laki-laki.

2. Bagian pemotongan

Sistim pengupahan pada bagian pemotongan adalah sistim harian yaitu sebesar Rp. 30.000 per hari. Tenaga kerja bagian pemotongan adalah tahap kedua kegiatan produksi krupuk ikan yaitu memotong adonan glondongan yang dihasilkan oleh bagian produksi. Krupuk glondongan dipotong menggunakan mesin pemotong. Penggunaan mesin pemotong mulai digunakan sejak tahun 2002, sebelumnya pemotongan dilakukan secara manual. Pekerjaan memotong memerlukan keahlian dan ketelitian karena berpengaruh pada ketebalan hasil potongan krupuk disamping resiko yang besar yaitu tangan bisa terpotong oleh mesin pemotong. Biasanya tenaga pemotong dilakukan oleh satu tenaga kerja yaitu laki-laki dan tidak semua orang bisa menjadi tenaga pemotong. Keahlian menggunakan mesin pemotong biasanya diajarkan oleh pemilik usaha sebelum bisa menggunakannya, seperti yang dialami oleh Bp K. Keahlian menggunakan mesin potong diajarkan oleh pemilik usaha sehingga mahir dalam memotong. Adanya transfer keahlian ini menjadi suatu

kesepakatan tidak tertulis untuk tidak beralih kerja pada pengusaha lain. Seperti yang diungkapkan oleh narasumber:

“Tenaga kerja potong yang digunakan oleh Pak Agus (pemilik) awalnya adalah TK yang belum punya pengalaman memotong, lalu diajarkan memotong selama 1 bulan oleh Bp A. Tidak semua orang bisa memotong, tenaga kerja memotong yang siap pakai jarang, diajari dulu. Antara TK potong (Bp K) dg pemilik (Bp. A) ada kesepakatan tidak tertulis untuk tidak lari pada pengusaha lain karena sudah diajarkan memotong, kalau ingkar akan dituntut (becanda). Motong manual (1987-2001), th 2002 pakai mesin”

3. Bagian Penataan ”Noto” Krupuk

Kegiatan selanjutnya adalah penataan krupuk yang telah dipotong atau ”noto” diatas sarangan atau tempat yang terbuat dari bambu. Pekerjaan ”noto” dilakukan oleh tenaga kerja yang jumlahnya lebih banyak, biasanya adalah para ibu-ibu. Sistim pengupahan adalah harian dengan besar upah Rp. 10.000 per hari dengan jam kerja 6 jam per hari dari jam 6 pagi sampai 12 siang ditambah satu kali makan. Kegiatan ”noto” lebih ringan dibandingkan pekerjaan lainnya karena bekerja sambil duduk. Hal ini berpengaruh pada upah yang diterima lebih kecil dibanding upah pada bagian lainnya.

4. Bagian Penjemuran

Kegiatan terakhir adalah penjemuran krupuk yang telah ditata diatas sarangan. Pekerjaan ini dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan tenaga yang kuat untuk mengangkat krupuk diatas sarangan ke tempat penjemuran. Penjemuran dilakukan dari pagi sampai sore dan setelah

kering, krupuk diangkat dan dimasukkan ke dalam plastik. Jam kerja tenaga penjemuran lebih panjang mulai dari jam 6.30 pagi sampai jam 4 sore dengan upah sebesar 25.000,- per hari.

Tabel 4.1
Sistim Upah dan Penggunaan Tenaga Kerja Menurut Jenis Pekerjaan
pada Usaha Industri Krupuk di Desa Kedung Rejo,
Kecamatan Jabon, Sidoarjo

No	Jenis Pekerjaan	Waktu	Upah	TK
1	Produksi	Jam 6 – jam 2 siang	Rp. 35.000 Makan 2x	Laki/Perempuan (4 orang)
2	Potong	Jam 6 - 12	Rp. 30.000 Makan 1x	Laki-laki
3	Menata kerupuk atau 'Noto'	Jam 6-12	Rp. 10.000 Makan 1 x (jam 8)	Perempuan
4	Jemur	Jam 6.30 – 4.00	Rp. 25.000 Makan 2 x	Laki-laki (4 orang)

Sumber: Hasil FGD dan Wawancara dengan Pemilik dan Pekerja Krupuk di Desa Kedung Rejo.

4.3.2. Pemberdayaan Tenaga Kerja

Dalam hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja seharusnya dapat memberdayakan tenaga kerja. Sumodiningrat (2007) dalam bukunya “Pemberdayaan Sosial” menyatakan bahwa pemberdayaan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan atau kemandirian masyarakat. Dalam kerangka pembangunan nasional, upaya pemberdayaan masyarakat meliputi: 1) menciptakan suasana/iklim yang memungkinkan masyarakat berkembang; 2) meningkatkan kemampuan masyarakat dalam membangun melalui berbagai

bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana (fisik dan sosial) serta kelembagaan; 3) melindungi/memihak yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidakimbang dan menciptakan kemitraan saling menguntungkan. Menurutnya pemberdayaan sebagai suatu strategi yang tepat dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep pemberdayaan Longwe, melihat bagaimana pemberdayaan perempuan dan makna kesetaraan, serta bagaimana intervensi akan mendukung pemberdayaan perempuan. Konsep pemberdayaan Longwe menekankan pada 5 aspek yang merupakan '*level of equity and empowerment*' yaitu: *welfare* (kesejahteraan), *access* (akses), *conscientisation* (penyadaran), *participation* (partisipasi), dan *Control*. Kelima aspek ini diyakini merupakan tahapan atau proses menuju kesetaraan antarkelompok masyarakat dalam mencapai kesejahteraan. Salah satu dampak positif dari pemberdayaan adalah meningkatnya output dan kinerja (*the increased output and job performance*). Masyarakat mampu mengambil tanggung jawab terhadap pekerjaan mereka, mengaturnya agar sesuai dengan kebutuhan individu dan kemudahan melaksanakannya tanpa campur tangan orang lain yang berimbas pada semakin besarnya efektivitas. Atas dorongan peningkatan kualitas, pemberdayaan telah memberikan kontribusinya (http://www.depsos.go.id/unduh/A_Priyatna.pdf).

Pada bagian ini akan melihat pemberdayaan tenaga kerja terkait dengan hubungan kerja antara pengusaha dan pekerja. Secara umum, pembahasan pada bagian ini menggunakan konsep pemberdayaan Longwe, namun pembahasan tidak menganalisis masing-masing aspek secara detil, namun akan diketahui pemberdayaan apa saja yang diterima pekerja dalam hubungan kerja dengan pemilik usaha.

Kesejahteraan (*welfare*) merupakan tahap awal pemberdayaan dari Longwe. Apakah ada kesetaraan akses terhadap sumberdaya seperti pendapatan tenaga kerja dan sumberdaya lainnya, apakah terdapat perbedaan antara tenaga kerja laki-laki dan perempuan. Tingkat upah adalah salah satu indikator dalam melihat tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Semakin besar tingkat upah maka dapat dikatakan tingkat kesejahteraan tenaga kerja semakin baik.

Tingkat upah tenaga kerja pada industri krupuk bervariasi tergantung pada jenis pekerjaan yang dilakukan, yaitu bagian produksi, potong, noto dan penjemuran. Upah tertinggi diperoleh oleh tenaga pada bagian produksi atau tenaga masak, yaitu antara Rp. 35.000-50.000 per hari tergantung pada banyaknya jumlah pekerja dalam satu tim. Upah paling rendah diterima oleh tenaga kerja “noto” yaitu sebesar Rp. 10.000 per hari. Sedang tenaga kerja potong sekitar Rp. 35.000 – Rp. 40.000 dan tenaga jemur sebesar Rp. 25.000. Besarnya upah yang diberikan disesuaikan dengan beban pekerjaan pada masing-masing tahap pekerjaan yang dilakukan.

Tingkat upah pada industri krupuk relative masih rendah dan berada dibawah upah minim regional (UMR) Kabupaten Sidoarjo tahun 2011 sebesar Rp. 1.107.000,-. Meskipun upah UMR belum dapat diberlakukan pada sektor informal seperti pada industri kecil, namun besaran upah pada industri kecil masih jauh dibandingkan dengan besaran upah UMR. Rendahnya tingkat upah dirasakan oleh tenaga kerja pada industri krupuk. Sebagian tenaga kerja beranggapan bahwa tingkat upah yang diberikan relative masih rendah. Hal ini disebabkan resiko pekerjaan yang cukup besar, seperti tenaga pemotong yang beresiko kena potong tangan. Tidak adanya jaminan kesehatan jika terjadi kecelakaan kerja menyebabkan biaya yang harus dikeluarkan untuk berobat menjadi tanggungan sendiri. Namun mereka pasrah menerima upah yang ada karena kesempatan untuk mendapatkan

pekerjaan ditempat lain sangat terbatas dan menjaga hubungan social dan balas jasa pada pemilik usaha. Seperti diungkapkan oleh salah seorang tenaga potong:

“Upah yang diterima sebesar Rp. 35.000 per hari. Menurutnya, gaji yang diterima terlalu kecil, karena resiko pekerjaan tinggi, yaitu tangan bisa terpotong mesin pemotong. Dari pada tidak ada kerjaan yam au saja. Menurut pak Hamin, pantasnya upah sebesar Rp. 40.000 per hari, namun bapak tidak pernah minta kenaikan gaji karena ‘tidak tahu’ atau tidak ada keberanian hanya pasrah gaji sebesar itu, untuk kebutuhan dibilang cukup ya cukup, dicukup2kan saja. Selain takut dan tidak berani minta kenaikan gaji, juga bisa disebabkan karena majikan sudah berjasa mempekerjakan bapak dan kalau minta kenaikan gaji takut diberhentikan”.

“Apakah upah sudah cukup dibandingkan beban pekerjaannya? Tidak pantas (karena pekerjaannya berat) tapi ketimbang nganggur ya tdk masalah. Tidak pantas karena ‘coro’ atau berat tapi timbang nganggur. Kerja di luar sudah tidak mungkin. Disini susah cari kerja apalagi ibu yg sudah tua, dari pada tidak kerja”

Sementara bagi pengusaha, besarnya upah yang berlaku dirasakan sudah cukup dikaitkan dengan hasil pendapatan yang diperoleh dan kenaikan harga bahan baku. Disamping biaya upah, pengusaha juga telah mengeluarkan biaya untuk makan tenaga kerja selama bekerja. Pemberian makan untuk pekerja telah mengurangi biaya makan yang harus dikeluarkan oleh tenaga kerja. Pengusaha krupuk juga memberi insentif bagi tenaga kerja yang dinilai melakukan pekerjaan ekstra, seperti tenaga jemur. Khusus tenaga kerja pada bagian penjemuran diberikan bonus Rp. 25.000 per minggu karena kadang mereka harus menjemur krupuk yang sudah menumpuk pada hari sebelumnya

karena tidak ada cahaya matahari. Namun akses tenaga kerja untuk mendapatkan kesempatan yang lebih baik cukup diakomodir oleh pemilik usaha. Mereka yang mempunyai kemampuan dan pekerjaan bagus dan mempunyai komitmen yang tinggi diberi kesempatan untuk dapat pindah ke bagian yang lebih baik seperti ke bagian produksi. Kasus pada salah satu industri krupuk, salah seorang tenaga penjemuran diangkat ke bagian produksi karena pekerjaannya bagus, konsisten dan memiliki komitmen.

Selain menerima upah, tenaga kerja juga mendapat makan di tempat kerja. Pemberian makan untuk pekerja dilakukan oleh pemilik usaha dengan pertimbangan efisiensi waktu pekerja dalam bekerja (*opportunity cost*). Meskipun jarak antara tempat bekerja dengan rumah dekat namun jika tidak disediakan makan maka pekerja akan membuang sebagian waktu untuk makan pulang kerumah. Seperti dikemukakan oleh salah seorang pemilik usaha krupuk adalah buktinya

“Tenaga kerja dikasih makan dengan alasan efisiensi waktu. Kalau makan diganti dengan uang tidak menguntungkan bagi usaha saya karena kalau pekerja pulang makan banyak waktu yang terbuang karena ada yg rumahnya jauh dan ada yg dekat”

Dengan menyediakan makan, maka waktu pekerja yang digunakan untuk makan ke rumah dapat digunakan untuk bekerja dan dapat meningkatkan produksi. Sementara bagi tenaga kerja sendiri, dengan mendapat makan ditempat kerja dapat menghemat biaya untuk makan atau tenaga yang dikeluarkan untuk membuat makanan. Disamping itu, mereka tidak direpotkan mengingat mereka berangkat ke tempat kerja pagi hari.

Selanjutnya dari segi akses, kemudahan yang sama bagi tenaga kerja untuk mendapatkan kredit, pelatihan dan semua pelayanan umum dan pemanfaatan fasilitas lainnya mencerminkan adanya kesamaan akses dalam pemberdayaan. Kesamaan akses pemberdayaan yang diterima oleh tenaga kerja pada industri krupuk masih terbatas. Kesempatan yang diperoleh tenaga kerja untuk mendapat pelatihan dari pemerintah atau pihak lainnya masih minim dan hampir tidak ada. Pembinaan dan pelatihan dari pemerintah biasanya diberikan pada pengusaha atau pemilik usaha. Keterampilan dan keahlian dalam melakukan pekerjaan biasanya diperoleh sambil bekerja pada saat awal (*learning by doing*). Pada jenis pekerjaan tertentu, seperti penggunaan mesin pemotong keahlian diberikan langsung oleh pengusaha.

Pemberdayaan juga memerlukan kesadaran akan pengertian perbedaan sex dan jender, kesetaraan dalam pembagian pekerjaan dan tidak adanya dominasi satu pihak ke pihak lain sehingga memungkinkan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam proses pembangunan. Dalam hal pemberian upah, tidak ada perbedaan upah antara laki-laki dan perempuan untuk pekerjaan yang sama. Namun ada jenis-jenis pekerjaan tertentu yang lebih banyak dilakukan oleh laki-laki dan ada pekerjaan yang hanya dilakukan oleh perempuan tergantung pada beban pekerjaan. Pekerjaan memotong, produksi dan jemur kebanyakan dilakukan oleh laki-laki karena membutuhkan tenaga yang lebih kuat, sementara pekerjaan yang lebih ringan dilakukan oleh perempuan seperti kegiatan “noto”.

4.4. Kemitraan dan Kelangsungan Usaha

Sejatinya pelaksanaan otonomi daerah dapat mempercepat iklim penguatan perekonomian daerah menjadi lebih maju, demokratis, dan adil. Dalam hal ini seluruh pemangku kepentingan daerah, baik itu pemerintah, pihak swasta, dan kelompok masyarakat diharapkan dapat

secara aktif terlibat dalam menumbuhkembangkan setiap kesempatan dan potensi ekonomi yang dimiliki. Keterlibatan tersebut tidak hanya pada aspek pelaksanaan, tetapi dimulai dari penyusunan rencana pembangunan daerah hingga pengembangan usaha ekonomi yang lebih menguntungkan. Hal tersebut karena salah satu esensi dari pelaksanaan otonomi daerah adalah pengembangan ekonomi lokal yang diupayakan secara bersama antara pemerintah daerah, swasta dan kelompok masyarakat. Artinya pengembangan kemitraan antartetiga pihak tersebut merupakan faktor penting yang dapat merangsang pertumbuhan kegiatan ekonomi daerah, kelangsungan usaha, dan penciptaan kesempatan kerja.

Pembelajaran dari daerah lain di Indonesia menunjukkan bahwa keberhasilan pengembangan UMKM sangat terkait erat dengan adanya campur tangan pihak lain yang terlibat dalam skema kemitraan usaha. Hal ini karena umumnya UMKM di Indonesia dihadapkan pada keterbatasan modal usaha, ketergantungan pasokan bahan baku, lemah dalam penguasaan pasar, serta manajemen usaha yang masih bersifat kekeluargaan (Yasman, 2008). Salah satu kesimpulan dari hasil Studi USAID dan Kemendagri tahun 2009 terkait *best practice* dalam pengembangan UMKM di 10 daerah di Indonesia menyatakan bahwa pengembangan usaha UMKM melalui skema kemitraan ternyata terbukti dapat memutus berbagai hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM. Bahkan melalui skema kemitraan dapat menciptakan kemandirian pelaku UMKM, meningkatkan produksi, dan memperluas jangkauan pemasaran UMKM.¹ Pada kegiatan usaha tertentu, seperti pada industri jasa perdagangan, skema kemitraan dengan UMKM ternyata dapat meningkatkan efisiensi usaha karena

¹ Lihat hasil kajian USAID dan Kemendagri tentang *Best Practice* Pemberdayaan UMKM di 10 daerah di Indonesia

adanya prinsip *symbiosis mutualisme* dalam penyediaan dan pemasaran produk (Bangun, 2009).

Sejak terpuruk akibat bencana luapan lumpur Lapindo pada tahun 2006, pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo bersama dunia usaha dan masyarakat setempat berupaya membangun kembali usaha industri kecil di daerah ini. Berbagai upaya terus dilakukan diantaranya melalui pengembangan kemitraan antara pemerintah daerah, industri besar dan pelaku industri kecil. Namun demikian pelaksanaan kemitraan masih tertumpu pada program pemerintah yang diturunkan melalui kegiatan dinas terkait. Sementara kemitraan yang berasal dari inisiatif pihak swasta (perusahaan besar) melalui kegiatan CSR jumlahnya masih relatif sedikit.

4.4.1. Pola Kemitraan Berbasis Kekuatan Hubungan Kekeluargaan

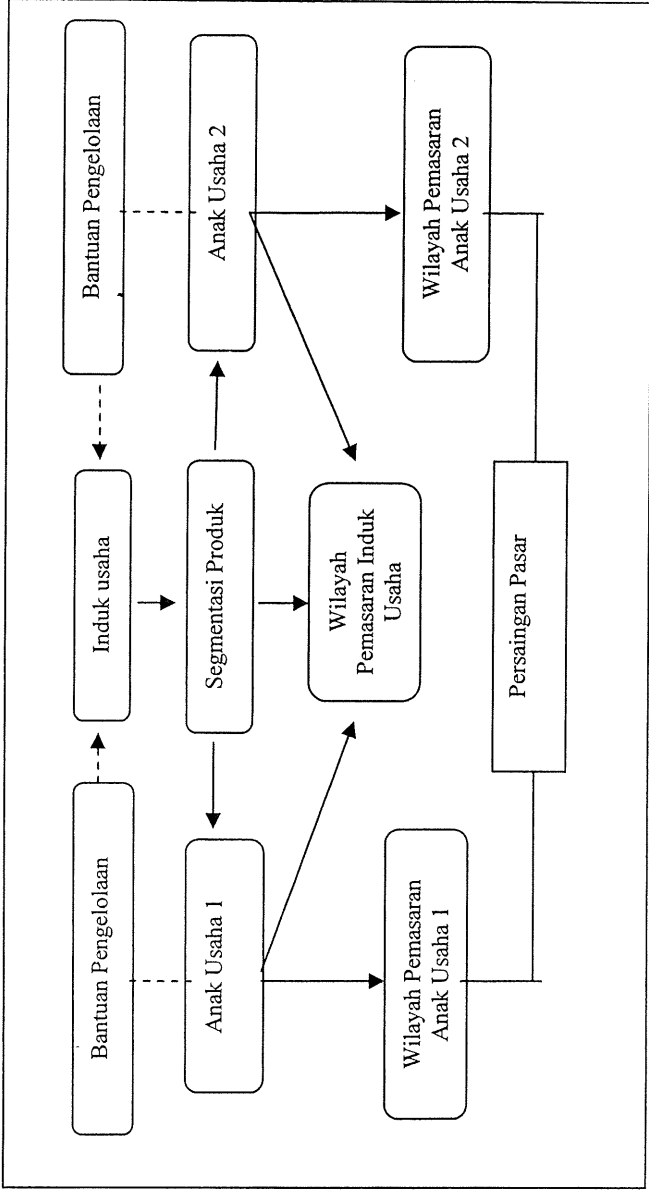
Kemitraan usaha industri kecil kerupuk di Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo tampaknya belum banyak berkembang. Walaupun telah berlangsung selama tiga dekade lebih, namun pengelolaan usaha yang dilakukan tidak banyak mengalami perubahan. Kemitraan usaha yang masih berkembang umumnya terkait dengan kegiatan produksi dan permodalan yang berasal dari keterikan hubungan kekeluargaan. Hal tersebut karena hampir sebagian besar pelaku usaha industri kerupuk di daerah ini merupakan usaha warisan keluarga. Salah satu contoh adalah UD. Sueb Jaya, UD Subur dan UD Putra Sueb yang berasal dari usaha satu keluarga. Ketiga usaha kerupuk tersebut terbilang besar dan relatif sukses di Kedung Rejo.

Diagram 4.1 berikut ini memberikan ilustrasi skema kemitraan produksi dan permodalan industri kerupuk di Desa Kedung Rejo

Kecamatan Jambon Kabupaten Sidoarjo. Induk usaha yang lebih dahulu melakukan pengembangan usaha kerupuk, biasanya akan menjadi mitra awal bagi anak usaha yang baru berkembang. Hubungan kemitraan yang terbangun bersifat kekeluargaan karena merupakan usaha warisan atau pemberian orang tua kepada anak sebagai penerus usaha keluarga. Dalam tahap kemitraan awal tersebut, biasanya induk usaha yang telah sukses akan membagi segmentasi produk yang dihasilkan kepada anak usaha yang menjadi mitra usahanya. Kecenderungannya induk usaha akan mengembangkan jenis produk unggulan (kualitas 1) sementara anak usaha mengelola kualitas segmen kualitas produk yang lebih rendah (kualitas 2). Pembagian segemen produk tersebut merupakan salah satu strategi induk usaha dalam memantau keseriusan anak usaha yang dibinanya dalam mengembangkan produk, selain sebagai pembelajaran awal dalam pengembangan usaha yang dijalankan.

Induk usaha juga berperan sebagai tempat pembelajaran anak usaha dalam penguasaan teknik pembuatan kerupuk. Pembelajaran tersebut terutama terkait dengan penguasaan keterampilan meramu komposisi bumbu inti kerupuk. Keterampilan ini biasanya diberikan induk usaha kepada anak usaha sebagai bagian dari rahasia keluarga dalam pengembangan usaha kerupuk yang dilakukan. Bagi mayoritas pelaku usaha industri kerupuk di Kedung Rejo, komposisi bumbu inti merupakan rahasia usaha yang sangat penting sehingga tidak mungkin diberikan kepada pihak lain di luar keluarga. Rahasia bumbu inti dapat menjadi pembeda rasa antar produk yang dihasilkan diantara pelaku usaha industri kerupuk di Kedung Rejo. Bagi pelaku usaha yang tidak memiliki induk usaha, biasanya keterampilan meramu bumbu inti diperoleh melalui upaya coba-coba yang memerlukan waktu lama dan terkadang sering mengalami kegagalan.

Diagram 4.1.
Skema Kemitraan Produksi Industri Kecil Kerupuk
di Kedung Rejo Kecamatan Jambon Kabupaten Sidoarjo



Dalam proses kemitraan antara induk usaha dan anak usaha, sering kali terjadi mobilitas pertukaran penggunaan pekerja yang terlibat dalam proses produksi. Khususnya tenaga khusus penjemur dan pemotong. Kondisi ini biasanya terjadi ketika permintaan akan produk kerupuk tertentu mengalami peningkatan cukup tinggi dibanding ketersediaan jumlah tenaga kerja yang tersedia atau ketika salah satu unit usaha mengalami penghentian produksi sementara akibat pesanan yang berkurang. Penggunaan tenaga kerja tersebut merupakan salah satu strategi usaha agar tenaga kerja yang terlibat tidak mudah pindah ke pelaku usaha lainnya yang terdapat di daerah tersebut.

Bentuk kemitraan selanjutnya adalah kerjasama dalam pemasaran produk akhir. Biasanya induk usaha yang telah menguasai pasar akan memperkenalkan anak usaha kepada distributor pemasaran produk kerupuk yang menjadi mitra usahanya. Pada tahapan awal sering kali anak usaha tetap menggunakan merek produk induk usaha sebagai strategi agar lebih mudah diterima pasar. Persaingan merebut pangsa pasar juga sangat ketat karena terkadang antarpelaku industri kerupuk di Kedung Rejo bersaing tidak sehat untuk mendapatkan pembeli. Misalnya sabotase merek dengan menjual produk kualitas rendah menggunakan merek kualitas tertentu sehingga *image* dari merek tersebut menjadi jatuh atau dengan menerapkan harga jual di tingkat yang rendah untuk merebut pasar.

Dalam perkembangannya, kecenderungan yang terjadi dalam proses kemitraan tersebut adalah meningkatnya produksi dan penguasaan pasar anak usaha dibanding induk usaha. Bahkan seringkali keberlanjutan usaha yang dilakukan oleh induk usaha menjadi sangat tergantung dari bantuan pengelolaan anak usaha. Ketergantungan tersebut misalnya dalam hal bantuan pinjaman modal usaha, persediaan bahan baku, pengelolaan keuangan usaha, hingga pemasaran produk kerupuk. Kondisi tersebut dipengaruhi minimal

dua hal, pertama anak usaha biasanya memiliki keberanian untuk menanggung resiko usaha sehingga cenderung berusaha maksimal dalam memproduksi dan mencari pangsa pasar. Kedua, dalam hal keterampilan manajemen pengelolaan usaha, umumnya anak usaha memiliki inovasi lebih baik dibanding induk usaha karena adanya perbaikan latar belakang pendidikan. Kecenderung yang terjadi biasanya tingkat pendidikan anak usaha lebih tinggi dibanding yang dicapai oleh induk usaha. Hal tersebut diakui oleh pemilik UD Sueb yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Dasar (SD), sementara anak usahanya UD Putra Sueb berpendidikan Perguruan Tinggi (Sarjana/S1).

Menurut keterangan pemilik UD Sueb, salah satu hal yang membedakan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh anak usahanya (UD Putra Sueb) adalah keberanian dalam membina kemitraan dengan pihak perbankan dan manajemen pengelolaan administrasi keuangan yang lebih baik. Diakui bahwa umumnya induk usaha tidak memiliki keberanian jika berhubungan dengan pihak perbankan karena pemahaman yang rendah terkait dengan administrasi bank. Apalagi dirinya pernah menjadi korban penipuan pembayaran menggunakan *check* kosong yang selanjutnya membuat trauma jika harus berhubungan langsung dengan perbankan. Oleh karena itu, untuk urusan transfer pembayaran penjualan dan pembelian bahan baku induk usaha masih meminjam nomor rekening bank milik anak usaha. Sementara dalam hal pengelolaan keuangan biasanya induk usaha hanya mengandalkan ingatan atau catatan sederhana yang tidak tersimpan secara baik.

Berdasarkan keterangan di atas dapat ditarik benang merah bahwa kemitraan usaha yang dibangun dalam kegiatan usaha industri kerupuk di Desa Kedung Rejo masih tetap bisa bertahan karena adanya kepentingan keberlanjutan usaha keluarga. Kemitraan yang

dibangun tidak hanya dalam kerangka melanjutkan usaha yang telah dirintis oleh pihak keluarga (induk usaha) tetapi merupakan bentuk strategi dalam menjaga kelangsungan usaha melalui rotasi kekuatan usaha kekeluargaan. Artinya keberhasilan pengembangan usaha yang dilakukan sangat tergantung dari kemampuan anak usaha dalam memajukan usaha keluarga tersebut sehingga pada akhirnya dapat menopang seluruh kekuatan usaha yang telah dirintis sebelumnya oleh induk usaha. Semakin besar kemampuan usaha (permodalan, penyediaan bahan baku, dan jaringan pemasaran) dalam satu kemitraan usaha kekeluargaan biasanya akan memiliki pengaruh besar terhadap keberlanjutan usaha yang dikembangkan.

Maka dapat dipahami jika pengembangan usaha industri kerupuk yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki kemitraan berbasis kekuatan keluarga lebih maju dibanding pelaku usaha individu. Walaupun demikian, ketimpangan kemampuan tersebut ternyata telah menciptakan spesialisasi usaha kerupuk yang selama ini dikembangkan di Desa Kedung Rejo. Misalnya jenis produk kerupuk puli dan sodok biasanya dikelola oleh pelaku usaha individu. Penyebabnya karena biaya produksinya yang relatif murah dan adanya kepastian pemasaran melalui pengumpul di tingkat desa. Sementara untuk produk jenis kerupuk udang dan ikan mayoritas dikembangkan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan kemitraan berbasis kekeluargaan. Pengembangan usaha kerupuk udang dan ikan membutuhkan kemampuan modal besar (bahan baku ikan dan tepung tapioka) dan kemampuan merebut pangsa pasar dengan persaingan yang sangat ketat. Kondisi tersebut menyebabkan di Kedung Rejo hanya pelaku yang memiliki kekuatan modal besar dapat mengembangkan usaha kerupuk udang dan ikan. Adanya spesialisasi dan diversifikasi penguasaan pasar berdasarkan produk tersebut ternyata berdampak baik dengan masih bertahannya kegiatan usaha industri kerupuk di Desa Kedung Rejo Kabupaten Sidoarjo. Artinya di satu sisi

persaingan usaha yang ada relatif tidak sehat, tetapi di sisi lain hal tersebut menjadi bagian dari seleksi persaingan usaha sehingga eksistensi industri kerupuk di Desa Kedung Rejo masih bisa terus bertahan hingga saat ini.

4.4.2. Pola Kemitraan Berbasis Program Pemberdayaan Ekonomi

Sebagai salah satu sentra industri kecil di Kabupaten Sidoarjo, kelangsungan usaha industri kerupuk di Desa Kedung Rejo juga tidak terlepas dari dukungan berbagai kelembagaan terutama dari pemerintah daerah setempat. Dukungan tersebut dapat dilihat melalui pelaksanaan program kemitraan kelembagaan berbasis pemberdayaan ekonomi dengan beberapa kegiatan spesifik. Beberapa kegiatan tersebut diantaranya bantuan permodalan, pelatihan keterampilan pengembangan usaha, dan pendidikan standar kesehatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah setempat melalui instansi Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan. Sementara dari kelembagaan swasta diantaranya pemberian teknologi pengeringan kerupuk dan bantuan kredit perbankan.

Namun demikian, efektivitas berbagai kegiatan tersebut sering dipertanyakan bahkan cenderung menimbulkan konflik kepentingan antarpelaku usaha industri kerupuk di Desa Kedung Rejo. Diantara permasalahan yang menyebabkan kurang optimalnya efektifitas kegiatan kemitraan kelembagaan di sentra industri kerupuk Desa Kedung Rejo adalah pelaksanaan di tingkat masyarakat yang cenderung tidak transparan dan terfokus pada kelompok usaha tertentu. Dalam hal ini pelaku usaha industri kerupuk yang relatif besar dan menguasai pasar dan memiliki akses informasi, biasanya menjadi pihak yang diuntungkan karena selalu mendapatkan bantuan permodalan dan pelatihan. Sementara pelaku usaha dengan

kemampuan modal terbatas umumnya tidak memiliki akses terhadap bantuan permodalan ataupun kegiatan lainnya yang bersifat pelaksanaan kegiatan program pembangunan dari pemerintah daerah setempat. Hal ini kemudian sering menimbulkan kecemburuan sosial diantara pelaku industri kerupuk di daerah ini, walaupun tingkat kecemburuan tersebut masih sebatas pada pendapat perseorangan.

Tabel. 4.2
Kemitraan Kelembagaan Menurut Jenis Kegiatan di Industri Kerupuk
Kedung Rejo, Kabupaten Sidoarjo, 2011

No	Kelembagaan	Jenis Kegiatan Kemitraan
1	Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan	Bantuan modal usaha, bantuan peralatan, pelatihan keterampilan usaha, pelatihan standar kesehatan produk, pameran di tingkat kabupaten, promosi produk di luar provinsi, pemagangan, dan lainnya
2	Perguruan tinggi	Bantuan peralatan (oven pengering)
3	Perbankan	Kredit usaha (KUR)
4	Pemerintah pusat	Pelatihan fasilitator lokal dan bantuan modal usaha
5	Industri besar (PT. Finna)	Pasokan produk akhir

Sumber: Wawancara Mendalam

Permasalahan lainnya, kegiatan kemitraan kelembagaan yang dikembangkan masih sebatas pada target pelaksanaan jangka pendek yang tidak memiliki mekanisme pendampingan, ketepatan tujuan, sasaran dan kegunaan, serta keberlanjutan kegiatan. Misalnya, pemberian alat pengering kerupuk (oven) dengan kapasitas terbatas dan tidak sesuai dengan spesifikasinya yang diinginkan. Beberapa pelaku usaha industri kerupuk di Kedung Rejo mengakui telah mendapat bantuan alat pengering kerupuk dari perguruan tinggi setempat melalui kerjasama penelitian. Bantuan alat tersebut ditujukan

sebagai teknologi alternatif pengeringan kerupuk sehingga dapat mengurangi ketergantungan pelaku usaha industri kerupuk di daerah ini terhadap penjemuran sinar matahari. Namun demikian bantuan alat yang diterima tidak dapat bekerja secara maksimal, selain karena kapasitasnya yang sangat kecil, tingkat tingkat pemanasan yang dihasilkan juga tidak sesuai dengan standar kalayakan kualitas panas yang disyaratkan. Akibatnya, bantuan tersebut menjadi sia-sia padahal biaya pembuatan untuk satu unit alat tersebut cukup mahal.

Permasalahan selanjutnya, berbagai program yang dilaksanakan cenderung tidak menjawab berbagai kebutuhan pelaku usaha industri kerupuk di daerah ini. Misalnya kendala kesulitan kesediaan bahan baku (tepung tapioka dan ikan), ketidakpastian akses pemasaran produk, dan kendala akses kelembagaan keuangan selain perbankan. Misalnya, pelaku usaha kerupuk di daerah ini berharap adanya kemudahan akses dalam peminjaman kredit permodalan melalui perbankan. Namun demikian, biasanya proses tersebut terbentur dengan persyaratan administratif pihak perbankan yang cenderung menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memberikan kredit usaha, terutama bagi pelaku usaha industri kerupuk skala kecil. Berbagai permasalahan tersebut menyebabkan pelaksanaan kemitraan yang dibangun melalui konsep pemberdayaan ekonomi di daerah ini belum banyak memperlihatkan hasil positif yang nyata. Bahkan kemitraan dengan perusahaan swasta (PT Fina) yang sempat dirintis oleh seorang pelaku usaha industri kerupuk di daerah ini tidak dapat berjalan lama.

4.4.3. Strategi Pengembangan Kemitraan

Salah satu penyebab tidak optimalnya kemitraan kelembagaan yang dilaksanakan di Desa Kedung Rejo Kecamatan Jabon Kabupaten Sidoarjo adalah belum adanya kelembagaan di tingkat desa yang dapat

berperan sebagai mediator kemitraan kelambagaan. Akibatnya berbagai kegiatan kemitraan berbasis pemberdayaan ekonomi di daerah ini cenderung berjalan kurang terkoordinasi, tidak sesuai target sasaran, dan tidak memiliki keberlanjutan dalam jangka panjang. Hingga saat ini sebagian besar kegiatan pemberdayaan dan kemitraan di sentra industri kerupuk di daerah ini masuk melalui fasilitator lokal yang berperan sebagai penghubung antara kelembagaan di luar desa dengan pelaku usaha industri kerupuk di desa tersebut. Namun demikian, karena fasilitator tersebut juga merupakan salah satu pelaku usaha industri kerupuk di daerah ini, seringkali memainkan peran ganda baik sebagai konsultan maupaun penentu pelaksanaan kegiatan di tingkat pelaku usaha industri kerupuk di Kedung Rejo. Pandangan beberapa masyarakat terhadap kiprah fasilitator tersebut cenderung semakin tidak baik karena manajemen kegiatan yang kurang transparan dan terfokus pada kelompok tertentu.

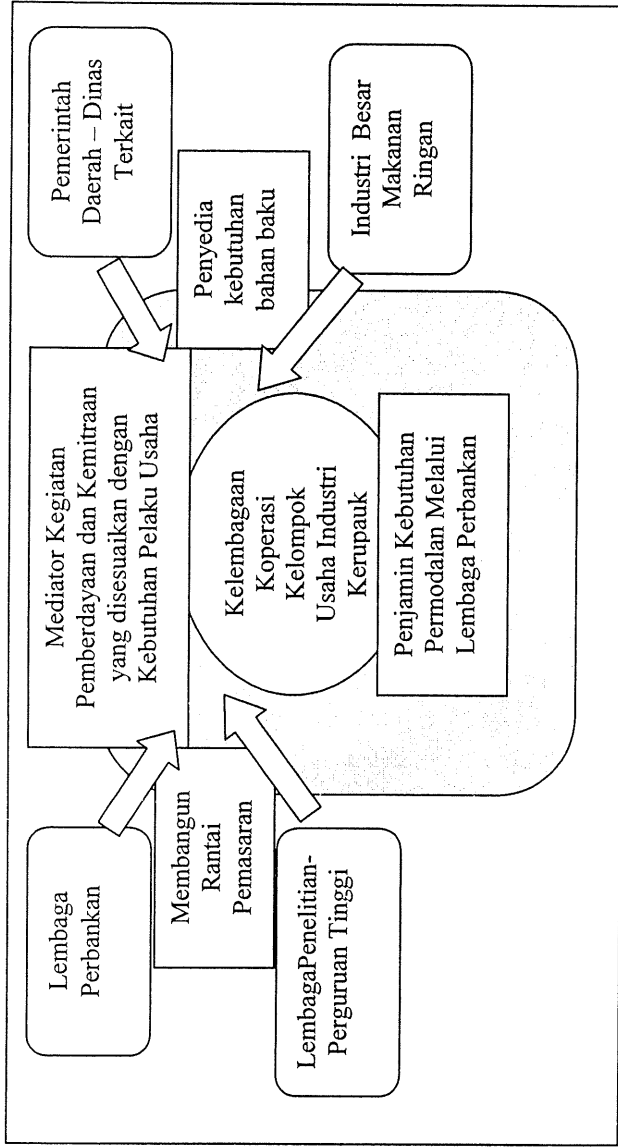
Di sisi lain peran pemerintah daerah belum optimal karena program pemberdayaan ekonomi dan kemitraan yang dikembangkan masih sebatas pada pelaksanaan kegiatan program di tingkat teknis kedinasan yang jangkauan sasaran kegiatannya terbatas pada capaian jangka pendek. Sementara dari kelembagaan swasta (perguruan tinggi) usulan kegiatan biasanya tidak disesuaikan dengan kebutuhan pelaku industri kerupuk di daerah ini sehingga hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan banyak pihak. Walaupun demikian potensi industri kerupuk di Kedung Rejo sebagai salah satu sentra industri kecil di Kabupaten Sidoarjo tetap dapat dikembangkan.

Sebagai sebuah sentra industri, pengembangan usaha industri kerupuk di Kedung Rejo seharusnya didukung oleh optimalisasi kelembagaan di tingkat desa. Hal tersebut sangat penting karena sebagai sebuah sentra industri seharusnya pengelolaan kegiatan usaha di daerah ini berdasarkan peneglolaan berbasis kelompok usaha dan bukan berdiri

sendiri seperti yang saat ini berkembang. Pembelajaran dari beberapa daerah melalaui *best practice* pengelolaan usaha industri kecil (UMKM) hal terpenting yang dapat menjadi pendorong keberhasilan sebuah sentralisasi kawasan industri kecil adalah adanya dukungan pembentukan unit pelayanan yang terpisah dari struktur kelembagaan pemerintah daerah. Misalnya pembentukan kelembagaan koperasi, pembentukan klinik usaha/bisnis, pusat pelayanan industri kecil, forum *stakeholders* peduli industri kecil, dan lainnya. Keberadaan kelembagaa tersebut tentunya dapat berjalan jika didukung melalui kemitraan antara pemerintah daerah, kelompk usaha, dan unsur pendukung seperti perbankan dan perusahaan/industri besar. Pada kasus sentra industri kerupuk di Desa Kedung Rejo, pembentukan kelembagaan di atas diyakini banyak pihak dapat mereduksi persaingan tidak sehat yang selama ini berkembang diantara pelaku industri kerupuk di daerah ini. Selain itu keberadaanya diyakini dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan dan kemitraan yang selama ini kurang terkordinasi dengan baik.

Skema 2.

Skema Strategi Pengembangan Industri Kerupuk di Desa Kedung Rejo dalam Kerangka Menjamin Kelangsungan Usaha Melalui Pembentukan Kelembagaan Koperasi Kelompok Usaha Industri Kerupuk



Salah satu terobosan yang sangat diperlukan oleh pelaku industri kerupuk di Kedung Rejo adalah pembentukan kelembagaan koperasi yang tumbuh dari inisiatif, keaktifan dan kekompakan diantara pelaku usaha industri kerupuk yang terlibat di daerah ini. Peran kelembagaan koperasi memiliki posisi yang sangat strategis karena dapat menjadi *leading* seluruh kegiatan industri kerupuk di daerah ini, mulai dari kegiatan pengelolaan produksi, pemasaran, bantuan permodalan, hingga penghubung kegiatan pemberdayaan dan kemitraan dengan kelembagaan yang ada. Pada kegiatan produksi, kelembagaan koperasi yang dibentuk dapat berperan sebagai penyalur kebutuhan bahan baku, terutama penyediaan bahan tepung tapioka dan ikan. Peran ini diharapkan dapat meminimalisir ketidakstabilan harga bahan baku dan kelangkaan keatersediannya yang sering mengganggu kelancaran kegiatan produksi industri kerupuk di daerah ini. Di samping itu, peran tersebut dapat menghilangkan penguasaan (monopoli) persediaan bahan baku oleh pelaku tertentu sehingga dapat menghilangkan persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan produksi industri kerupuk di daerah ini.

Terkait dengan kegiatan pemasaran, peran koperasi dapat diarahkan pada perluasan jaringan pemasaran dan pengawasan kualitas produk kerupuk. Kelembagaan koperasi juga dapat melakukan pemantauan kualitas kerupuk sehingga segmentasi pemasaran kerupuk dapat dipetakan dengan jelas, terutama untuk mengoptimalkan pemasaran produk kerupuk pada beberapa sentra perdagangan di seputar Kabupaten Sidoarjo yang masih terbuka luas. Di bidang permodalan, kelembagaan koperasi yang dibentuk dapat menjadi sebagai mediotor penjamin antara pelaku industri kerupuk dengan kelembagaan perbankan. Peran ini dapat menghilangkan keterbatasan kemampuan peningkatan permodalan pelaku usaha industri kerupuk di Kedung Rejo yang seringkali terkendala persyaratan administratif ketika berusaha mengajukan pinjaman modal kepada perbankan.

BAB V

HUBUNGAN KERJA DAN KELANGSUNGAN PEKERJAAN DI SEKTOR INDUSTRI PENGOLAHAN BUAH DI KABUPATEN MALANG

5.1. Pengantar

Permasalahan tenaga kerja sampai saat ini adalah tingginya angka pengangguran yang diikuti dengan rendahnya kesempatan kerja baik di perkotaan dan perdesaan. Terjadinya krisis ekonomi di Indonesia dan krisis global, semakin mempersempit ruang gerak tenaga kerja dalam hal perlindungan terhadap resiko kehilangan pekerjaan yang menyebabkan peningkatan pemutusan hubungan kerja (PHK). Salah satu upaya menjawab permasalahan tersebut adalah menerapkan negara sebagai pasar kerja dan hubungan industrial. Hubungan Kerja yang harmonis antara tenaga kerja dan pemberi pekerjaan, kemitraan antara dunia usaha dan pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pekerjaan.

Sektor industri skala kecil merupakan salah satu sektor yang memiliki peran penting dalam perekonomian dan penyerap pasar tenaga kerja terbesar baik di perkotaan maupun di perdesaan. Sektor industri skala kecil berbasis sumber daya pertanian (agro industri) merupakan sektor yang memiliki peranan yang cukup besar dalam roda penggerak perekonomian, khususnya pasca krisis ekonomi. Ketidakbergantungan bahan baku menyebabkan usaha ekonomi skala kecil tetap mampu bertahan dibanding usaha ekonomi yang lebih besar. Lima keunggulan dari pengembangan sektor agroindustri, yaitu (1)

memberi nilai tambah pada pelaku pertanian, (2) Terjadi penyerapan tenaga kerja (3), meningkatkan perolehan devisa (4) mampu mendorong perkembangan industri lain, (5) terjadi struktur ekonomi nasional yang tangguh, mandiri dan stabil karena ditopang oleh sumber daya nasional dan bukan sumber bahan baku impor yang rentan terhadap pengaruh perekonomian global (Baroh, 2010). Dengan demikian, pengembangan dan pemberdayaan usaha kecil tersebut menjadi sangat penting. Peningkatan pengolahan usaha yang tradisional, kualitas SDM dan akses kelembangaan merupakan upaya yang harus dilakukan untuk mampu menerobos menjadi usaha menengah dan besar (Basri,2003).

Kabupaten Malang merupakan salah satu kabupaten Di Provinsi Jawa Timur yang memilik potensi ekonomi yang cukup besar terhadap pengembangan usaha ekonomi kecil dalam pengolahan hasil pertanian. Sektor industri pengolahan merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi perekonomian yang cukup besar dari tahun ke tahun. Dari tahun 2007 sampai dengan 2009, kontribusi sektor industri pengolahan Kabupaten Malang memperlihatkan kecenderungan yang meningkatkan, dengan proporsi pada tahun 2009 mencapai 18,48 persen (BPS Kabupaten Malang, 2010). Dilihat dari sumber daya alam dan bahan baku yang tersedia maka industri agro merupakan industri basis dan dominan di Kabupaten Malang yang mencapai lebih dari 65 persen (Dinas Koperasi dan UMKM, 2009). Dengan besarnya jumlah usaha mikro tersebut, Kabupaten Malang memilik potensi perkembangan agro industri strategis secara terpadu dan berkelanjutan, terkait dengan dengan sektor hulu dan hilir (*backward and forward linkages*), serta pegintergrasi kedua sektor tersebut secara sinergi dan produktif. Konsepsi keberlanjutan dapat dipahamkan sebagai pemanfaatan teknologi konservasi sumber daya dengan kelompok/lembaga masyarakat, pemerintah dan semua aspek (Chourul, 2004).

Kecamatan Poncokusumo merupakan salah satu kawasan pengembangan utama komoditi hortikultura di Kabupaten Malang. Kawasan pengembangan utama adalah kawasan berperan mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan pusat dengan kawasan sekitarnya, serta mewujudkan pemerataan pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi Jawa Timur (Pemerintah Kabupaten Malang, 2007). Tiga ciri pengembangan kawasan utama, yaitu berdasarkan potensi wilayah, aglomerasi pusat-pusat pemukiman perkotaan dan pengembangan kegiatan produksi wilayah. Kecamatan Poncokusumo sebagai salah satu kawasan yang mempertahankan budidaya tanaman hortikultura dan pusat perencanaan agropolitan Kabupaten Malang. Isu kemitraan dan keberlangsungan pekerjaan di sektor industri pengolahan buah menjadi sangat menarik terkait dengan peran komponen masyarakat, pelaku usaha dan pemerintah.

Bertolak dari uraian sebelumnya, secara umum tujuan penulisan bagian ini adalah memfokuskan pada sistem hubungan kerja dan pemberdayaan di industri pengolahan buah terkait dengan keberlangsungan pekerjaannya, dengan studi kasus di Kecamatan Poncokusumo. Industri pengolahan buah adalah usaha industri skala kecil yang terdapat di Kecamatan Poncokusumo dengan komoditi sari apel dan kripik buah. Secara rinci, tujuan khusus penulisan adalah (1) Gambaran umum Kegiatan usaha Agribisnis di Kecamatan Poncokusumo; (2) mengidentifikasi jenis dan karakteristik industri pengolahan skala kecil yang dilihat dari bentuk usaha, hasil produksi, jumlah tenaga kerja dan kualitas tenaga kerja; (3) menganalisis sistem hubungan kerja di Industri pengolahan buah terkait dengan pemberdayaan tenaga kerja; dan (4) mengkaji pemberdayaan dan kelangsungan usaha di industri pengolahan buah.

5.2. Karakteristik Industri Pengolahan Buah di Kecamatan Poncokusumo

Dalam masterplan agropolitan Kabupaten Malang, wilayah Kecamatan Poncokusumo direncanakan sebagai wilayah dengan kegiatan utama untuk pertanian tanaman pangan dan industri rumah tangga (pengolahan hasil pertanian). Rencana pengembangan wilayah disesuaikan dengan zonasi komoditas unggulan yang meliputi: kawasan pertanian tanaman pangan (padi dan jagung); kawasan hortikultura, dan kawasan peternakan. Tanaman hortikultura unggulan di Kecamatan Poncokusumo meliputi tanaman sayuran (bawang merah, bawang prei, dan bunga potong) dan buah-buahan (apel dan belimbing). Beberapa desa di Kecamatan Poncokusumo direncanakan sebagai zonasi kawasan hortikultura untuk tanaman apel yaitu Desa Poncokusumo, Pandansari, Wringinanom, Gubuklakah dan Sumberrejo.

Kegiatan agribisnis untuk mengolah hasil pertanian sudah lama dilakukan di Kabupaten Malang. Pada umumnya kegiatan agribisnis merupakan industri kecil/rumah tangga atau usaha kecil menengah (UKM), dan mayoritas termasuk dalam sektor informal. Pembinaan UKM oleh Pemerintah Daerah dilakukan di bawah koordinasi Dinas Koperasi dan UMKM, Perbankan, Perguruan Tinggi (PT), Nakertrans dan dinas terkait lain (Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan). Permasalahan utama yang dihadapi UKM adalah permodalan, pemasaran, teknologi dan management. Koordinasi antar instansi dan PT diharapkan dapat menyediakan akses permodalan (Dinas Koperasi dan UMKM dan perbankan), narasumber untuk peningkatan SDM dan peningkatan teknologi (PT), pelatihan management (oleh Dinas Tenaga Kerja dan dinas terkait), dan peralatan produksi (dinas terkait). Di Kabupaten Malang beberapa PT

yang terlibat dalam pembinaan UKM adalah Unibra, Unmer, UMM dan UNMM untuk pembinaan aspek pemasaran, advokasi, dan pelatihan jangka pendek. Bahkan Dinas UKM Kabupaten Malang telah memiliki klinik UMKM yang menyediakan pelayanan 8 aspek antara lain : konsultasi bisnis, advokasi, pelatihan, pembiayaan dan pemasaran dengan sasaran pelaku UKM, baik kelompok maupun perseorangan, sentra maupun non sentra. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang juga mempunyai Badan Pemberdayaan Perempuan untuk melayani kebutuhan pelaku bisnis UKM perempuan yang jumlahnya semakin banyak. Untuk membantu pemasaran hasil produksi UKM, beberapa UKM unggulan disertakan dalam pameran-pameran yang diadakan di tingkat provinsi maupun nasional. Sementara di tingkat lokal, UKM unggulan daerah juga disertakan dalam pameran produk/lomba disain yang diadakan untuk memotivasi UKM pada momen tertentu seperti hari jadi kabupaten dan Hari Koperasi.

Untuk pembinaan UKM, Pemerintah Kabupaten Malang juga telah lama (sejak 2005) menjalin kerja sama antar instansi di wilayah Malang Raya (Kabupaten Malang, Kota Malang, Kota Batu) dengan membangun pusat sayur mayur di Karang Ploso dan Bandara di Kota Malang. Berbagai obyek wisata di Kabupaten Malang dan sekitarnya juga membantu penyerapan produk-produk hortikultura dan olahannya, melalui hotel, supermarket, toko-toko/warung makanan Banyak produk dari Kabupaten Malang yang juga dipasarkan di daerah wisata Batu, terutama makanan ringan/snack olahan dari hasil pertanian. Pembinaan diarahkan untuk sentra produksi UKM dari hulu – hilir dan SDM, terutama untuk peningkatan kualitas produk dan permodalan. Kemitraan antara usaha kecil dan menengah kini tidak lagi dibentuk dan dipaksakan, namun diserahkan pada pelaku UKM sesuai dengan kepentingan usaha masing-masing. Kini industri pengolahan makanan tersebar luas di Kabupaten Malang dan beragam

macamnya, yang menonjol antara lain minuman sari apel, kripik dari hasil pertanian dan makanan kecil lainnya. Beberapa sentra industri agribisnis yang dikenal luas adalah usaha tempe kripik di Sanan Malang, sentra makanan kecil di Kecamatan Turen dan sentra sari apel dan kripik apel di Kecamatan Poncokusumo. Sedangkan terkait dengan agrowisata adalah Kecamatan Poncokusumo yang juga menjadi sentra penghasil apel dan belimbing.

Sebelumnya sentra apel di Kabupaten Malang terdapat di Kecamatan/Kota Batu yang setelah pemekaran menjadi Kabupaten Batu. Kini Kecamatan Poncokusumo berpotensi sebagai sentra apel berikutnya di Kabupaten Malang. Sebagai wilayah penghasil apel yang dominan, beberapa kegiatan agribisnis untuk pengolahan apel juga sudah mulai berkembang seperti sari apel, kripik dan dodol, meskipun masih relatif sederhana dan dibuat oleh individu rumah tangga atau kelompok. Selain pengolahan apel, di daerah ini juga terdapat usaha pengolahan hasil pertanian lainnya yaitu pembuatan kripik nangka, kentang, dan kremes, meskipun beberapa bahan dasar diperoleh dari desa lain di sekitarnya (nangka, ketela). Usaha pengolahan sari buah lainnya adalah sari belimbing yang dikelola oleh kelompok petani belimbing di Desa Argosuko. Desa ini direncanakan menjadi zonasi komoditi unggulan belimbing. Namun proses produksi sari belimbing masih relatif baru (tahun 2010), dan merupakan usaha Ketua Gapoktan dan keluarga. Bahan belimbing diperoleh dari perkebunan belimbing yang berkembang di desa ini secara bertahap mencakup lahan seluas 17 Ha dan melibatkan banyak kelompok tani (Gapoktan), sehingga menjadi penghasil belimbing terbesar dan unggulan desa ini. Bahkan perkebunan belimbing di Desa Argosuko direncanakan menjadi cikal bakal argo wisata, dimana pengunjung dapat memetik langsung hasil kebun seperti argo wisata buah apel di Batu. Pemasaran buah belimbing cukup bagus, dan cakupan pemasarannya luas, melalui pesanan langsung yang dikoordinir oleh Gapoktan

setempat. Sementara proses pengolahan buah ini belum intensif dilakukan, baru dalam tahap pelatihan dan uji coba produksi.

Sebagai Kawasan Pengembangan utama komoditi hortikultura dan pusat agropolitan di Kecamatan Poncokusumo pengembangan industri pengolahan buah merupakan alternatif usaha meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian. Bertolak dari Rencana strategi Pembangunan Daerah secara Argopolitan di Kecamatan Poncokusumo dan keinginan masyarakat di Kecamatan Poncokusumo untuk meningkatkan nilai tambah dari produksi pertanian, khususnya apel. Puncak kejayaan buah apel pada tahun 1993 – 1996 yang mengakibatkan produksi apel melimpah ruah sehingga nilai ekonomi buah apel turun merosot sangat tajam. Dalam kurun waktu beberapa tahun, penurunan nilai ekonomi buah segar diikuti dengan kualitas buah apel. Penurunan kualitas produksi terkait dengan kondisi pohon apel yang mulai menua dan peningkatan biaya produksi, khusus pada komponen pupuk dan peptisida. Peningkatan biaya produksi tersebut sangat terkait dengan kondisi krisis ekonomi yang menguncang perekonomian Indonesia di pertengahan tahun 1997. Peningkatan biaya produksi dan penurunan harga ekonomi buah segar memotivasi beberapa petani muda di Kecamatan Poncokusumo untuk menciptakan upaya peningkatan nilai tambah dari sebuah apel. Bersamaan dengan membaiknya produksi apel di tingkat petani, maka terwujudlah beberapa usaha pengolahan apel di Kecamatan Poncokusumo, seperti usaha pengolahan sari buah apel dan kripik apel yang sampai saat ini masih berjalan.

5.2.1. Usaha Pengolahan Kripik Buah

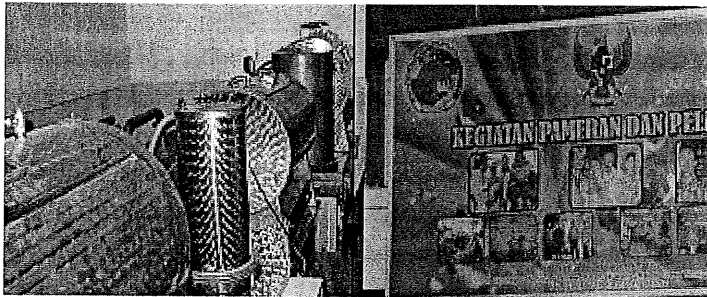
Industri pengolahan kripik buah merupakan satu-satunya industri rumah tangga yang masih berdiri di Kecamatan Poncokusumo. Usaha pengolahan Kripik buah khususnya buah Apel dan Nangka merupakan

usaha perorangan yang berdiri sejak tahun 2004. Tujuan awal dari pendirian usaha pengolahan tersebut adalah untuk meningkatkan nilai tambah apel sebagai komoditi utama petani di Desa Poncokusumo. Pengembangan usaha pengolahan tersebut juga untuk mampu meningkatkan daya tahan produk dari apel sehingga memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi.

Pada awal masa perkembangan usaha pengolahan kripik buah memiliki persaingan pasar produksi yang cukup pesat. Persaingan utama berasal dari usaha pengolahan kripik buah lainnya yang terdapat di Kecamatan Poncokusumo. Perkembangan usaha pengolahan kripik buah tersebut berkembang pesat sejak tahun 2006 dengan semakin menenggelamkan usaha pengolahan kripik lainnya. Perkembangan pesat usaha pengolahan kripik tersebut terkait dengan peningkatan kapasitas produksi dan luasnya jangkauan pemasaran.

Sebagai usaha perorangan seluruh permodalan awal usaha pengolahan kripik buah berasal dari kepemilikan pribadi. Usaha pengolahan kripik buah memperoleh kemudahan dari pihak Laboratorium Universitas Brawijaya untuk melakukan pengujian kelayakan produk. Hasil pengujian tersebut sebagai dasar untuk memperoleh legalitas produk melalui izin berproduksi yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Malang. Dalam waktu tiga bulan kemudian, usaha pengolahan kripik buah telah memiliki izin berproduksi dan resmi menjadi produk perdagangan di pasaran.

Gambar 5.1.
Usaha Pengolahan Kripik Buah di Kecamatan Poncokusumo



Sumber : Dokumen Penelitian, 2011.

Modal merupakan salah satu komponen utama untuk memulai suatu usaha pengolahan kripik buah. Berdasarkan kepemilikannya, modal usaha pengolahan kripik buah berasal dari individu. Dengan besar modal awal mencapai lebih dari 20 juta rupiah, yang meliputi untuk pembelian peralatan sebesar Rp17.000.000 dan modal kerja sebesar Rp5.000.0000. Dengan besarnya modal awal yang dimiliki seorang pengusaha, maka kemudahan akses perkreditasi merupakan salah satu upaya pengembangan usaha. Pada tahun 2011 usaha pengolahan kripik buah memperoleh pinjaman lunak dari Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, sebesar Rp20.000.000 dengan bunga per tahun 6 persen. Kemudahan modal tersebut bermanfaat dalam pengembangan modal kerja dan upaya pengembangan jangkauan pemasaran dan peningkatan produktivitas. Kemudahan akses permodalan menjadi faktor yang mempengaruhi perkembangan dan keberlangsungan usaha pengolahan kripik buah.

Kontinuitas bahan baku merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi keberlangsungan usaha pengolahan kripik buah. Sebagai wilayah sentral produksi apel, ketersediaan bahan baku apel bagi usaha pengolahan bukan menjadi kendala dalam proses produksi.

Produksi apel segar yang terus ada sepanjang tahun merupakan faktor positif yang mempengaruhi keberlangsungan usaha pengolahan kripik buah. Akantetapi, bahan baku buah yang sifatnya musiman seperti nangka teratasi dengan manajemen stok produk pada masa panen sehingga produk kripik nangka tetap terus ada dipasarkan sepanjang tahun sesuai dengan permintaan.

Kapasitas produksi merupakan salah satu komponen penting yang mencirikan sebuah usaha pengolahan kripik buah. Dari tahun ke tahun kapasitas pengolahan produksi terus mengalami peningkatan dari hanya satu alat pengorengan dengan kapasitas 7 kg apel menjadi 3 alat pengorengan. Perkembangan kapasitas produksi sejalan dengan jumlah bahan baku, berawal dari hasil kebun pribadi berkembang (\pm 12 kg) menjadi 50 kg apel segar setiap harinya. Peningkatan kapasitas bahan baku berdampak dari peningkatan hasil produksi kripik apel. Peningkatan produksi tersebut juga tercermin dari jumlah kapasitas produk di gudang (stok) yang mencapai 1 kwintal kripik per hari. Besarnya stok produksi merupakan implikasi peningkatan produksi dan luasnya jangkauan pemasaran produk. Saat ini, pemasaran produk kripik buah yang berasal dari Kecamatan Poncokusumo telah mencakup wilayah Malang Raya, dan Surabaya. Jumlah toko dan distributor pemasaran produk telah mencapai 50 buah dengan permulaan pemasaran kurang dari 10 buah toko. Bertambahnya pasar produksi juga mempengaruhi peningkatan kapasitas produksi usaha kripik buah dan keberlangsungan pekerjaan.

Sebagai usaha rumah tangga, tenaga kerja yang terlibat dalam usaha pengolahan kripik buah mengalami keterbatasan. Dalam masa pengembangan awal, jumlah tenaga kerja yang terlibat adalah dua orang. Peningkatan omset produksi telah mencapai 100 juta per bulan, sejalan dengan peningkatan kebutuhan tenaga kerja produksi menjadi 5 orang. Dua diantara tenaga kerja tersebut merupakan perempuan

yang bertugas membersihkan, memotong dan memasak bahan baku. Tenaga kerja laki-laki bertanggung jawab dalam proses pemackingan dan pengiriman.

Tingkat pendidikan bukan merupakan faktor yang mempengaruhi kualitas tenaga kerja di usaha pengolahan. Ketrampilan dan tekunan merupakan modal utama yang mempengaruhi keberlangsungan pekerjaan. Pengusaha bertanggung jawab memberikan bimbingan dan pelatihan tenaga kerja sesuai dengan standar produksinya. Pengawasan bersifat langsung antara pengusaha dan tenaga kerja menjadi faktor yang mempengaruhi jalannya proses produksi. Kualitas tenaga kerja merupakan komponen melekat dalam diri, namun dalam pengembangan melalui bimbingan dan pelatihan menjadi dasar peningkatan ketrampilan, keberlangsungan pekerjaan dan kesejahteraannya.

5.2.2. Usaha Pengolahan Sari Apel LM

Usaha pengolahan Sari Apel LM merupakan salah satu usaha pengolahan buah lainnya yang terdapat di Kecamatan Poncokusumo. Secara umum, kepemilikan usaha pengolahan sari apel di Kecamatan Poncokusumo merupakan milik sekelompok masyarakat. Sekelompok masyarakat yang terwadah dalam unit Koperasi di Kecamatan Poncokusumo. Usaha pengolahan sari apel LM merupakan salah satu unit pengelolaan buah Koperasi LM di kecamatan Poncokusuma. Usaha pengolahan sari apel LM berdiri sejak tahun januari 2010 dengan bantuan modal peralatan pengolahan buah yang berasal dari Anggaran Pembangunan Daerah Tingkat II melalui Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kabupaten Malang. Pihak Koperasi LM mengajukan proporsal pengadaan perlengkapan pengolahan buah dengan pertimbangan Kecamatan Poncokusumo sebagai salah satu sentral hortkultura. Dengan bantuan hibah murni

tersebut, Koperasi LM telah memiliki alat pengolahan buah yang lengkap, yang dapat memproduksi sari apel, kripik apel, jenang apel, wine, cuka dan konsentrat. Pada tahapan pengembangan awal, unit pengolahan buah mengutamakan memproduksi sari apel sebagai produk utamanya.

Gambar 5.2.
Usaha Pengolahan Sari Apel LM



Sumber : Dokumen Penelitian, 2011

Dalam perkembangan usaha pengolahan sari apel juga memperoleh pembinaan dari pihak Inkubator Bisnis Universitas Brawijaya (INBIS Unibra) sejak tahap pengenalan, perlengkapan sampai dengan proses produksi. Pendampingan dan pembelajaran proses produksi tersebut dilakukan secara langsung di unit usaha pengolahan sari apel LM. Dengan keterlibatan beberapa Instansi pemerintah, mulai tahap perencanaan sampai dengan produksi sehingga izin produksi merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki suatu usaha pengolahan. Usaha pengolahan sari apel LM telah memiliki merek dagang dan izin resmi memproduksi yang mencantumkan tanggal produksi dan masa kadaluarsa sesuai standar pemasaran di Indonesia.

Sebagai bagian dari unit pengolahan di Koperasi LM, permodalan produksi bukan menjadi kendala dalam proses produksi. Permodalan usaha merupakan milik seluruh anggota koperasi LM. Dasar peningkatan permodalan adalah jangkauan permintaan pemasaran produk. Pada masa awal produksi, usaha pengolahan sari apel LM memproduksi sebesar 15 dus per hari. Dengan luasnya pemasaran produk, kapasitas produksi per hari meningkat menjadi 30 dus sehari pada akhir 2010. Di awal bulan Januari 2011 terjadi peningkatan produksi per hari mencapai 50 dus per hari. Peningkatan produksi usaha pengolahan sari apel LM merupakan implikasi dari peningkatan jangkauan pemasaran dengan jumlah toko dan distributor sejumlah 85 buah dengan sebaran pemasaran mencapai Malang Raya, Surabaya dan Gresik. Luasnya pemasaran produk LM berimplikasi peningkatan kapasitas produksi, permodalan usaha, keberlangsungan pekerjaan dan usaha pengolahan sari apel LM.

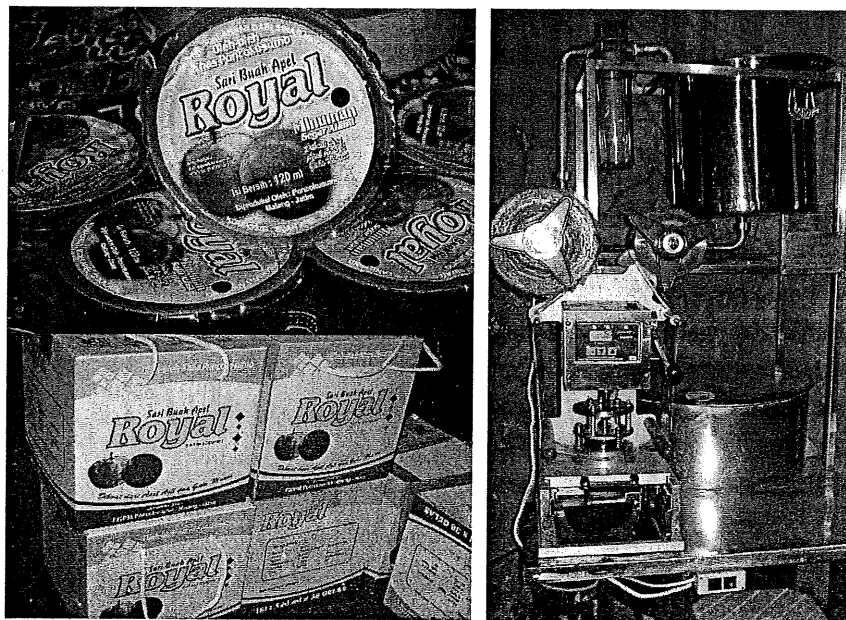
Tenaga kerja yang terlibat di usaha pengolahan sari apel LM merupakan tenaga kerja berstatus karyawan tetap, berjumlah 5 orang dengan diketuai oleh satu kepala unit bagian. Perekrutan karyawan tersebut berdasarkan tugas dan fungsinya sebagai tenaga kerja bekerja di unit pengolahan buah. Tingkat pendidikan tamat SMA ke atas dan berumur maksimal 25 tahun merupakan syarat mutlak kualitas tenaga kerja. Tenaga kerja yang terlibat di unit pengolahan tersebut memperoleh pelatihan dan bimbingan langsung dari INBIS Unibra mulai tahap pembelajaran sampai dengan proses produksi. Dengan status tenaga kerja adalah karyawan tetap sehingga proses produksi tidak menjadi faktor yang mempengaruhi keberlangsungan pekerjaan dan usaha pengolahan tersebut.

5.2.3. Usaha Pengolahan Sari Apel RY

Usaha pengolahan sari apel RY adalah usaha pengolahan lain yang merupakan milik sekelompok petani di Desa Poncokusumo Kecamatan Poncokusumo. Usaha pengolahan sari apel RY terbentuk sejak tahun 2004 dengan tujuan meningkatkan nilai tambah buah apel segar di tingkat petani. Inisiatif pembentukan usaha pengolahan sari apel RY berasal dari beberapa orang petani apel yang berjumlah 30 orang melakukan pembaharuan. Keinginan sekelompok petani sejalan dengan Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur dengan memberikan bantuan hibah berupa peralatan produksi pengolahan sari apel. Dalam perkembangan usaha pengolahan sari apel RY berkembang menjadi usaha sekelompok petani yang dengan misi dan tujuan yang sama.

Seperti usaha pengolahan buah lainnya, dukungan penuh dari pemerintah daerah terwujud dalam bentuk legalitas produk berupa izin produksi dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur dan merk dagang. Pemilikan legalitas produk merupakan wujud dari kepatuhan usaha industri akan aturan perdagangannya dan pengakuan higienitas proses produksi. Legalitas produk syarat mutlak mempengaruhi proses pemasaran produk. Legalitas produk industri pengolahan sari apel adalah salah satu faktor yang mempengaruhi kemudahan jangkauan pemasaran produk tidak hanya Kabupaten Malang, namun juga Surabaya dan luar Jawa Timur.

Gambar 5.3
Usaha Pengolahan Sari Apel RY di Kecamatan Poncokusumo



Sumber : Dokumen Penelitian PPK LIPI, 2011

Dalam perkembangan, usaha pengolahan sari apel RY memperoleh fasilitasi dari Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur melalui Sekolah Lapang pada tahun 2005 yang merupakan salah satu program untuk upaya budidaya apel. Berbekal dari ilmu dari Sekolah Lapang tersebut, usaha pengolahan sari apel RY selama 6 – 7 bulan usaha mulai melakukan produksi dengan kapasitas produksi pertama berjumlah 25 dus. Terbatasnya pemasaran, hanya sebagian produk yang terjual sedangkan sisanya menjadi produk promosi yang disebarakan ke masyarakat. Dalam perkembangan, proses produksi usaha pengolahan sari apel RY berproduksi seminggu dua kali dengan jumlah stok mencapai 50 – 100 dus. Peningkatan kapasitas produksi terjadi apabila peningkatan permintaan pasar, baik yang berasal dari

masyarakat dan Instansi Pemerintah Daerah ataupun masa lebaran. Terbatasnya pemasaran produk berimplikasi dengan frekuensi proses produksi dan keberlangsungan pekerjaan dan usaha pengolahan sari apel RY.

Usaha pengolahan sari apel RY merupakan usaha bersama sekelompok petani, dalam implementasinya usaha tersebut dibantu oleh empat tenaga kerja. Keempat tenaga kerja tersebut merupakan petani apel yang sekaligus terlibat dalam proses produksi. Peran ganda tenaga kerja tersebut sehingga waktu kerja proses produksi pengolahan sari apel RY disesuaikan dengan waktu kerja petani apel. Pada kondisi umum, proses produksi berlangsung sepuluh jam kerja berkebutuhan apel. Permasalahan kontinuitas produksi menjadi sangat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Kemudahan dan kebersamaan keterlibatan dalam proses produksi menyebabkan tingkat pengetahuan dan ketrampilan tenaga kerja adalah sama sebagai dasar pertimbangan pengembangan usaha pengolahan. Kualitas tenaga kerja bukan merupakan faktor utama yang mempengaruhi keberlangsungan pekerjaan dan usaha pengolahan sari apel.

5.2.4. Industri Pengolahan Sari Belimbing

Usaha pengolahan sari Belimbing merupakan salah satu usaha pengolahan sari buah lainnya yang terdapat di Desa Argosuko Kecamatan Poncokusumo. Belimbing merupakan salah satu produk unggulan di desa tersebut, selain salak dan buah naga. Usaha pengolahan sari belimbing merupakan milik sekelompok ibu-ibu PPK Desa Argosuko yang mulai ada pada tahun 2010. Usaha pengolahan sari belimbing berawal dari bantuan dari BPPT dan Universitas Brawijawa dalam bentuk hibah barang berupa perlengkapan kompor, panci, saringan, packing, bahan kimia (asam sitrat) serta pengetahuan

cara pengolahannya. Pelatihan tersebut dilakukan di Pusat Pelatihan dan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Provinsi Jawa Timur yang berlangsung selama 2 – 3 hari yang melibatkan ibu-ibu PKK Desa Argosuko berjumlah 10 orang. Kesepuluh ibu-ibu PKK tersebut sebagai pengerak motor usaha pengolahan sari belimbing di Desa argosuko.

Dalam pengembangan usaha pengolahan sari belimbing terhambat dalam legalitas badan hukum, yaitu izin produksi dan merk dagang. Usaha pengolahan sari belimbing masih berupa eksidental sesuai dengan permintaan dari Kantor Kecamatan dan masyarakat sekitarnya. Ketidak adanya legalitas produk sehingga proses pemasaran secara luas juga mengalami keterbatasan dan hambatan. Hambatan pemasaran juga mengaruhi langsung konitunitas proses produksi.

Embrio usaha pengolahan sari belimbing tersebut merupakan cikal bakal perkembangan kapasitas usaha menjadi lebih besar. Keterbatasan proses pemasaran dan modal kerja yang dimiliki oleh Kelompok PKK Desa Argosuko sehingga pengolahan proses produksi sangat tergantung dengan pemesanan. Singkatnya masa kadaluarsi produk dan minimnya jangkuan pemasaran sehingga kapasitas sekali produksi juga disesuaikan dengan permintaan. Masa permintaan produk umumnya terjadi pada masa hajatan, dan rapat-rapat pertemuan di tingkat kecamatan dan desa. Dengan minimnya kapasitas produksi dan pemasaran produk sehingga keberlangsungan pekerjaan dan usaha masih menjadi tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Peran serta pemerintahan daerah, dan masyarakat yang harmonis akan mampu mewujudkan usaha pengolahan yang berkelanjutan. Keberlanjutan usaha dan pekerjaan memilik multiflayer effect cukup besar bagi tenaga kerja dan masyarakat sekitar.

5.3. Hubungan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

5.3.1. Bentuk Hubungan Kerja di Usaha Pengolahan Buah

Hubungan kerja merupakan suatu hubungan yang ditimbulkan antara pekerja dan pengusaha (pemberi pekerjaan) setelah diadakan perjanjian sebelumnya oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Pekerja menyatakan kesanggupan untuk bekerja pada pengusaha dengan menerima upah dan sebaliknya pengusaha menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan pekerja dengan membayar upah. Dengan demikian hubungan kerja yang terjadi antara pekerja dan pengusaha merupakan bentuk perjanjian kerja yang pada dasarnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Dalam hubungan kerja akan terdapat tiga unsur, yaitu kerja, upah dan perintah. Kerja merupakan keharusan yang menandakan adanya hubungan kerja sehingga adanya pekerjaan tertentu sesuai dengan perjanjian. Upah merupakan unsur pokok yang menandainya hubungan kerja. Pengusaha berkewajiban membayar upah dan pekerja berhak memperoleh upah atas pekerjaan yang dilakukannya. Perintah merupakan pengusaha memberikan perintah dan pekerja berkewajiban melaksanakan perintah tersebut.

Berdasarkan perjanjian kerja dan sistem pembayaran tenaga kerja di usaha industri pengolahan buah, maka dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu (1) sistem hubungan kerja pengupahan harian, sistem hubungan kerja pengupahan borongan, dan (3) sistem hubungan kerja pengupahan tetap. Ketiga sistem hubungan kerja tersebut memiliki ciri dan deskripsi sendiri sesuai dengan fungsi dan definisinya.

Sistem Hubungan Kerja Pengupahan Harian

Bentuk hubungan kerja yang terjadi di usaha pengolahan kripik buah adalah sistem hubungan kerja pengupahan harian. Tenaga kerja yang terlibat di usaha pengolahan kripik buah adalah tenaga kerja yang direkrut sesuai dengan kebutuhan dan dilatih langsung oleh pengusaha sebagai pemilik usaha tersebut. Jumlah tenaga kerja yang terlibat sangat tergantung dengan kapasitas produksi yang akan dilakukan. Dengan adanya peningkatan produksi berimplikasi dengan peningkatan jam kerja proses produksi. Peningkatan produksi tersebut mempengaruhi komponen pendapatan pekerja per hari. Tenaga kerja yang bekerja di usaha industri pengolahan kripik buah memperoleh upah sebesar Rp.15.000/8 jam kerja dengan mendapatkan tambahan makan pagi dan siang. Peningkatan jam kerja berimplikasi penambahan upah, dengan besar upah lembur sebesar Rp.1.875/jam. Selain itu, pada lebaran tenaga kerja memperoleh tunjangan Hari Raya dengan besarnya tergantung kebijakan pengusaha. Dengan sistem upah harian tersebut, sehingga antara pekerja dan pemberi kerja tidak memiliki ikatan yang secara tegas. Dari sisi keberlangsungan pekerjaan, sistem pengupahan harian tidak sepenuhnya menjamin tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Hubungan kerja tersebut mengakibatkan tenaga kerja dapat memutuskan pekerjaan secara sepihak tanpa adanya pemberitahuan kepada pemilik usaha pengolahan buah.

Sistem Hubungan Kerja pengupahan Borongan

Usaha pengolahan buah di Kecamatan Poncokusumo yang berdasarkan sistem pengupahan borongan adalah usaha pengolahan sari apel RY. Pemilikan usaha pengolahan buah yang dasarnya akan kesepakatan sekelompok petani menjadikan tenaga kerja yang bekerja pada usaha pengolahan ini bukan merupakan pekerjaan utama

melainkan pekerjaan sampingan. Pekerja sampingan yaitu proses pengolahan sari apel RY dilakukan sepulang dari perkebunan apel. Dengan demikian, jumlah jam kerja dan waktu kerja menjadi sangat fleksibel disesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan pasar. Akan tetapi, apabila terjadi peningkatan pasar akibat seperti masa lebaran dan permintaan khusus, maka tenaga kerja yang terlibat dalam proses produksi terpaksa meluangkan waktu kerja untuk proses produksi. Dengan kondisi demikian, maka upah pembayaran yang diterima sangat tergantung dengan kapasitas produksi yang dihitung dari jumlah rebusan. Formula berikut ini adalah jumlah upah yang diterima oleh seorang tenaga kerja yang berkerja dalam proses pengolahan sari apel RY di Kecamatan Poncokusumo :

$$\text{Jumlah upah yang diterima} = \frac{\text{jumlah rebusan apel} \times \text{Rp7.5000}}{\text{Jumlah tenaga kerja}}$$

Bertolak dari formula di atas, maka semakin tinggi permintaan produksi penurunan dari jumlah rebusan apel maka semakin besar jumlah upah yang diterima oleh pekerja. Kesepakatan yang terjadi antara pekerja menjadikan usaha pengolahan sari apel RY memiliki tingkat keberlangsungan usaha yang relatif lebih besar dibanding dengan sistem pengupahan harian. Keterikatan antara pekerja dengan visi dan tujuan yang sama dalam pembentukan usaha pengolahan sari apel RY menjadikan usaha tersebut memiliki peluang besar dalam pengembangannya. Keterbatasnya pemasaran produksi sari apel RY yang masih sangat tergantung dengan permintaan mengakibatkan kontinuitas proses produksi mengalami hambatan. Dengan demikian, permasalahan terbesar dalam hubungan kerja terkait dengan keberlangsungan pekerjaan adalah perluasan pemasaran. Perluasan modal kerja terkait dengan modal kerja dalam pengembangan distribusi pemasaran. Semakin besar modal kerja maka akan semakin besar peluang pengembangan pemasaran.

Sistem Hubungan Kerja pengupahan Tetap

Usaha pengolahan sari apel LM merupakan usaha milik sekelompok masyarakat yang terwadah dalam Koperasi di Kecamatan Poncokusumo. Usaha pengolahan sari apel LM merupakan salah satu unit Koperasi. Dengan demikian, tenaga kerja di bagian unit pengolahan tersebut merupakan pegawai tetap Koperasi. Hubungan kerja antara pekerja dan pemberi kerja dalam perjanjian kerja adalah perjanjian yang jelas dan tertulis. Tenaga kerja memiliki keterikat dan kontrak kerja dengan Koperasi sebagai pelaku bisnis untuk melaksanakan tugas dan fungsinya.

Dalam unit usaha pengolahan sari apel LM terdiri dari lima tenaga kerja yang diketuai oleh satu orang kepala bagian yang bertugas mengontrol, mengatur dan bertanggung jawab proses produksi. Dengan status tenaga kerja adalah pekerja tetap, maka besar upah yang diterima oleh seorang tenaga kerja adalah Rp.600.000, ditambah dengan sesuai dengan tugas dan fungsi pokok tenaga kerja sebesar Rp.250.000 (kepala unit). Dengan demikian, besar kecil produksi pengolahan sari apel tidak mempengaruhi besar pendapatan tenaga kerja.

Upaya peningkatan proses produksi pengolahan sari apel LM, tenaga kerja yang bekerja di bagian pengolahan juga berkewajiban memperlancar jalannya proses pemasaran. Proses pemasaran meliputi pencari konsumen, distributor dan pasar. Tugas dan fungsi pemasaran produk tersebut berpengaruh positif dengan peningkatan permintaan di pasaran dan produksi pengolahan sari apel LM. Dengan luasnya jangkauan pemasaran berimplikasi peningkatan produksi dan keberlangsungan pekerja dan kesejahteraan pekerja.

Tabel 5.1
Usaha Pengolahan Buah di Kecamatan Poncosusumo
Kabupaten Malang, 2011

	Usaha Sari Apel LM	Usaha Sari Apel RY	Usaha Kripik Buah
KARAKTERISTIK			
Kepemilikan	Koperasi	Kelompok Petani Apel	Individu
Sumber Modal			
• Peralatan	Dinas Koperasi UMKM Provinsi Jawa Timur	- Kelompok Petani Apel - Dinas Pertanian Provinsi Jawa Timur	Individu
• Produksi	Koperasi	Kelompok Petani Apel	- Individu, - Pinjaman Lunak Dinas Koperasi UMMK Kabupaten Malang
Badan Hukum	Ada	Ada	Ada
• Merk dagang	Ada	Ada	Ada
• Izin dagang	Ada	Ada	Ada
Produksi	Tetap setiap minggu	2 kali per minggu	Tetap setiap hari
• Kapasitas	50 dus	50 dus	8,33 kg kripik
• Stok gudang	50 dus	50 – 100 dus	1 kwintal
• Daya tahan produk	4 bulan	4 bulan	1 tahun
Tenaga kerja			
• Jumlah TK			

- Laki-laki	5	4	3
- Perempuan	0	0	2
• Tingkat pendidikan	Tamat SMA ke atas	Tamat SMA	Tamat SMA ke atas
• Status TK	Tetap	Tidak tetap	Tidak tetap
HUBUNGAN KERJA			
Bahan baku	Kontinu sepanjang tahun	Kontinu sepanjang tahun	Kontinu sepanjang tahun
Sistem pengupahan	Tetap per bulan	Borongan	harian
• Besar upah per tenaga kerja	Rp. 600.000	Jml rebusan x Rp7.500 Jumlah Tenaga kerja	Rp15.000/8 jam
• Insentif	Tergantung fungsi tugas	-	-
• Lembur	-	-	Rp1.875/jam
• Uang makan	Tidak ada	Tidak ada	dua kali per hari
Pemasaran			
• Segmen	Menengah ke atas	Menengah ke atas	Menengah ke atas
• Jangkauan pasar	Malang, Gresik	Malang, Sidoarjo, Semarang	Malang, Surabaya
• Jumlah toko /distributor tetap	85	Tergantung permintaan	50 toko

Sumber : Wawancara mendalam dengan pengusaha industri pengolahan

Kendala terbesar dalam industri pengolahan buah skala kecil adalah permasalahan pemasaran. Pemasaran hasil produksi merupakan faktor yang utama untuk keberlangsungan usaha. Produksi haruslah sejalan dengan pemasaran. Semakin tinggi permintaan pasar maka semakin besar pula kapasitas produksi. Produksi olahan hasil pertanian, khususnya sari apel dan kripik apel memiliki batasan kadaluarsa yang singkat sehingga memiliki batas penyimpanan produk. Dengan singkat masa kadaluarsa produk sehingga kapasitas produksi akan mengalami peningkatan apabila terjadi permintaan pasar yang cukup besar. Terbatasnya jangkauan pemasaran merupakan salah satu kendala kontinuitas produksi. Dengan sistem hubungan tenaga kerja di Industri Pengolahan buah sangat berorientasi dengan proses produksi pengolahan.

5.3.2. Pemberdayaan Tenaga Kerja

Konsep pemberdayaan yang digunakan pada uraian berikut ini sesuai yang dikemukakan oleh Sara Hlupekile Long Wee, seorang konsultan jender dan pembangunan (March, et.al. 1999). Konsep yang hampir sama dan banyak digunakan dalam Dalam konsep Longwe, pembangunan berarti meningkatkan kemampuan tenaga kerja dalam mengurus kehidupannya sendiri, dan keluar dari perangkap kemiskinan. Framework Longwe menekankan pada lima aspek yang merupakan '*level of equity and empowerment*' yaitu: *welfare* (kesejahteraan), *access* (akses), *conscientisation* (penyadaran), *participation* (partisipasi), dan *Control*. Kelima aspek ini diyakini merupakan tahapan atau proses menuju pemberdayaan tenaga kerja dalam mencapai kesejahteraan. Berdasarkan konsep pemberdayaan tenaga kerja di atas, maka pemberdayaan di Industri Pengolahan Buah dapat dibedakan menjadi lima komponen.

Dalam upaya meningkatkan pemberdayaan industri pengolahan buah tidak terlepas dari pemberdayaan tenaga kerja. Pemberdayaan tenaga kerja sangat terkait dengan keberlangsungan pekerjaannya dan pengembangan potensi diri. Pemberdayaan tenaga kerja merupakan upaya peningkatkan kesejahteraan, upaya peningkatkan kemampuan, berpartisipasi dalam pengembangan potensi diri dan peran kebijakan dalam pemberdayaan tenaga kerja. Mengacu dengan konsep pemberdayaan yang telah dikemukakan sebelumnya, pemberdayaan tenaga kerja dapat dibedakan berdasarkan kelima komponen. Kelima komponen tersebut, yaitu kesejahteraan, akses, penyadaran, partisipasi dan kontrol terkait dengan keberlangsungan pekerjaan dalam upaya pengembangan potensi diri (sumber daya manusia). Berikut merupakan uraian untuk masing-masing komponen.

Kesejahteraan merupakan indikator keberhasilan dan pemberdayaan tenaga kerja yang tertuang dalam besar pendapatan yang diterima atau upah. Sensitivitas upah menjadi sangat penting untuk melihat tingkat kesejahteraan tenaga kerja. Perbedaan besaran upah didasarkan pada fungsi dan tugas tenaga kerja dan bukan berdasarkan jenis kelamin. Kontinuitas dan besaran upah tenaga kerja sangat tergantung dengan status tenaga kerja dan kapasitas produksi. Pengusaha secara langsung menentukan besar kecil kapasitas produksi. Asumsi tidak adanya permintaan tenaga maka meningkatnya kapasitas produksi maka upah tenaga kerja harian dan borongan di industri pengolahan buah juga mengalami peningkatan.

Fasilitas yang diperoleh tenaga kerja harian terkait dengan upah adalah uang makan. Uang makan diberikan oleh pengusaha industri kripik buah dengan memberikan makan sebanyak dua kali kepada tenaga kerjanya dengan jumlah kerja 8 jam sehari. Upah lembur disesuaikan dengan jumlah penambahan jam kerja dihitung berdasarkan upah lembur per jam. Selain itu, fasilitas yang diperoleh

tenaga kerja adalah uang makan dalam wujud pemberian makan sebanyak dua kali kepada semua tenaga kerjanya. Setahun sekali, tenaga kerja juga memperoleh THR dengan besaran THR merupakan kebijakan langsung oleh pengusaha. Tenaga kerja sebagai karyawan tetap di Industri pengolahan sari apel LM belum memiliki fasilitas uang lembur dan uang makan. Komponen uang makan merupakan satu kesatuan dengan besaran upah yang diterima. Bagi tenaga kerja berupah borongan di industri pengolahan sari apel RY, kapasitas produksi merupakan faktor yang menentukan besaran upah. Kesehatan belum menjadi fasilitas pendukung dalam besaran upah. Aspek kesehatan tenaga kerja di Industri pengolahan buah merupakan tanggung jawab personal. Kesehatan belum menjadi komponen omset yang dimiliki oleh industri pengolahan. Kontinuitas proses produksi mutlak tanggung jawab pengusaha sehingga kesehatan belum menjadi prioritas proses produksi.

Akses menekankan pada ketersediaan ruang atau kemudahan tenaga kerja terhadap akses lahan, tenaga kerja, kredit, pelatihan, fasilitas pemasaran dan semua pelayanan umum dan pemanfaatan fasilitas. Akses informasi tenaga kerja di industri pengolahan buah masih sangat minim dan terbatas. Pengetahuan atau job training berkaitan dengan jenis pekerjaannya diperoleh secara langsung sebelum proses pengangkatan kerja. Pengusaha berkewajiban membimbing dan mengarahkan tenaga kerjanya. Akses pengembangan potensi diri terkait peningkatan ilmu pengetahuannya melalui kegiatan program pemerintah masih sangat terbatas. Program dan kebijakan pemerintah daerah terbatas kepada persiapan menjadi tenaga kerja yang terampil dan belum pada tahap pengembangan tenaga kerja yang telah bekerja. Program dan kebijakan pemerintah daerah lebih menekankan pada pengembangan potensi diri pada pengusaha selaku pelaku bisnis. Keterbatasan-terbatasan tersebut sehingga pengembangan potensi diri

tenaga kerja sangat tergantung dengan personal sehingga keterkaitan kelangsungan pekerjaan menjadi sangat lemah.

Penyadaran dalam kerangka Longwe menekankan pada kesadaran akan pekerjaan dan tidak adanya dominasi satu pihak dan pihak lain sehingga memungkinkan kelompok masyarakat berpartisipasi dalam proses produksi. Di industri pengolahan sari apel yang merupakan kepemilikan sekelompok masyarakat, permasalahan dominasi antara tenaga kerja dan pemimpin usaha tidak terlihat jelas. Keputusan terkait dengan tenaga kerja dan proses produksi dilakukan secara musyawarah dan disesuaikan dengan kemampuan dan aksesibilitas tenaga kerja. Bagi tenaga kerja tetap di Industri pengolahan sari apel LM, peningkatan kapasitas produksi merupakan ditentukan oleh permintaan pasar dan fungsi tenaga kerja tidak sebatas dalam proses produksi melainkan juga terlibat dalam peningkatan jangkauan pemasaran produksi. Bagi tenaga kerja di Industri pengolahan sari apel RY, keterlibatan tenaga kerja merupakan hasil kesepakatan disesuaikan dengan kemampuan dan aksesibilitas. Fleksibilitas tenaga kerja mengatur jam kerja disesuaikan dengan kapasitas produksi. Penyadaran tenaga kerja di Industri pengolahan sari apel memiliki peran besar dalam proses produksi dan keberlangsungan pekerjaan.

Partisipasi merupakan komponen pemberdayaan tenaga kerja dari proses pengambilan keputusan, pembuatan kebijakan, perencanaan dan administrasi. Partisipasi tenaga kerja sangat tergantung dari status tenaga kerja dan kepemilikan industri. Partisipasi tenaga kerja di Industri kripik buah yang merupakan milik individu relatif sangat rendah. Pengusaha memiliki kekuasaan penuh sejak proses produksi sampai dengan pemasaran produk. Sistem kekuasaan terpusat merupakan bagian dari manajemen industri pengolahan. Keadaan sebaliknya, tenaga kerja di Industri sari apel RY mengatur secara bersama-sama proses produksi, fungsi pemegang modal sebatas

pemilik modal utama dan tidak secara langsung dapat menentukan kapan proses produksi berjalan. Tenaga kerja di industri pengolahan sari apel LM memiliki peluang partisipasi yang dalam proses perencanaan dan administrasi. Peran ganda tenaga kerja tidak hanya tenaga produksi melainkan juga sebagai tenaga jasa pemasaran memberikan kesempatan kepada tenaga kerja untuk meningkatkan kapasitas dan proses perencanaan produksi.

Kontrol terkait dengan pengawasan dalam porses pengambilan keputusan terhadap faktor-faktor produksi dan distribusi keuntungan, bagi tenaga kerja di industri pengolahan buah sangat tergantung dengan kepemilikan industri tersebut. Tenaga kerja yang terlibat di industri pengolahan milik perseorangan cenderung tidak memiliki hak kontrol. Pengontrolan sepenuhnya merupakan fungsi dan tanggung jawab pemilik usaha. Industri pengolahan sari apel LM memiliki peran dan fungsi pengontrolan berada di semua tenaga kerja. Sebagai bagian dari unit pengolahan koperasi manajemen keuangan cenderung bersifat transparan dan akuntabel sehingga tenaga ikut membantu proses pengambilan keputusan terkait dengan faktor produksi. Tenaga kerja di Industri pengolahan sari apel RY merupakan milik sekelompok masyarakat menyebabkan fungsi kontrol dan pengawasan terkait dengan proses produksi merupakan tanggung jawab semua pihak yang terkait dalam proses produksi.

Berdasarkan komponen pemberdayaan tersebut, pemberdayaan tenaga kerja sangat tergantung dengan jenis dan kepemilikan industri. Pemberdayaan tenaga kerja di industri milik perorangan relatif sangat terbatas. Penekanan utama pemberdayaan tenaga kerja terhadap kesejahteraan dan akses pengembangan diri. Kesejahteraan terbatas terhadap besaran upah, uang lembur dan uang makan, sedangkan akses peningkatan pengembangan diri merupakan upaya meningkatkan ketrampilan dan pengetahuan terkait dengan usaha pengelolaan

industri. Tenaga kerja yang bekerja di Industri pengolahan buah milik sekelompok masyarakat memiliki peluang pemberdayaan yang relatif lebih besar. Pemberdayaan tenaga kerja tidak hanya terkait dengan kesejahteraan dan akses, melainkan juga terhadap penyadaran, partisipasi dan kontrol pengawasan faktor-faktor produksi.

5.4. Kemitraan dan Kelangsungan Usaha

Pada umumnya kegiatan pengolahan buah di Kecamatan Poncokusumo merupakan industri rumah tangga yang baru berkembang, sehingga jumlahnya tidak banyak dan melibatkan tenaga kerja yang juga relatif kecil. Meskipun demikian cakupan pemasarannya sudah mulai meluas ke luar kecamatan, bahkan sampai ke kota besar di Jawa Timur. Dalam perkembangannya usaha pengolahan buah ini telah menggunakan teknologi yang lebih maju, serta mempunyai jaringan kemitraan dengan beberapa pemangku kebijakan seperti pemerintah daerah, lembaga terkait pemberdayaan usaha dan sumber permodalan serta dengan mitra dagang di Kota Malang dan Surabaya. Pendalaman tentang kemitraan dan pemberdayaan terkait dengan keberlangsungan usaha diperoleh dari berbagai informasi terkait dua kasus usaha yaitu usaha pengolahan sari apel dan usaha kripik apel di Kecamatan Poncokusumo.

Kebijakan pemerintah untuk membina sentra-sentra produksi di Kabupaten Malang telah dilakukan sejak era orde baru, dan sempat terhenti program-programnya pada era reformasi. Sejak tahun 2010, program pembinaan sentra industri kembali dimunculkan sejalan dengan rencana agropolitan di Kabupaten Malang. Pada era Orde Baru hubungan kemitraan dalam kegiatan UKM direncanakan dan dibentuk sehingga ada kesinambungan pembinaan. Sedangkan bentuk kemitraan sekarang disesuaikan dengan kepentingan usaha masing-masing dan pembinaannya tergantung pada ketersediaan dana.

Keberlangsungan suatu usaha atau kegiatan bisnis sangat ditentukan oleh pelaku utamanya yaitu pengusaha dan pekerja. Namun demikian perkembangan usaha dipengaruhi oleh tiga P yaitu *profit* (keuntungan), *people* (kualifikasi sumberdaya manusia-SDM), dan *planet* (lingkungan). Kemampuan pengusaha dalam mengelola bisnis dapat mendatangkan keuntungan yang memadai untuk mengembangkan usahanya. Melalui pemberdayaan SDM diharapkan produktivitas dan daya saing usaha akan meningkat, sehingga keberlangsungan usaha terjaga. Lingkungan usaha yang kondusif seperti infrastruktur, pasar, transportasi, komunikasi, kebijakan pemerintah dan hubungan kemitraan usaha dengan berbagai pihak terkait sangat dibutuhkan untuk pengembangan dan keberlangsungan usaha.

Kajian tentang ‘kemitraan dan keberlangsungan usaha’ pada bagian ini difokuskan di Kecamatan Poncokusumo, yang ditetapkan sebagai pusat perencanaan agropolitan di Kabupaten Malang (Pemerintah Kabupaten Malang, 2007). Dalam Masterplan Agropolitan Kabupaten Malang, Kecamatan Poncokusumo juga merupakan salah satu pusat Kawasan Pengembangan Utama Komoditi (Kapuk) hortikultura yang menjadi wilayah pengembangan utama komoditi yang meliputi sentra-sentra hortikultura di Kabupaten Malang. Pada bagian ini akan diuraikan tentang perkembangan kasus beberapa usaha pengolahan hasil pertanian yaitu sari buah apel dan kripik buah (apel dan nangka) yang tersedia di lokasi kajian, Uraian pada bagian ini menekankan pada keberlangsungan usaha dilihat dari aspek hubungan kemitraan serta pemberdayaan yang diterima pengusaha. Bagaimana dan dengan siapa pengusaha kecil/rumah tangga menjalin hubungan kemitraan serta bagaimana bentuk pemberdayaan yang diperoleh selama ini sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan usaha. Sesuai

dengan kondisi daerah kajian, usaha agribisnis akan difokuskan pada usaha sari minuman apel dan usaha olahan kripik buah.

5.4.1. Usaha Pengolahan Sari Apel RY

Usaha pembuatan sari apel di Poncokusumo sebagai bahan baku utama industri pengolahan sari apel, apel diperoleh terutama dari Desa Poncokusumo yang sudah lama dikenal sebagai daerah sentra apel. Pada kurun waktu 1980-1993 hasil perkebunan apel telah mensejahterakan kehidupan petani. Produksi apel pernah mengalami 'booming' pada tahun 1996. Akibat krisis, biaya produksi (pupuk, obat-obatan) meningkat sehingga banyak yang beralih untuk bertani jenis komoditi lain (tebu, sayur dan pepaya. Pada saat apel 'booming' harga apel terutama kualitas rendah jatuh sekali bahkan banyak apel yang buruk kualitasnya menjadi tidak laku dijual. Pada tahun 2005 timbul ide dari kelompok petani apel (33 orang) untuk membuat minuman sari apel, terutama memanfaatkan buah apel dengan *grade* rendah. Ide itu direalisasikan oleh kelompok petani apel yang terdiri dari 5 orang, dipimpin oleh pak 'Ha', sebagai pioneer pembuatan sari apel 'royal' di Desa Poncokusumo. Dampaknya harga buah apel meningkat kembali, dan petani banyak yang bersedia merevitalisasi pohon apel yang sudah tua, dengan fasilitas bimbingan dari Dinas Pertanian, melalui sekolah lapang yang dibentuk pada tahun 2005. Usaha agroindustri yang berbasis potensi daerah ini dalam batas-batas tertentu telah mendorong petani apel untuk meningkatkan produksi apel dengan menjalin kemitraan dengan dinas terkait (pertanian) yang juga mempunyai program peningkatan sektor pertanian. Keberlangsungan usaha agribisnis yang berbasis potensi daerah juga memunculkan hubungan kemitraan antara pelaku usaha sari apel dengan kelompok petani pemasok apel. Melalui kebijakan Pemerintah Kabupaten Malang kemitraan dengan pihak pemerintah daerah berupa akses untuk memanfaatkan akses dan fasilitas program pembinaan

sangat membantu pengembangan dan keberlangsungan usaha agribis ini.

Hasil produksi selain untuk memenuhi pesanan, juga untuk melengkapi stok (sekitar 50-100 doos). Kapasitas produksi optimal dengan mengoperasikan 2 set mesin seharusnya mencapai 100 doos per hari. Tetapi sampai sekarang hanya 1 set mesin yang aktif operasional, mesin lainnya digunakan sebagai cadangan apabila pesanan meningkat. Usaha sari apel milik kelompok tani ini belum optimal berproduksi karena menghadapi kendala seperti: persaingan bisnis semakin ketat, daya beli masyarakat yang tidak mendukung produksi serta keterbatasan modal. Upaya perluasan pemasaran ke toko-toko di kota terkendala oleh modal karena adanya sistem konsinyasi, di mana pembayaran oleh toko langganan ditangguhkan sampai barang habis terjual, sementara pembelian bahan mentah ke kelompok petani dilakukan secara tunai. Aturan main seperti ini dianggap rapuh untuk melakukan kemitraan, karena tidak ada instrumen yang dapat mempererat agar *interdependency* menjadi lebih kuat (Indraningsih dkk, tidak disertakan tahun). Berbagai akses yang disediakan bagi pengembangan UKM baik dari pemerintah maupun PT yang meliputi pemberdayaan usaha dan SDM, teknologi produksi, manajemen pengelolaan industri dan pemasaran merupakan bantuan yang sangat berarti bagi pengusaha agribis yang berbasis potensi daerah. Namun demikian pola kerja sama operasional masih diperlukan untuk mengatasi kendala permodalan dan pemasaran, untuk memanfaatkan akses permodalan dari lembaga keuangan yang tersedia (perbankan, koperasi). Persaingan bisnis terjadi antar industri sejenis yang ada di lokasi, sehingga terjadi persaingan yang ketat dalam menentukan harga dan rasa yang disukai konsumen. Persaingan kurang sehat untuk perkembangan bisnis dan kelangsungannya, karena dapat mematikan pihak yang lemah dalam permodalan dan manajemen. Peran pemerintah (Disperindag) sangat penting untuk

mengurangi persaingan dengan kerja sama operasional yang saling memanfaatkan, saling memperkuat dan saling menguntungkan, sehingga dapat mempertahankan keberlangsungan usaha.

5.4.2. Usaha Pengolahan Sari Apel LM

Usaha sari apel lainnya di Kecamatan Poncokusumo dikelola oleh Koperasi LM di Desa Wonomoyo. Kegiatan utama koperasi ini adalah simpan pinjam dan usaha pertokoan (kebutuhan sehari-hari). Kegiatan simpan pinjam untuk anggota koperasi (biasanya untuk usaha pengolahan, dagang dan pertanian). Sedangkan usaha pertokoan untuk anggota dan non-anggota. Dalam perkembangannya, sejak tahun 2010 koperasi mulai usaha baru dengan membuat sari apel. Usaha dimulai dengan menjalin kemitraan dengan UNIBRAW untuk mempersiapkan 5 orang staf koperasi, mendapat pelatihan selama 6 bulan, hingga mereka mampu dalam pengelolaan dan pengemasan sari apel. Pembinaan dilakukan oleh Dinas UKM dan Koperasi, yang juga berfungsi menyediakan peralatan yang diperlukan untuk pengolahan sari apel dan keripik apel, dan pengadaan pengadaan peralatannya dibantu oleh UNIBRAW. Akses permodalan diperoleh dari Dinas Koperasi yang berasal dari dana APBD I. bahan mentah (buah apel) diperoleh dari petani baik anggota koperasi maupun bukan. Pembinaan petani pemasok apel oleh Dinas Pertanian (PPL). Pemasaran dibantu Dinas UKM/Koperasi melalui pameran hasil produksi pada berbagai kesempatan, lokal maupun provinsi. Berbagai akses yang diperoleh koperasi dalam agribisnis ini menyebabkan produk cepat dikenal dan pesanan dari berbagai tempat, termasuk toko-toko makanan. Sebagai ilustrasi dalam waktu cepat koperasi sudah dapat memasok sari apel ke Gresik seminggu 2 kali, setiap kali 100 doos (ke toko dan warung). Koperasi juga sering menerima pesanan orang hajatan masyarakat atau dinas-dinas setempat (untuk rapat dan seminar).

Pembinaan yang dilakukan oleh dinas terkait, sangat menguntungkan usaha sari apel yang dikelola oleh koperasi, terutama bantuan modal sebagai hibah bukan pinjaman. Hal ini dapat membantu mengatasi kerapuhan hubungan kemitraan akibat sistem pembayaran yang tidak fair antara keharusan membayar tunai bahan baku ke petani dengan penangguhan pembayaran hasil produksi oleh toko langganan, Sementara hubungan dengan Inkubator Bisnis Unibra sebagai hubungan kemitraan yang dananya disediakan oleh Dinas Koperasi. Usaha sari apel yang dilakukan koperasi memperoleh support penuh dari Pem.Kab melalui dinas-dinas terkait, sehingga seharusnya lebih berhasil, karena berbagai akses yang diterima, memungkinkan usaha ini terjamin kelangsungannya. Namun demikian usaha yang cenderung bersifat proyek, kendala yang dihadapi umumnya adalah inefisiensi sehingga sulit bersaing dengan usaha yang berkembang secara efisien dan efektif. Koperasi ini pernah terpilih sebagai salah satu peserta pembinaan Inbis di Poncokusumo dan Karang Ploso, mewakili Kabupaten Malang. Meskipun bantuan peralatan yang diterima untuk usaha berbagai jenis produk (sari apel, kripik apel, wine, cuka, dan concentrato), namun yang sudah dihasilkan baru produk sari apel. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan produk dimungkinkan apabila dukungan pemerintah untuk pembinaan terus berlangsung. Sebaliknya akan terjadi inefisiensi, apabila peralatan yang tersedia tidak dimanfaatkan karena modal tergantung pada bantuan proyek. Diharapkan kebijaksanaan pembinaan semacam ini tidak bersifat *bussiness as usual* yaitu cenderung berorientasi ke proyek, karena berpotensi mengganggu keberlangsungan usaha, apabila proyek dihentikan. Kemudahan akses dari pemerintah ini juga berpotensi menghambat terjalinnya hubungan kemitraan dengan pihak lain di luar lingkaran birokrasi. Berdasarkan pengalaman, usaha yang berorientasi ke proyek sulit bertahan dalam jangka panjang, terutama apabila persaingan bisnis semakin ketat.

5.4.3. Usaha Pengolahan Kripik Buah

Usaha pengolahan kripik buah merupakan salah satu usaha agribisnis lain yang memanfaatkan buah sebagai bahan dasar. Selain usaha sari apel, di Kecamatan Poncokusumo juga sudah lama terdapat usaha pembuatan kripik buah, terutama kripik apel. Menurut informasi dari pengusaha kripik apel yang masih bertahan, di Desa Poncokusumo terdapat tiga pengusaha yang mengolah apel menjadi kripik apel, namun dua usaha kripik apel sudah tidak menghasilkan lagi, kini tinggal satu usaha kripik apel, yang juga seorang petani apel di Desa Poncokusumo. Selain usaha kripik apel, dihasilkan juga kripik nangka, meskipun bahan dasarnya diperoleh dari luar lokasi. Sementara kebutuhan apel untuk usaha kripik apel diperoleh dari kebun sendiri dan petani apel lain yang banyak tersedia di lokasi. Meskipun banyak tantangan, pengusaha kripik apel di Desa Poncokusumo ini tetap bertahan, di tengah persaingan yang ketat usaha sejenis dari daerah lain. Bagaimana strategi pengusaha kripik apel ini, terutama dalam hubungan kemitraan dengan pihak lain untuk mengatasi berbagai tantangan terutama permodalan dan pemasaran hasil?

Usaha kripik apel di Desa Poncokusumo yang masih bertahan sampai sekarang dikelola sejak tahun 2004 oleh seorang petani apel. Sebelumnya usaha yang sama telah berkembang di daerah Pakis untuk keperluan ekspor. Ide untuk mengolah apel menjadi kripik diperoleh dalam suatu pameran hasil produk dari daerah lain. Proses produksi dimulai dengan satu set peralatan (vacum frying) buatan Fakultas Teknik Pertanian UNIBRAW, dan bahan apel diperoleh dari kebun sendiri. Demikian pula uji higienis dilakukan di LPPM UNIBRAW, setelah proses produksi berjalan 3 bulan, sebagai salah satu syarat mengurus izin usaha ke Depkes yaitu surat ketetapan layak dikonsumsi. Setelah izin usaha keluar (proses 3 bulan), bisnis kripik

apel dilakukan dengan modal awal untuk mesin (1 set) sebesar 17 juta dan modal kerja sekitar 5 juta rupiah dan tenaga kerja sebanyak 2 orang. Sertifikat 'halal' dari POM-MUI diperoleh pada tahun 2008. Sejak tahun 2008 jumlah mesin bertambah 2 set dan jumlah tenaga kerja menjadi 5 orang (2 orang tenaga perempuan). Tenaga laki-laki untuk kegiatan memasak dan tenaga perempuan untuk kegiatan packing (mengemas dan mengepak). Apabila banyak pesanan, kekurangan tenaga (2 orang) diambil dari luar untuk pekerjaan yang relatif mudah yaitu mengemas dan mengepak.

Pemasaran kripik pada awalnya dilakukan sendiri dengan menawarkan ke toko-toko penjual makanan di Malang. Sejalan dengan perkembangan peralatan produksi, hasil produk juga semakin berkembang baik jenis produk maupun jumlah produk. Di samping kripik apel diproduksi pula kripik nangka, meskipun bahan mentah untuk pembuatan kripik nangka diperoleh dari daerah lain (Tumpang). Seiring dengan perkembangan produksi, kebutuhan apel meningkat sehingga hasil kebun sendiri tidak lagi mencukupi untuk produksi setiap hari. Kini kebutuhan apel untuk diolah hanya 25 persen milik sendiri dan selebihnya dibeli dari petani di lokasi. Kebutuhan apel untuk sekali produksi kripik apel rata-rata 50 kg per hari (maksimal produksi 1 kw apel per hari), dan 15 buah nangka untuk mendapatkan hasil sekitar 8 kg kripik apel dan 7 kg kripik nangka. Untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat, pada tahun 2011 modal kerja bertambah 20 juta yang merupakan pinjaman lunak dari koperasi kabupaten selama 2 tahun dengan bunga 6 persen/tahun. Banyaknya produksi disesuaikan dengan permintaan dan untuk stock (paling banyak 1 kw). Kini pemasaran sudah meluas ke toko-toko cemilan/oleh-oleh makanan khas Jawa Timur yang tersebar di Malang (30 toko) dan Surabaya (20 toko). Hasil produksi setiap hari digunakan untuk memasok kripik di toko-toko yang sudah habis barangnya dan untuk stock di rumah.

Meskipun usaha agribisnis ini merupakan usaha perseorangan yang dirintis sendiri, pengusaha memperoleh akses untuk pemberdayaan usaha berupa pelatihan kewirausahaan (oleh koperasi) dan pelatihan kemasan (oleh Dinas Perindustrian produk). Sedangkan pelatihan tenaga kerja diperoleh melalui pembimbingan sambil bekerja (on job training). Selain pelatihan, pengusaha juga memperoleh pemberdayaan usaha melalui kesempatan ikut pameran produk di tingkat provinsi (2 kali) dan di tingkat nasional (2 kali yaitu tahun 2006 dan 2010). Melalui pemberdayaan tersebut, pesanan kedua jenis produk semakin meningkat sehingga produksi semakin berkembang. Jaringan pemasaran juga semakin luas dengan menjalin hubungan kemitraan dengan toko-toko camilan yang menjadi langganannya selama ini. Permintaan toko –toko langganan meningkat pada musim liburan, lebaran dan hari besar lainnya. Tampaknya kelangsungan usaha juga didukung oleh cita rasa kripik yang berbeda antarpengusaha sejenis. Berdasarkan pengalaman, kerjasama antarpengusaha dalam pemasaran hasil dengan saling membantu memenuhi permintaan langganan, kurang berhasil karena perbedaan cita rasa produk masing-masing pengusaha. Dengan demikian menjaga kualitas produk dan memperluas jaringan kemitraan dari hulu ke hilir sangat menetkan keberlangsungan usaha kripik buah. Salah satu strategi yang ditempuh pengusaha adalah melakukan pembelian secara tunai untuk kebutuhan bahan mentah (menjaga keberlangsungan pasokan bahan baku). Sedangkan untuk sistem pemasaran ke toko-toko langganan dilakuakn dengan cara konsinyasi yaitu pembayaran produk dilakukan setelah barang habis terjual atau paling lama dibayar setelah sebulan dipasarkan. Untuk menjaga keberlangsungan proses produksi dari hulu ke hilir diperlukan tambahan modal kerja yang tampaknya mudah diperoleh dengan menjalin kemitraan dengan koperasi setempat.

Sebagai penutup bagian ini dapat disimpulkan meskipun tidak ditemukan bentuk hubungan kemitraan yang sengaja diprogram, namun dari ketiga kasus agribisnis tersebut, tampaknya keberlangsungan usaha tidak lepas dari adanya hubungan kemitraan dengan pihak pemerintah (melalui program dinas setempat) maupun stakeholder/kelembagaan lain di luar pemerintah. Hubungan kemitraan terjalin sejak dari hulu (untuk menjamin kelancaran pasokan bahan mentah) maupun hilir (untuk menjamin kelancaran pemasaran). Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, dibutuhkan inovasi untuk peningkatan kualitas produk. Dalam hal ini hubungan kemitraan juga terjadi antara pengusaha dengan lembaga-lembaga pemberdayaan seperti koperasi (kewirausahaan), dinas terkait (Deperindag), klinik UKM dan LPPM UNIBRAW. Dukungan untuk pemasaran hasil juga diperoleh pengusaha dengan menjalin kemitraan dengan dinas terkait (UKM/koperasi, Dinas Pariwisata dan Dinas Perdagangan). Namun demikian pengusaha UKM yang umumnya bergerak di sektor informal dan relatif kecil menghadapi kendala dengan minimnya informasi tentang akses/fasilitas yang tersedia untuk bisa dimanfaatkan masyarakat dalam memulai/memperluas kegiatan agribisnis berbasis potensi lokal. Hanya pengusaha agribisnis yang aktif dan yang mendapat mendukung penuh melalui program pemerintah daerah yang mampu menangkap dan memanfaatkan peluang yang tersedia dan menghadapi tantangan persaingan yang semakin ketat. Beberapa pola kemitraan agribisnis komoditas hortikultura pada ketiga kasus agribisnis ini cenderung merupakan Pola Kerjasama Operasional (KOA), Pola Kerjasama Pengembangan STA, Pola Kerjasama Penyediaan Modal melalui koperasi, dan pola dagang umum baik untuk bahan baku maupu bahan jadi, tanpa ada sinergi yang menguatkan hubungan kemitraan.

BAB VI

AGROWISATA DI KABUPATEN MALANG: HUBUNGAN KERJA DAN KELANGSUNGAN USAHA DI SEKTOR JASA

6.1. Pengantar

Otonomi daerah menjadikan Kabupaten Malang terbagi menjadi tiga bagian, yaitu Kabupaten Malang, Kota Malang, dan Kota Batu. Wilayah boleh terpisah, namun jaringan sosial-budaya, fisik, dan kegiatan masyarakat sulit terpisahkan. Berdasar rencana perwilayahan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Malang termasuk dalam SWP (Satuan Wilayah Pembangunan) Malang Raya memiliki:

- Fungsi SWP Malang Raya adalah pertanian tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, kehutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, perdagangan, jasa, pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan industri.
- Fungsi pusat pengembangan adalah pusat pelayanan pemerintahan, perdagangan, jasa, industri, pendidikan, kesehatan, dan prasarana wisata.

Kedua fungsi tersebut di atas menjadi faktor pendukung dikembangkannya kawasan agropolitan di Kabupaten Malang sebagai tindak lanjut dari kebijakan provinsi (Pemerintah Kabupaten Malang, 2007).

Hubungan kerja sama ini juga terjadi pada sektor industri pariwisata sebagai salah sektor yang diharapkan dapat mendukung pembangunan

daerah berkelanjutan, baik untuk masyarakat maupun negara. Apabila dilihat dari sisi sejarah, sosial, budaya, dan ekonomi, penduduk di tiga daerah telah mempunyai hubungan yang terjalin sebelum otonomi, sehingga pembangunan pariwisata di kawasan ini mempunyai peluang untuk meningkatkan kehidupan penduduk. Menurut Sastrayuda (2010), agar kepariwisataan dapat menjadi salah satu kegiatan pembangunan yang sejalan dengan konsep dan prinsip pembangunan berkelanjutan ada beberapa kaidah yang perlu diterapkan, yaitu:

1. Pengembangan pariwisata berorientasi jangka panjang dan menyeluruh (*holistic*), tidak hanya memanfaatkan tetapi sekaligus melestarikan obyek dan daya tarik wisata yang memberikan manfaat secara adil bagi semua.
2. Pengembangan pariwisata yang sesuai dengan karakter wilayah, kondisi lingkungan, konteks sosial dan dinamika budaya.
3. Penciptaan keselarasan, sinergitas antara kebutuhan wisatawan dan penyedia oleh masyarakat lokal, yang memunculkan hubungan timbal balik dan saling menghargai nilai, adat istiadat, kebiasaan, warisan, budaya, dan lain-lain.
4. Pemanfaatan sumber daya pariwisata yang memperhitungkan kemampuan kelestariannya yang pengelolaannya secara *eco-efficiency (reduce, reuse, dan recyle) sehingga mencapai eco-effectivity (redistribute, reactual)*.
5. Pengelolaan kegiatan pariwisata yang tanggap terhadap perubahan yang terjadi dari kedua sisi permintaan (pasar) dan penawaran (produk).

Mengacu kepada kaidah-kaidah tersebut, kawasan Malang Raya berpotensi dalam pengembangan daerah wisata, termasuk agrowisata, yang tercermin dari keanekaragaman jenis tanaman, baik tanaman pangan, maupun hortikultura dan tanaman keras. Keanekaragaman jenis tanaman tersebut turut mendorong keberadaan industri

agrowisata yang sedang menjadi gaya hidup (*trend*) masyarakat untuk mencintai lingkungan. Khusus Kabupaten Malang, ada agrowisata yang telah ‘jadi’ sebagai sebuah industri namun ada yang sedang ‘merintis’ untuk menjadi sebuah desa wisata bernuansa pertanian. Misalnya, agrowisata yang telah dirancang sebagai sebuah industri adalah Wonosari yang dikelola oleh PT Perkebunan Nusantara XII dan agrowisata Desa Poncokusumo baru menjadi perhatian dari berbagai pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Pada zaman Belanda, Desa Poncokusumo pernah sebagai tempat peristirahatan orang Belanda dari Jawa Timur, khususnya Malang, yang tercermin dari bangunan rumah dan cerita-cerita penduduk Poncokusumo. Namun, dalam kaitannya dengan industri agrowisata masih sangat awal yang dimulai oleh masyarakat Poncokusumo sehingga perkembangannya masih sederhana atau belum dikelola secara profesional dan bernuansa perdesaan. Pemerintah Daerah Kabupaten Malang telah merencanakan Poncokusumo sebagai salah satu daerah yang akan dijadikan kawasan Agropolitan. Kecamatan Poncokusumo secara regional direncanakan sebagai pusat pengembangan agropolitan dengan daerah budidaya hortikultura yang menggunakan konsep agropolitan, yaitu meliputi bidang sosial ekonomi, lingkungan, dan penataan ruang. Dalam hal ini, ada dua wilayah yang menjadi pusat utama pertumbuhan (DPP), yaitu Desa Poncokusumo dan Desa Wonomulyo, yang berfungsi sebagai kawasan penggerak kegiatan ekonomi bagi kawasan-kawasan pendukung di sekitarnya (Pemerintah Kabupaten Malang, 2007).

Poncokusumo yang akan menjadi pusat utama agropolitan, maka pariwisata yang dapat dikembangkan berdasar potensi wisata yang ada di sekitarnya seperti wisata alam, wisata budaya, wisata belanja, dan ekologi. Pembangunan wisata ini diharapkan dapat memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja yang pada akhirnya akan

meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam kaitannya dengan harapan tersebut, dari beberapa tujuan pembangunan kepariwisataan yang dikemukakan Nirwandar (2011) ada dua tujuan yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, walaupun tujuan lain pun pada akhirnya adalah membuka peluang kerja bagi penduduk. Pertama, penghapusan kemiskinan di mana pariwisata mampu memberi kesempatan kerja bagi seluruh masyarakat untuk berusaha dan bekerja, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka dan andil dalam penghapusan kemiskinan. Kedua, peningkatan ekonomi dan industri di mana pengelolaan kepariwisataan yang baik dan berkelanjutan mampu memberi kesempatan kepada industri lokal untuk berperan dalam penyediaan barang dan jasa. Keberhasilan usaha ini akan dapat menciptakan peluang kerja baru bagi mereka yang mau berusaha dan melakukan inovasi untuk menarik wisatawan terhadap produk-produk mereka.

Gambaran kepariwisataan di Poncokusumo pada saat ini menunjukkan, bahwa keberadaan sektor pariwisata di kawasan ini belum terkoordinasi menurut kaidah-kaidah kepariwisataan namun mempunyai masa depan yang menjanjikan apabila direncanakan secara lebih baik. Berkaitan dengan tujuan penelitian ini, tulisan ini bermaksud untuk: 1) mendeskripsi dan mengkaji hubungan kerja antara tenaga kerja dan pemberi kerja, 2) mengkaji pemberdayaan tenaga kerja dan usaha di sektor jasa pariwisata berkaitan dengan kelangsungan kerja dan kemitraan. Kajian ini bersifat holistik yang mencakup industri jasa pariwisata dari berbagai sisi, baik menurut sektor maupun daerah sekitar yang menunjang keberhasilan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan bernuansa agrowisata. Dalam kaitannya dengan ketenagakerjaan, kajian ini diharapkan dapat menggambarkan pola hubungan kerja antara pekerja dengan pekerja, antara pekerja dengan pemberi kerja, serta bentuk pemberdayaan yang diterima pekerja untuk kelangsungan pekerjaan. Fokus kajian adalah

Kecamatan Poncokusumo, khusus Desa Poncokusumo, sebagai daerah yang direncanakan Pemerintah Daerah Kabupaten Malang sebagai kawasan Agropolitan bernuansa agrowisata. Struktur penulisan terdiri dari pengantar, bentuk dan usaha sektor jasa industri pariwisata di Poncokusumo, hubungan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja, kemitraan dan kelangsungan usaha, dan penutup sebagai kajian dari bagian ini.

6.2. Usaha Industri Pariwisata Di Kawasan Poncokusumo

Berdasar ketentuan perundangan Indonesia No. 19 Tahun 2009, kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha. Dalam usaha untuk mengembangkan kepariwisataan diperlukan suatu usaha atau industri yang menyediakan barang dan/atau jasa penyelenggaraan pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan. Poncokusumo, terutama sejak Kota Batu tidak menjadi bagian dari Kabupaten Malang, dicanangkan sebagai daerah wisata oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Malang. Penentuan daerah ini mengingat Poncokusumo cukup lama menjadi daerah tujuan pariwisata, yang dikenal dengan wisata desa.

Berkembangnya penduduk Kecamatan Poncokusumo, khususnya Desa Poncokusumo, menanam apel dan berbagai jenis tanaman hortikultura lain, maka daerah ini tidak hanya sebagai wisata desa namun juga dikenal sebagai desa wisata agro atau agrowisata. Kemudian, pada tahun 2010 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jawa Timur menyetujui rencana kawasan Poncokusumo, khususnya Desa Poncokusumo, untuk dijadikan desa agrowisata dengan nama 'Safari

Mapan Bener'. Walaupun dilihat dari kesiapan dan penyelenggaraan masyarakat belum dikelola secara professional seperti agrowisata hortikultura di Kota Batu dan agrowisata PT Perkebunan Nusantara XII di Wonosari, namun ke depan diharapkan dapat menjadi pengganti Kota Batu yang tidak lagi masuk wilayah Kabupaten Malang. Pemilihan ini karena Desa Poncokusumo memiliki potensi cukup besar sebagai kawasan agrowisata, yaitu mulai dari adanya embrio agrowisata, nuansa alam yang indah, hingga munculnya industri olahan muatan lokal. Penetapan ini diikuti dengan beberapa persyaratan yang harus dilengkapi dengan adanya usaha peternakan, agrobisnis, tanaman pangan, dan pengelolaan bioenergi (<http://tudearka.wordpress.com/2009/12/21/send-send->).

Ditetapkannya Desa Poncokusumo sebagai desa wisata dan agrowisata merupakan tantangan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan (*stakeholder*), termasuk pemerintah, untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Pemerintah daerah Kabupaten Malang berusaha mempromosikan Poncokusumo agar menjadi tujuan wisata karena pariwisata merupakan salah satu sumber pendapatan daerah (APBD). Pengembangan pariwisata tersebut memiliki dampak multiefek yang mampu menggerakkan perekonomian, baik di sektor formal maupun informal, yang diperkirakan mampu membuka lapangan pekerjaan.

Pada saat ini, di Desa Poncokusumo telah ada beberapa bentuk usaha jasa pariwisata yang dapat menjadi embrio pengembangan kepariwisataan. Bagian ini mencoba mendeskripsikan dan mengkaji industri kepariwisataan secara holistik, baik jenis industri jasa pariwisata maupun jenis usaha pendukung industri pariwisata. Fokus kajian adalah karakteristik usaha pariwisata antara lain meliputi kualitas dan kuantitas tenaga kerja, jumlah tenaga kerja, jangkauan pemasaran, dan promosi.

- ***Wisata Agro dan Wisata Lain***

Kondisi alam dan budaya kawasan Poncokusumo dan sekitarnya berdampak terhadap berkembangnya beragam jenis wisata seperti wisata desa, desa wisata/agrowisata, wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata sejarah. Di antara berbagai jenis wisata tersebut, agrowisata yang paling dekat dengan kegiatan pertanian. Namun dalam pelaksanaan dan perkembangan agrowisata tidak terlepas dengan jenis-jenis wisata lain yang saling mendukung untuk kemajuan kepariwisataan di daerah tersebut.

Kawasan Poncokusumo sebagai salah satu daerah agrowisata di Kabupaten Malang, dilihat dari sejarah wisata kegiatan kepariwisataan telah ada sejak jaman Belanda. Gambaran ini dapat dilihat adanya bangunan-bangunan rumah bercirikan Belanda yang dulu digunakan sebagai rumah peristirahatan orang Belanda di Kabupaten Malang selain Kota Batu. Namun, pada saat itu jenis-jenis wisata yang ada belum dikategorisasi seperti gambaran wisata pada saat ini. Bahkan untuk lebih menarik wisatawan datang di kawasan Poncokusumo, pemerintah daerah Kabupaten Malang merencanakan untuk membangun wisata *volcano park* di Desa Kelakah dan wisata *sawah putuk* di Poncokusumo. Keberadaan jenis wisata baru yang bernuansa modern tersebut diharapkan dapat menarik wisatawan berkunjung ke Poncokusumo.

Agrowisata diawali ketika petani mengalami produksi buah apel berlimpah (*booming*), yaitu antara tahun 1980 hingga 1993. Pada waktu itu, beberapa orang petani apel yang produksinya berlimpah dan sulit dipasarkan membuka usaha baru, yaitu membuka kebun bagi pengunjung untuk memetik buah apel. Aktivitas ini menarik masyarakat luar yang informasi diperoleh dari mulut ke mulut, bahwa di Poncokusumo ada agrowisata memetik buah apel sendiri. Pada

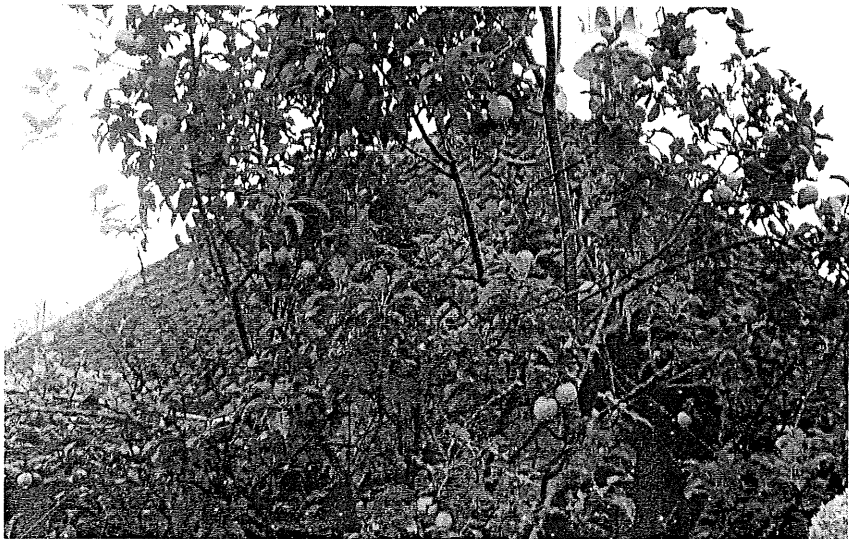
waktu terjadi krisis ekonomi, aktivitas penanaman apel menurun karena harga jual tidak terjangkau dengan biaya produksi yang harus dikeluarkan. Namun sekitar tahun 2004/2005, kelompok usia muda yang baru menyelesaikan pendidikan kembali ke desa dan mulai berfikir untuk memajukan usaha buah apel dengan program revitalisasi tanaman apel melalui kelompok tani. Produksi buah apel mulai meningkat, dan mereka menyiasati pemasaran buah apel yang tidak laku dengan memproduksi minuman sari buah apel.

Pada saat itu, industri agrowisata lebih berkembang dengan berbagai jenis buah dan bunga seperti buah salak, belimbing, dan bunga krisan. Kondisi ini juga didukung oleh letak kawasan Poncokusumo, yaitu di persimpangan jalan menuju Gunung Bromo dan kondisi cuaca pegunungan yang sejuk mendorong daerah ini sebagai pusat pengembangan agrowisata. Namun perkembangan tersebut tidak stabil, karena bila wisatawan ramai berkunjung ke Poncokusumo, aktivitas agrowisata pun meningkat. Sebaliknya, apabila pengunjung 'sepi' buah-buah tersebut di produksi menjadi berbagai makanan kecil seperti keripik, manisan, dan minuman. Hal ini mungkin kurangnya promosi dan kesiapan pemilik kebun atau berbagai pihak dalam menyelenggarakan kegiatan agrowisata. Mereka lebih banyak pasif dan menunggu di tempat karena aktivitas ini sering dianggap sebagai selingan, sedang yang pokok adalah menjual langsung ke konsumen atau pembeli di luar desa. Padahal kawasan ini memiliki potensi yang besar dalam melaksanakan pertanian hortikultura dalam bentuk agrowisata, wisata alam yang indah, hingga industri olahan.

Ditetapkannya kawasan Poncokusumo dan desa sekitarnya sebagai desa wisata, termasuk agro wisata, oleh Dinas Budaya dan Pariwisata Jatim merupakan tantangan bagi pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan masyarakat Poncokusumo untuk mensukseskan kebijakan tersebut. Namun hingga saat ini belum mampu berkembang karena

hanya bermodalkan swadaya masyarakat dalam mengembangkan desa agar di kenal oleh masyarakat secara luas sebagai desa agrowisata. Oleh karena itu diperlukan berbagai strategi dan kebijakan, baik dari masyarakat maupun pemerintah dan swasta, agar desa wisata ini semakin dikenal dan menjadi salah satu tujuan utama wisatawan ketika berkunjung ke Malang.

Gambar 6.1
Tanaman Apel Di Pekarangan Warga Desa Poncokusumo



Sumber: Dokumentasi PPK 2011

Jenis wisata lain yang berkembang di kawasan Poncokusumo adalah wisata alam, wisata budaya, wisata religi, dan wisata sejarah. Keberadaan obyek wisata ini telah ada sebelum wisata agro dikembangkan yang lokasinya ada di wilayah kecamatan Poncokusumo dan ada pula di luar kecamatan. Hal ini disebabkan letak Poncokusumo yang berada di antara beberapa obyek wisata yang termasuk di luar atau dalam Kabupaten Malang, maka terbentuk suatu

jaringan wisata kabupaten Malang dan luar kabupaten Malang, yang direncanakan dalam satu kawasan Agropolitan. Pengembangan kawasan ini merupakan bagian dari perencanaan daerah Provinsi Jawa Timur.

Keberadaan obyek wisata ini merupakan satu paket wisata apabila wisatawan akan berkunjung ke Poncokusumo atau ke Gunung Bromo melalui Poncokusumo. Kondisi alam di kawasan Poncokusumo yang sejuk dan obyek wisata alam yang menantang cukup mendukung ketertarikan wisatawan untuk menjelajahnya, baik menggunakan kendaraan maupun berjalan kaki (*hyking*). Misalnya panorama alam Ledok Ombo dan air terjun Coban Pelangi di Desa Gubuk Klakah di mana wisatawan dapat berkemah, karena telah ada bumi perkemahan di lokasi tersebut. Pengembangan wisata alam di Poncokusumo tampaknya akan memiliki prospek yang cerah karena membawa wisatawan kembali ke alam yang sedang digemari masyarakat, baik wisatawan Indonesia maupun wisatawan negara lain.

Wisata religi dan wisata sejarah termasuk jenis wisata yang cukup menarik wisatawan yang datang ke Poncokusumo. Pada umumnya wisata religi dilakukan oleh mereka yang ingin melakukan kegiatan bertapa atau hanya jalan-jalan untuk melihat tempat pertapaan. Kegiatan keagamaan bertapa ini biasanya dilakukan oleh Suku Tengger sebagai penganut Agama Hindu, yang dikenal dengan Hindu Tengger karena mempunyai ciri-ciri khusus dan ada perbedaan dengan Hindu Bali. Lokasi pertapaan Ngadirekso yang berada di kawasan Poncokusumo adalah di Desa Gubuk Klakah, Desa Ngadas, dan Desa Pringin Anom. Di antara ketiga lokasi ini, Desa Ngadas yang termasuk kecamatan Poncokusumo.

Kecamatan Poncokusumo, khusus Desa Poncokusumo, pada masa Belanda dikenal sebagai tempat peristirahatan pejabat Belanda di Jawa

Timur termasuk Malang selain Batu. Orang Belanda, terutama para pejabat dan orang kaya, membangun rumah di Poncokusumo yang terlihat dari bentuk bangunan bernuansa arsitek Belanda. Gambaran ini yang menarik wisatawan, khususnya wisatawan Eropa/Belanda, untuk berkunjung ke Poncokusumo dengan tujuan berwisata atau nostalgia. Apabila wisatawan ini dikelola oleh dinas pariwisata atau biro perjalanan, maka mereka akan dipertunjukkan budaya setempat yang akan dikordinir oleh karang taruna dan pemerintah desa dan kecamatan.

Wisata budaya yang menjadi andalan kawasan Poncokusumo adalah tarian bantengan, rumah tua yang sudah berumur ratusan tahun, kegiatan unan-unan dan upacara Kesodo oleh Suku Tengger. Bangunan rumah tua terletak di sebelah utara kantor Balai Desa Poncokusumo terbuat dari kayu jati dengan dinding dan pintu yang diukir, dan dilengkapi oleh *furniture* yang juga terbuat dari kayu jati. Sementara itu, tarian bantengan biasanya ditarikan oleh anggota Karang Taruna atau masyarakat yang telah dilatih. Tarian ini dapat pula dikatakan sebagai tarian menyambut tamu. Tarian unan-unan dan upacara kesodo dilakukan oleh Suku Tengger yang bermukin di desa Ngadas.

- ***Jasa pendukung pariwisata***

Pengembangan usaha pariwisata sangat tergantung dengan berbagai sarana prasarana pendukung seperti penginapan, transportasi, jalan, rumah makan, pemandu wisata, dan industri lokal yang dapat menjadi kenang-kenangan wisatawan. Fasilitas penginapan yang memadai dan layak untuk wisatawan merupakan salah satu tolak ukur kesiapan suatu lokasi dijadikan daerah wisata. Pada saat ini, Desa Poncokusumo telah dilengkapi dengan fasilitas penginapan yang berbentuk *homestay* sekitar 50 rumah penduduk yang dikelola oleh

masyarakat setempat. Pengelolaan penginapan masih sederhana dan apabila tidak ada tamu kamar-kamar akan digunakan si pemilik. Rumah dan kamar-kamar selalu siap menerima tamu, terutama yang telah biasa menerima wisatawan. Apabila desa tersebut kedatangan wisatawan yang cukup banyak, maka pihak penyelenggara, biasanya Karang Taruna, akan mempersiapkan rumah-rumah penduduk lain agar terpenuhi dengan jumlah tamu yang akan berkunjung.

Dalam pengelolaan *homestay* ini, baik karang taruna maupun penduduk, kendala yang dihadapi adalah pengalaman pengelolaan yang sangat minim. Misalnya penataan *homestay* agar menarik, bersih, dan penyediaan makanan sesuai dengan kebutuhan wisatawan. Namun, pada saat ini kendala tersebut dapat teratasi dengan tujuan wisatawan yang pada umumnya selain berkunjung ke tempat tempat wisata adalah ingin merasakan kehidupan desa dan dapat berbaur secara langsung dengan masyarakat setempat.

Kondisi *homestay* di Poncokusumo biasanya telah dilengkapi dengan fasilitas kamar tidur, ruang tamu, dan toilet namun perlu ditata agar lebih menarik. Untuk itu, masyarakat berharap adanya pelatihan cara mengemas *homestay* ini agar lebih menarik dan layak, sehingga wisatawan ‘betah’ di Poncokusumo. Sementara itu, di Poncokusumo belum ada fasilitas umum seperti toilet umum, rumah makan atau warung makan, dan informasi wisata yang memadai untuk wisatawan.

Gambar 6.2
Kondisi kamar *homestay* di Poncokusumo



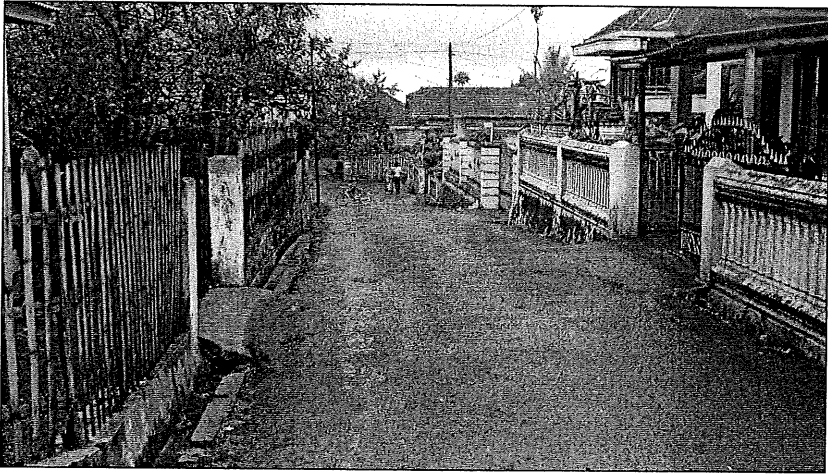
Sumber : Dokumentasi PPK LIPI 2011

Untuk meningkatkan usaha jasa *homestay* di Desa Poncokusumo adalah lebih mempromosikan wisata desa atau alam dengan menekankan kenyamanan menginap di *homestay* yang suasananya penuh kekeluargaan. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah pemasangan papan nama di depan penginapan untuk memudahkan wisatawan dalam mencari penginapan dan sebagai promosi *homestay* tersebut. Apabila tidak ada papan nama, wisatawan akan sulit membedakan antara rumah tinggal dan rumah penduduk yang disewakan untuk *homestay*. Untuk kelancaran wisatawan dalam melakukan kegiatan wisata diperlukan peta wisata yang dilengkapi dengan lokasi *homestay* dan obyek-obyek wisata di kawasan Poncokusumo yang dapat dikunjungi.

Sarana transportasi merupakan jasa wisata yang sangat dibutuhkan wisatawan selama berwisata di Poncokusumo, terutama mereka yang ingin berkunjung ke lokasi yang cukup jauh dan sulit dijangkau. Misalnya ke lokasi wisata alam, wisata religi, dan wisata Gunung Bromo. Pada saat ini telah ada jasa transportasi, yaitu kendaraan pribadi penduduk setempat yang disewakan untuk digunakan wisatawan. Sarana jalan yang masih rusak menuju Gunung Bromo dan lokasi wisata alam, maka pada umumnya kendaraan yang dimiliki penduduk untuk disewakan adalah Jip dan sepeda motor. Sistem pengelolaan penyewaan kendaraan yang masih bersifat pribadi, sehingga pengendaranya kadang-kadang adalah pemilik, penyewa, atau tetangga yang telah dikenal dan dipercaya untuk membawa mobil atau motor tersebut. Apabila ingin menyewa motor dapat juga langsung ke pemilik motor atau diantar si pemilik motor ke tempat tujuan. Usaha sewa-menyewa kendaraan masih bergantung kepada adanya pemesan dan kendaraan tidak digunakan karena jumlah terbatas, sehingga tidak dapat berjalan secara berkelanjutan.

Sarana jalan menuju lokasi pariwisata, baik di dalam maupun di luar wilayah Kecamatan Poncokusumo, masih belum memadai. Kondisi jalan selain rusak juga sempit dan belum memadai untuk dilalui kendaraan seperti bus pariwisata. Akses jalan ini merupakan salah satu kendala wisatawan yang akan ke gunung Bromo lebih memilih melalui Probolinggo atau Pasuruan, kecuali mereka yang juga akan mengunjungi lokasi wisata lain seperti wisata alam dan wisata agro.

Gambar 6.3
Jalan Desa Poncokusumo



Sumber : Dokumentasi PPK LIPI 2011

Usaha pendukung pariwisata yang juga diperlukan adalah jasa pemandu wisata (*guide*). Pada saat ini jasa pemandu wisata di Poncokusumo masih dikelola oleh karang taruna. Mereka yang terlibat biasanya penduduk muda yang mempunyai waktu luang karena pada umumnya mereka juga bekerja di kebun. Oleh karena usaha ini belum dikelola berdasar aturan sebagai pemandu wisata, maka masih terlihat adanya kekurangan dalam beraktivitas. Seorang pengurus karang taruna di Poncokusumo mengungkapkan:

".....kesulitan yang masih kami alami adalah jika menerima tamu dari asing karena kemampuan bahasa Inggris kami masih terbatas. Sedangkan sampai saat ini belum ada pelatihan dari instansi pariwisata. Kami mengharapakan ada pelatihan seperti melayani tamu

dengan baik, cara berkomunikasi dengan tamu, juga bahasa asing”.

Pada saat ini, penduduk Poncokusumo dan sekitarnya juga mulai memproduksi beberapa makanan ringan dari bahan-bahan local dan kerajinan rumah tangga sebagai cinderamata bagi mereka yang berkunjung ke Poncokusumo. Jenis produksi tersebut antara lain adalah keripik apel, keripik nangka, keripik semangka, kue carang mas, sari buah (apel dan belimbing), kopi bubuk, sandal, dan tusuk sate. Khusus produksi bubuk kopi masih membutuhkan bahan dasar dari luar Poncokusumo, karena biji kopi di daerah ini masih kurang. Bahkan industri keripik buah apel dan nangka telah menjadi salah satu ikon oleh-oleh khas Kabupaten Malang dan telah mampu menembus pasar di luar Poncokusumo seperti Kota Malang, Kota Batu, dan kota lain di Jawa Timur. Usaha ini merupakan pendukung kegiatan pariwisata karena pada umumnya wisatawan yang berkunjung ke suatu daerah akan mencari ciri khas daerah tersebut yang dapat dijadikan buah tangan atau oleh-oleh.

Gambar 6.4
Produk-produk industri kecil makanan di Poncokusumo



Sumber: Dokumentasi PPK 2011

Usaha jasa pendukung wisata yang juga diperlukan adalah biro perjalanan sebagai pengatur kegiatan wisata di kawasan Poncokusumo, baik perusahaan inti maupun cabang dari biro perjalanan kota lain. Pada saat ini, kegiatan pariwisata Poncokusumo masih mengandalkan biro perjalanan dari daerah sekitar seperti Turen, Pakis, dan Kota Malang (Dinasubpar, 2009). Kondisi ini terlihat dari keterikatan usaha-usaha wisata dan usaha jasa transportasi yang masih berada pada bayang-bayang Kota Malang, karena wisatawan lebih memilih untuk menginap di Kota Malang daripada di Kabupaten Malang. Hal ini disebabkan sarana penginapan dan informasi wisata melalui biro perjalanan didominasi Kota Malang meskipun obyek wisata yang dikunjungi berada di wilayah Kabupaten Malang.

6.3. Hubungan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja

Bagian ini mendeskripsikan dan mengkaji dua hal yang berkaitan dengan kegiatan usaha jasa pariwisata di Poncokusumo. *Pertama*, tentang pola hubungan kerja antara pengusaha wisata dan pekerja atau yang membantu kegiatan wisata di Poncokusumo. *Kedua*, pemberdayaan tenaga kerja pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha atau pihak lain. Dalam melihat pengembangan sumber daya manusia yang bekerja pada usaha jasa pariwisata, kedua hal ini saling berkaitan dan saling mengisi untuk peningkatan pariwisata di daerah ini.

- ***Pola hubungan kerja usaha jasa pariwisata di Poncokusumo***

Gambaran usaha pariwisata di kawasan Poncokusumo memperlihatkan, bahwa usaha wisata masih dikelola secara tradisional atau belum mengikuti kaidah-kaidah suatu usaha yang profesional. Pada umumnya, pekerja adalah anggota keluarga atau tetangga yang sudah telah dikenal oleh pengusaha wisata tersebut, sehingga hubungan yang dengan pekerja masih bersifat kekeluargaan atau lebih

luas dalam lingkup komunitas masyarakat Desa Poncokusumo dan sekitar. Contoh, pekerja pada salah satu usaha wisata agro (bapak X) adalah anggota keluarga dan tetangga yang juga bekerja di kebun apel. Pada saat ada wisatawan yang mengunjungi kebun bapak X akan dilayani oleh pekerja yang tidak sibuk, yaitu bisa bapak X, anggota keluarga, atau pekerja yang sedang berada di kebun. Sistem pengupahan pun tidak berbeda antara pekerja anggota rumah tangga dengan pekerja dari luar. Anggota keluarga biasanya tidak dibayar, sedang pekerja luar dihitung berdasar kerja di kebun karena pada saat ada wisatawan mereka sedang bekerja di kebun. Situasi ini karena kegiatan pariwisata bersifat sambilan dan pekerjaan pokok adalah di kebun. Upah para pekerja ini adalah menurut upah bekerja di kebun yang dibayar secara harian, yaitu Rp 15.000 per hari.

Situasi hubungan kerja tersebut di atas juga terjadi pada usaha jasa wisata lain seperti jasa wisata pendukung industri rumah tangga. Para pekerja adalah anggota keluarga dan tetangga dekat dalam satu desa. Pekerjaan yang dianggap 'ringan' biasanya dikerjakan anggota keluarga tanpa diupah, sedang yang dianggap 'berat' dilakukan oleh tetangga sebagai pekerja upahan. Hubungan antara pemilik usaha dengan pekerja adalah sebagai pekerja upahan yang pembayarannya ada berdasar harian dan ada berdasar sekali masak. Misalnya pekerja pengolah sari apel akan dibayar sebesar Rp 7.500 per rebusan. Pada hari raya, para pekerja ini akan menerima bonus atau hadiah lebaran sesuai dengan jenis pekerjaan yang dilakukan.

Usaha pendukung jasa wisata yang mempunyai berbeda dengan usaha jasa wisata di atas adalah jasa pemandu wisata (*guide*). Usaha ini lebih bersifat individu karena belum di koordinir oleh suatu perusahaan, walaupun ada karang taruna yang 'dianggap' sebagai pusat koordinasi pemandu wisata di Poncokusumo. Kegiatan ini pada umumnya dilakukan oleh kaum muda Poncokusumo, yaitu sambil bekerja di

kebun-kebun milik sendiri atau pekerja kebun, di waktu luang sebagai pemandu wisata bila ada yang minta. Apabila pekerjaan tersebut diterima melalui karang taruna, maka mereka akan memberi sedikit uang untuk kas karang taruna. Berbeda bila kegiatan tersebut diperoleh secara pribadi, di antara mereka ada yang mengisi kas karang taruna dan ada yang tidak.

Pola hubungan kerja pada usaha jasa wisata adalah antara pemilik mobil dengan sopir apabila mobil tersebut tidak dikendarai pemilik. Oleh karena tingkat kunjungan wisatawan belum stabil – kadang-kadang ramai, kadang-kadang sepi – dan belum ada aturan resmi sebagai usaha industri kepariwisataan, maka pola hubungan antara pemilik mobil dan sopir juga tidak aturan resmi. Kondisi ini juga disebabkan belum atau lemahnya hubungan kerja antara pengelola pariwisata di Poncokusumo dengan pengelola pariwisata di kota seperti agen wisata dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan kegiatan kepariwisataan dan dapat mendorong kedatangan pariwisata ke kawasan ini. Apabila potensi-potensi wisata ini dapat ditangkap oleh pemangku kepentingan, maka akan merubah pola hubungan kerja mereka yang bergerak pada usaha wisata pada saat ini.

- ***Pemberdayaan tenaga kerja jasa pariwisata di Poncokusumo***

Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang membangun manusia/masyarakat melalui pengembangan kemampuan masyarakat, perubahan perilaku masyarakat, dan pengorganisasian masyarakat. Kegiatan pemberdayaan dilakukan antara lain adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan menumbuh-kembangkan kemandirian serta kreativitas masyarakat dalam menciptakan peluang kerja. Dalam hal ini, pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan

antara lain melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan, dan studi banding dengan daerah lain yang telah maju kepariwisataannya.

Dalam kaitan dengan pemberdayaan tenaga kerja di Poncokusumo, khususnya di bidang sektor jasa pariwisata, belum banyak diselenggarakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan SDM bagi pelaksana berbagai bentuk usaha jasa pariwisata. Pada umumnya, baik para pengusaha maupun para pekerja, bekerja secara alami berdasar pengetahuan yang mereka peroleh sendiri. Pemberdayaan yang selama ini dilakukan baru tahap pelatihan, pemberian pinjaman, dan studi banding ke Kabupaten Sleman. Namun kegiatan ini belum menyentuh sebagian besar pelaksana atau pengusaha jasa pariwisata di Poncokusumo. Kondisi ini diakui oleh dinas tenaga kerja maupun dinas koperasi dan UKM, bahwa minimnya kegiatan peningkatan SDM yang berkaitan dengan kegiatan pariwisata karena terbatasnya ruang dan dana. Permasalahan klasik ini, baik langsung maupun tidak langsung, akan menghambat kegiatan pariwisata bila tidak dicarikan solusinya.

Peningkatan SDM yang pernah diikuti oleh penduduk Poncokusumo di antaranya adalah kunjungan ke Kabupaten Sleman untuk mengetahui cara pengelolaan desa wisata. Poncokusumo diikutkan mengingat kawasan ini juga akan dikembangkan sebagai desa wisata. Pada saat itu pesertanya terbatas dan penduduk Poncokusumo yang terlibat hanya beberapa orang saja, karena kegiatan ini tidak hanya untuk penduduk Poncokusumo namun meliputi Kabupaten Malang. Kegiatan peningkatan SDM lain adalah pelatihan untuk penyelenggara wisata Poncokusumo ketika ada rombongan wisatawan luar negeri (Eropa) yang datang dan menginap di Poncokusumo. Wisatawan ini adalah tamu yang dikelola melalui pemerintah desa bekerjasama dengan pengelola pariwisata tingkat kabupaten. Oleh karena itu, sebelum wisatawan tersebut datang pengelola pariwisata tingkat

kabupaten memberi pelatihan kepada pengelola parawisata Poncokusumo, yakni Karang Taruna. Pelatihan yang diberikan adalah hal-hal yang berkaitan dengan kepariwisataan dan tata cara menerima tamu, terutama berkaitan dengan kebersihan rumah yang akan ditempati wisatawan dan acara budaya yang akan dipertunjukkan. Kemudian, karang taruna yang akan melanjutkan untuk menularkan pengetahuan yang di dapat kepada pengelola usaha wisata di Poncokusumo.

Sistem pengelolaan kepariwisataan di Poncokusumo yang kecenderungannya masih bersifat kekeluargaan berdampak juga terhadap belum berkembangnya pemberdayaan tenaga kerja yang dilakukan oleh pengusaha kepada pekerjanya. Mungkin hal ini disebabkan usaha kepariwisataan belum merupakan sebuah industri yang dikelola secara profesional dan hanya dikelola secara konvensional atau berdasar pengalaman individu. Pelatihan yang pernah diterima pengusaha atau pekerja kepariwisataan Poncokusumo seperti penjelasan yang diberikan karang taruna, khususnya kepada mereka yang akan terlibat pada kegiatan ini. Pemilik *homestay* diberi penjelasan tentang tata cara menerima tamu dan kebersihan, penyelenggara wisata budaya mempersiapkan acara kesenian yang akan dipertunjukkan, pemilik kebun buah diberi pelatihan tentang tata cara menerima tamu di kebun sebagai salah satu kegiatan wisata agro, dan pengusaha industri rumah tangga dipersiapkan dalam menjelaskan proses pembuatan produksinya agar menarik wisatawan terhadap produksi Poncokusumo.

Beberapa kegiatan pemberdayaan lain yang pernah diterima pelaku kepariwisataan di kawasan Poncokusumo adalah pelatihan tentang kepariwisataan, penyuluhan berkaitan dengan agrowisata dan usaha industri kecil sebagai usaha pendukung pariwisata. Peserta yang terlibat pada kegiatan pemberdayaan ini masih terbatas karena tidak

semua pengusaha atau pekerja kepariwisataan ikut berpartisipasi. Permasalahan yang dikemukakan adalah berkaitan dengan dana, waktu, dan ruang yang terbatas, baik dari penyelenggara maupun peserta. Terutama dari peserta, apabila diharuskan membayar jarang yang bersedia atau berkaitan dengan waktu yang lebih baik digunakan untuk bekerja di kebun. Namun, pada umumnya mereka yang mengikuti kegiatan pemberdayaan tersebut jarang yang menurunkan kembali ke pengelola pariwisata atau pekerja di Poncokusumo.

6.4. Kemitraan dan Kelangsungan Usaha

Mengacu kepada perencanaan Poncokusumo sebagai kawasan agropolitan, diperlukan pemberdayaan terhadap masyarakat Poncokusumo yang berkaitan dengan berbagai aspek kepariwisataan mengingat masih lemahnya pemahaman masyarakat tentang kepariwisataan. Hal ini berkaitan wawasan masyarakat agar terbuka untuk menciptakan peluang kerja dalam dunia kepariwisataan, baik usaha jasa wisata pokok maupun usaha jasa pendukung kegiatan wisata. Lebih berdayanya masyarakat dalam menumbuh kembangkan kemandirian dan kreativitas melihat peluang usaha atau peluang kerja di pariwisata diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan kehidupan yang lebih sejahtera. Oleh karena, untuk membangun kepariwisataan di Poncokusumo dibutuhkan program pemberdayaan kepada masyarakat yang dapat mengembangkan kemampuan, merubah perilaku, dan mengorganisir usaha kepariwisata untuk keberlanjutan usaha tersebut menjadi sebuah industri pariwisata.

Namun, tampaknya pemberdayaan masyarakat di bidang kepariwisataan ini belum terlihat secara terorganisir, baik dari pengusaha lokal ke pekerja, maupun pemangku kepentingan (*stakeholders*) dari pihak luar seperti pemerintah dan swasta. Mungkin hal ini disebabkan usaha kepariwisataan di Poncokusumo belum

merupakan sebuah industri yang dikelola secara profesional dan hanya dikelola secara konvensional atau berdasar pengalaman individu. Oleh karena itu, untuk kelangsungan pekerjaan dan pengembangan kepariwisataan di kawasan Poncokusumo, khususnya wisata agro yang berbasis pertanian, perlu peningkatan hubungan kemitraan antarpemangku kepentingan (*stakeholders*) yang berkaitan dengan usaha pariwisata dari berbagai perspektif.

Permasalahan di atas juga berlaku bagi pengembangan usaha wisata agro agar dikelola secara profesional yang berkelanjutan seperti wisata agro hortikultura di Kota Batu dan wisata agro teh di Wonosari (Kabupaten Malang). Adanya berbagai jenis pertanian hortikultural di Poncokusumo sangat berpotensi untuk pengembangan wisata agro seperti buah apel, buah belimbing, buah salak, berbagai jenis sayuran, dan bunga krisan di kawasan ini merupakan nilai tambah dalam pengembangan kawasan Poncokusumo sebagai usaha wisata agro. Peluang besar kawasan ini yang menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim pada tahun 2010 menyetujui rencana Desa Poncokusumo sebagai salah satu desa wisata dari enam desa di Jawa Timur menuju pengembangan kawasan Agropolitan. Untuk itu, kawasan Poncokusumo harus dilengkapi berbagai usaha seperti peternakan, agrobisnis, tanaman pangan, dan pengelolaan bioenergi yang dikenal dengan nama 'Safari Mapan Bener' (<http://tudearka.wordpress.com/2009/12/21/send-sendi->).

Pada kenyataannya pengembangan kawasan Poncokusumo, baik sebagai kawasan Agropolitan maupun wisata agro, belum menunjukkan adanya hubungan kemitraan yang bersifat untuk memberdayakan masyarakat di kawasan ini. Misalnya pemberdayaan pada tingkat pengetahuan, kemampuan, perubahan perilaku, dan sistem pengorganisasian atau management usaha. Oleh karena itu, perlu dirintis terjadinya hubungan tiga komponen kemitraan, yaitu

pemerintah, swasta, dan penyelenggara wisata di tingkat desa atau lokasi, agar terlaksana keberlangsungan usaha kepariwisataan menjadi sebuah industri wisata. Luasnya komponen kepariwisataan yang dibutuhkan menuju kawasan Agropolitan bernuansa wisata agro di Poncokusumo, kemitraan yang dibina berkaitan dengan berbagai unsur usaha, baik yang telah ada maupun akan dikembangkan di Kawasan Poncokusumo. Pada saat ini, hubungan kemitraan yang berlangsung antara pengusaha atau pekerja lokal dengan pemangku kepentingan luar Poncokusumo hanya sebatas hubungan pengusaha dengan pedagang atau pebisnis. Hubungan tersebut belum bersifat penyuluhan, pembimbingan, atau pemberian bantuan menuju kemandirian usaha kepariwisataan di Poncokusumo.

Hubungan kemitraan dengan pemerintah terhadap usaha pariwisata adalah dalam bentuk program peningkatan SDM berkaitan dengan usaha industri, pertanian, koperasi, dan pariwisata. Sifat kemitraan adalah dalam bentuk pelatihan kepada beberapa orang penduduk penyelenggara usaha jasa wisata dan industri kecil diberikan oleh dinas-dinas berkaitan dengan usaha yang akan dikembangkan. Namun, penduduk dari Desa Poncokusumo belum banyak yang terlibat dalam program tersebut karena pada saat pelatihan biasanya yang terlibat hanya wakil dari beberapa daerah yang termasuk dalam lingkup kabupaten Malang. Pada saat ini, kemitraan yang telah berlangsung di Poncokusumo adalah pelatihan dan pemberian alat dalam usaha untuk mengembangkan industri kecil seperti pembuatan makanan kecil (keripik apel), minuman sari buah apel, dan sari belimbing belimbing yang diharapkan dapat dijadikan *icon* Poncokusumo bagi wisatawan.

Dalam kaitan untuk kelangsungan pekerjaan dan pengembangan kepariwisataan di Kawasan Poncokusumo, khususnya wisata agro berbasis pertanian, sebaiknya hubungan kemitraan antarpemangku

kepentingan (stakeholders) yang berkaitan dengan usaha kepariwisataan lebih ditingkatkan. Embrio wisata agro yang telah ada di Poncokusumo dapat lebih dikembangkan bila dikelola secara profesional dan berkelanjutan seperti wisata agro hortikultura di Kota Batu dan wisata agro teh di Wonosari. Keberadaan beberapa pertanian hortikultural yang berpotensi sebagai pengembangan agrowisata, yaitu tanaman apel, belimbing, salak, sayuran, dan bunga krisan di kawasan ini merupakan embrio dan nilai tambah dalam pengembangan kawasan Poncokusumo sebagai usaha wisata agro. Peluang besar Kawasan Poncokusumo ini menjadikan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim pada tahun 2010 telah menyetujui rencana Desa Poncokusumo sebagai salah satu dari enam desa di Jawa Timur sebagai desa wisata berkaitan dengan pengembangan Kawasan Agropolitan. Untuk itu, Kawasan Poncokusumo harus dilengkapi dengan pengembangan usaha peternakan, agrobisnis, tanaman pangan, dan pengelolaan bioenergi yang dikenal dengan nama "Safari Mapan Bener" (<http://tudearka.wordpress.com/2009/12/21/send-send->).

Dalam kaitannya dengan pemberdayaan masyarakat pada kepariwisataan di Poncokusumo, komponen yang terlibat dan mempunyai peran penting antara lain adalah pemerintah, pakar, dunia usaha, LSM, dan masyarakat. Komponen kemitraan tersebut sebaiknya membuat jaringan-jaringan kerja efektif dan efisien untuk tercapai keuntungan bersama (*mutual benefits*) melalui kegiatan pengembangan usaha ekonomi rakyat dan penguatan modal sosial masyarakat. Jaringan kerja sama tersebut menitikberatkan kepada upaya yang dapat dilakukan oleh setiap komponen pemberdayaan masyarakat yang akan merubah masyarakat Poncokusumo dari tidak berdaya menjadi berdaya. Sesuai dengan kegiatan kepariwisataan di Poncokusumo, ada tiga unsur penting yang perlu diberdayakan yaitu pengelolaan unsur wisata yang ada di kawasan Poncokusumo,

pengelolaan produksi rakyat dan inovasi paska panen berdasar sumber daya alam setempat, dan pemasaran.

Jalinan hubungan kemitraan antarpemangku kepentingan tersebut di atas dapat terjadi bila mereka dapat saling menghargai dalam pengembangan potensi kepariwisataan di Poncokusumo. Terjadinya hubungan kemitraan tersebut diharapkan dapat saling menguntungkan yang akan memperkuat kemandirian dan bukan ketergantungan. Apabila kemitraan dapat terjadi secara baik, maka akan terbangun suatu kekuatan sosial dan pertumbuhan ekonomi kepariwisataan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari beberapa indikator pembangunan pariwisata, yaitu peningkatan kunjungan wisatawan, tingginya tingkat belanja wisatawan, dan lama tinggal wisatawan di daerah wisata (Sastrayuda, 2010).

Pada saat ini, komponen kemitraan dari unsur pemerintah yang berkaitan dengan program peningkatan SDM kepariwisataan adalah dinas industri, pertanian, koperasi, dan pariwisata. Sifat kemitraan yang terjadi adalah dalam bentuk pelatihan kepada beberapa penduduk yang menyelenggarakan usaha jasa wisata dan industri kecil. Namun, penduduk dari Desa Poncokusumo belum banyak yang terlibat dengan program tersebut karena pada saat pelatihan yang terlibat hanya wakil dari beberapa daerah yang termasuk Kabupaten Malang. Kemitraan yang telah nyata terjadi di Desa Poncokusumo adalah pelatihan dan pemberian alat dalam usaha untuk mengembangkan industri kecil seperti membuat makanan kecil dan minuman sari buah dalam ukuran gelas.

BAB VII

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

7.1. Kesimpulan

Kajian tentang “Pemberdayaan, Pola Hubungan Dan Kelangsungan Pekerjaan di Sektor Industri dan Jasa” menekankan pada pemberdayaan dan kelangsungan pekerjaan di sector industri kecil dan jasa yang dilakukan di dua lokasi kajian yaitu Kabupaten Malang (industri pengolahan pertanian dan jasa) dan Kabupaten Sidoarjo (industri pengolahan perikanan). Uraian dalam bab penutup ini diawali dengan ringkasan kondisi sosial ekonomi di kedua daerah kajian, bahasan tentang temuan-temuan pokok hasil kajian dan beberapa saran dan rekomendasi terkait dengan permasalahan dan isu pemberdayaan dan kelangsungan pekerjaan dan usaha. Penekanan temuan pokok dari hasil kajian meliputi : 1) pola hubungan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja terkait dengan kelangsungan kerja. 2) pemberdayaan usaha terkait hubungan kemitraan dan kelangsungan usaha dengan fokus pada tiga kasus agro industri: yaitu pengolahan buah dan jasa pariwisata di Kabupaten Malang dan industri kerupuk di Kabupaten Sidoarjo.

7.1.1. Kondisi Sosial Ekonomi

Usaha Pengolahan Buah di Kabupaten Malang.

Usaha kecil sektor industri dan jasa merupakan salah satu sumber mata pencaharian utama masyarakat di lokasi kajian yaitu Kabupaten Sidoarjo dan Malang. Dinamika ekonomi di kedua daerah tersebut ikut berpengaruh pada kegiatan usaha kecil baik dalam hal permodalan, pengadaan bahan baku maupun pemasaran hasil usaha tersebut. Kelancaran proses produksi dari hulu ke hilir ini pada akhirnya berpengaruh terhadap pengembangan dan kelangsungan usaha sektor industri dan jasa. Penggunaan bahan baku yang berasal dari hasil pertanian setempat berpotensi meningkatkan kegiatan pertanian daerah. Hal ini terjadi pada industri krupuk, industri pengolahan buah dan usaha jasa pariwisata. Hubungan kerja dan kemitraan antarpihak terkait ini (petani dan pengusaha agro industri) dapat berpengaruh pada kelangsungan pekerjaan di sektor industri dan jasa. Pemberdayaan tenaga kerja dan pengusaha di sektor industri dan jasa merupakan faktor pendukung kelangsungan usaha dan pekerja sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan pihak-pihak terkait.

Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jawa Timur yang memiliki potensi ekonomi cukup besar terutama untuk pengembangan agro industri yang strategis. Pengembangan usaha industri yang berbasis sektor pertanian telah mencapai lebih dari 65 persen dari total industri skala kecil yang ada di Kabupaten Malang. Kegiatan agro industri di Kabupaten Malang merupakan industri kecil atau rumah tangga, yang umumnya dikelola secara tradisional dengan teknologi sederhana dan banyak melibatkan tenaga kerja dari lingkungan keluarga. Kecamatan Poncokusumo di Kabupaten Malang merupakan salah satu wilayah yang direncanakan dalam masterplan

agropolitan Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2007. Daerah ini sebagai wilayah kegiatan utama pertanian tanaman pangan, pengolahan hasil pertanian dan daerah wisata alam. Produksi utama sector pertanian adalah tanaman sayuran dan buah-buahan (apel dan belimbing).

Pengembangan agro industri di Kecamatan Poncokusumo merupakan alternatif usaha meningkatkan nilai tambah dari hasil pertanian, khususnya buah apel. Puncak kejayaan produksi apel pada tahun 1993 – 1996 yang mengakibatkan produksi apel melimpah sehingga nilai ekonomi buah apel pun terus merosot. Krisis ekonomi dan kenaikan harga BBM yang menguncang perekonomian Indonesia, berdampak terhadap peningkatan biaya produksi, khususnya komponen pupuk dan peptisida. Kondisi ini memotivasi petani untuk meningkatkan nilai tambah buah apel dengan melakukan usaha agro industri dari buah apel. Bersamaan dengan membaiknya produksi apel di tingkat petani, maka bermunculan beberapa usaha industri pengolahan buah, seperti sari buah apel dan kripik apel. Pada umumnya, kegiatan pengolahan buah terserbut merupakan industri rumah tangga yang baru berkembang sehingga jumlahnya relative sedikit dan melibatkan tenaga kerja yang juga relatif kecil. Meskipun demikian, cakupan pemasarannya semakin meluas ke luar kecamatan, bahkan sampai ke kota besar di Jawa Timur.

Usaha Jasa Pariwisata di Kabupaten Malang

Uraian tentang perkembangan kepariwisataan di Kawasan Poncokusumo Kabupaten Malang mengacu pada 3 unsur utama yang mendorong kemajuan kepariwisataan yaitu : 1) obyek wisata sebagai potensi wisata daerah seperti seperti sejarah, kebudayaan, dan alam (*Destinations influences*), 2) penyelenggara wisata seperti penginapan, transportasi, biro perjalanan, dan toko cinderamata (*Tourism*

Intermediaries), 3) pendukung kegiatan wisata seperti kondisi ekonomi, sosial-politik, dan budaya (*Situations Travel Demand*). Berdasarkan ketiga unsur tersebut, dapat disimpulkan perkembangan kawasan Poncokusumo sebagai daerah wisata, baru merupakan embrio untuk dijadikan daerah wisata yang potensial menyediakan peluang kerja baru bagi penduduk di sekitarnya. Namun, usaha kepariwisataan yang ada tampaknya belum dikelola secara profesional berdasar kaidah-kaidah kepariwisataan. Sementara itu, belum terjadi hubungan antarpemangku kepentingan dalam kegiatan kepariwisataan di kawasan Poncokusumo untuk kemajuan kepariwisataan di daerah ini.

Obyek wisata di kawasan Poncokusumo dan sekitarnya, cukup mendukung kawasan Poncokusumo sebagai daerah wisata yang menarik perhatian untuk dikunjungi. Berbagai jenis wisata yang dapat ditemui di Poncokusumo adalah: wisata sejarah, wisata budaya, wisata religi, wisata alam, wisata agro, dan sedang dikembangkan wisata modern *volcano park* di Desa Wringin Anom. Khusus untuk agro wisata, embrio pengembangan wisata ini telah dilakukan antara lain pengembangan perkebunan apel (salah satu sentra apel di Kabupaten Malang), pengembangan perkebunan belimbing di Desa Arjosari dan jenis tanaman lain seperti salak, klengkeng, aneka sayuran, dan bunga krisan. Namun keberadaan obyek wisata ini belum dikelola secara profesional dan dukungan dari berbagai pemangku kepentingan yang berkaitan dengan kepariwisataan relatif masih lemah. Indikasi lemahnya dukungan dari satakeholder dapat dilihat antara lain :belum mempunyai kebun apel yang dikelola secara khusus untuk kunjungan wisata. Di samping itu, obyek wisata alam seperti Gunung Bromo dan Ledok Ombo yang terletak agak jauh dari Desa Poncokusumo belum mempunyai akses yang memadai dilihat dari kondisi jalan dan sarana dan prasarana transportasi. Kondisi ini menyulitkan wisatawan yang ingin berkunjung ke daerah ini.

Dilihat dari penyelenggara wisata, pengembangan pariwisata belum didukung oleh kondisi penginapan atau *homestay* yang sudah mulai bermunculan di Desa Poncokusumo, namun belum memadai untuk tujuan wisata. Hal ini disebabkan *homestay* yang ada umumnya masih berfungsi ganda, yaitu sebagai penginapan sekaligus juga rumah tinggal. Kondisi ini menunjukkan ketidaksiapan daerah dan pemilik rumah dalam mengusahakan penginapan untuk wisatawan, karena fungsi utamanya sebagai tempat tinggal yang jika diperlukan akan disiapkan untuk penginapan wisatawan. Situasi ini disebabkan jumlah wisatawan masih terbatas terutama untuk menginap di Poncokusumo. Pada umumnya para wisatawan hanya berkunjung ke beberapa obyek wisata di kawasan Poncokusumo, namun menginap di Kota Malang. Pendukung wisata lain yang belum tampak adalah rumah makan yang 'agak' layak bagi wisatawan, karena hanya tersedia di kota kecamatan dan kondisinya pun masih terbatas.

Sarana pendukung wisata lain yang belum tersedia adalah biro perjalanan, walaupun hanya berupa cabang dari biro perjalanan di kota. Padahal sarana ini sangat dibutuhkan wisatawan yang ingin berkunjung ke obyek-obyek wisata di Poncokusumo, terutama wisatawan baru yang belum mengetahui kawasan ini. Pada saat ini, informasi dan pengelolaan kegiatan wisata di Poncokusumo dilakukan oleh Karang Taruna Desa yang beroperasi di Kantor Desa Poncokusumo. Wisatawan juga masih kesulitan dalam mencari cinderamata khas dari Poncokusumo, karena belum tersedia toko cinderamata atau toko oleh-oleh, sehingga untuk memperolehnya harus mencari ke rumah-rumah dimana oleh-oleh tersebut diproduksi..

Kondisi yang mendukung kegiatan kepariwisataan di Jawa Timur umumnya adalah faktor sosial-politik, sehingga wisatawan pada umumnya merasa nyaman dan aman untuk berkunjung ke kawasan

Poncokusumo dan daerah lain di Jawa Timur. Diresmikannya Kawasan Poncokusumo sebagai desa wisata di Kabupaten Malang, pada tahun 1999 turut mendorong perkembangan pariwisata di daerah ini. Kebijakan pemerintah yang mendukung kegiatan kepariwisataan seperti peluncuran program *visit* Indonesia tahun 2010 merupakan sarana promosi untuk menarik wisatawan berkunjung ke daerah-daerah wisata di Indonesia, termasuk Kabupaten Malang. Namun demikian kebijakan ini belum terealisasi sampai ke daerah seperti Poncokusumo, sehingga perkembangan agro wisata yang menjadi andalan daerah ini relatif lambat. Permasalahan ini disebabkan kurangnya dukungan pemerintah, walaupun Jawa Timur telah mencanangkan Poncokusumo sebagai kawasan Agropolitan. Pengelolaan pariwisata di Desa Poncokusumo masih bersifat swadaya masyarakat dan terbatas dalam kapasitas kegiatan lingkup keluarga.

Meskipun kegiatan pariwisata telah diatur dalam Perda No 20 tahun 2003, dalam pelaksanaannya Kabupaten Malang belum optimal mengembangkan usaha kepariwisataan, termasuk agro wisata buah apel di Poncokusumo. Usaha pengembangan pariwisata yang telah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Malang masih terbatas antara lain dengan mengikutsertakan hasil-hasil kerajinan masyarakat pada pameran-pameran di tingkat daerah maupun nasional, antara lain keripik buah (apel dan nagka), dan sari buah apel

Usaha Industri Kerupuk di Kabupaten Sidoarjo

Sentra industri kerupuk di Desa Kedung Rejo, Kecamatan Jabon sekaligus merupakan cikal bakal industri kerupuk di Kabupaten Sidoarjo. Sejak tahun 2009 kegiatan usaha industri kerupuk di Kedung Rejo ditetapkan oleh pemerintah daerah setempat sebagai salah satu sentra ekonomi strategis Kabupaten Sidoarjo. Hampir sebagian besar rumah tangga di Kedung Rejo khususnya di Tanggulwulung dan

Kaliwiro merupakan pengusaha industri kerupuk, walaupun dalam beberapa tahun terakhir jumlahnya cenderung menurun. Kegiatan industri kerupuk di daerah ini sudah lama dilakukan (sekitar 35 tahun) oleh beberapa keluarga sebagai *pioneer*. Pemasaran hasil kerupuk dari Desa Kedung Rejo telah meluas baik di wilayah Jawa Timur maupun provinsi lain di Indonesia. Namun demikian, pengembangan industri kerupuk di Kedung Rejo masih belum optimal dibandingkan dengan potensi yang ada di wilayah ini. Pada tahun 2010, kapasitas produksi industri kerupuk dari Kedung Rejo mencapai 491,3 ton per bulan dengan daya serap tenaga kerja mencapai 552 orang. Kapasitas industri kerupuk di Kedung Rejo bisa mencapai 3 kali lipatnya apabila kegiatan produksi dilakukan secara maksimal oleh para pengusaha..

7.1.2. Hubungan Kerja dan Pemberdayaan Tenaga Kerja dan Usaha

Industri Pengolahan Buah di Kabupaten Malang

Hubungan kerja dan pemberdayaan tenaga kerja di industri pengolahan buah sangat tergantung dengan jenis dan karakteristik industri. Berdasarkan jenis, karakteristik dan sistem pengupahan di industri pengolahan buah di Kecamatan Poncokusumo, maka terdapat 3 pola hubungan kerja yaitu: hubungan kerja dengan sistem pengupahan harian, borongan dan tetap. Kedua sistem pengupahan harian dan borongan sangat dipengaruhi oleh kontinuitas dan kapasitas produksi, yaitu semakin besar kapasitas produksi maka tingkat kesejahteraan tenaga kerja semakin meningkat. Kedua hubungan kerja tersebut memiliki potensi ketidak sinambungan proses produksi. Dari sisi pemberdayaan, tenaga kerja dengan sistem upah harian memiliki potensi pemberdayaan yang rendah dibanding dengan tenaga kerja tetap dan borongan. Pengembangan potensi tenaga kerja dengan hubungan kerja sistem upah harian masih sangat terbatas dan

tidak terintergrasi dengan pekerjaannya. Demikian pula dengan pola hubungan kerja dengan sistem upah borongan yang banyak melibatkan tenaga kerja di sektor pertanian, pemberdayaan tenaga kerja menjadi tidak fokus dan tidak profesional. Hubungan kerja antara pengusaha dan tenaga kerja yang tidak seimbang dan keterbatasan dalam pemberdayaan tenaga kerja menjadi potensi konflik dan rentan terhadap kesejahteraan tenaga kerja yang terlibat pada industri pengolahan buah.

Berpijak pada dasar prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan kemitraan antarstakeholder di industri pengolahan buah terlihat jelas antara pengusaha, pemerintah daerah, lembaga keuangan dan lembaga pendidikan. Pemerintah daerah berperan dalam menyusun kebijakan pengembangan argo industri yang tertuang dalam program-program kegiatan di Dinas Pertanian, Dinas Koperasi dan UKMK, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Malang. Peran serta pemerintah terlihat dari kebijakan, bantuan permodalan, pelatihan dan pengembangan usaha melalui penggunaan produk dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Lembaga keuangan seperti koperasi menjadi fasilitator dalam proses pemberina bantuan modal usaha untuk pengembangan usaha. Perguruan tinggi (LPPM UNIBRAW dan INBIS) juga mempunyai peran aktif dalam kegiatan pembimbingan dan peningkatan kualitas produksi untuk pengembangan usaha. Hal ini merupakan bentuk kemitraan yang menguntungkan bagi pengembangan industri pengolahan buah di Kabupaten Malang. Namun demikian bentuk kemitraan demikian cenderung terkait dengan proyek sektoral yang kelangsungannya sangat tergantung pada kebijakan jangka pendek.

Industri Jasa Pariwisata

Dalam kaitan dengan pemberdayaan sumber daya manusia di usaha pariwisata pelatihan-pelatihan yang dilakukan terhadap pelaksana kegiatan pariwisata di Poncokusumo masih sangat terbatas baik materi maupun jumlah pesertanya. Hal ini berdampak terhadap rasa kurang percaya diri masyarakat untuk menerima wisatawan, khususnya wisatawan mancanegara. Pengelolaan kegiatan kepariwisataan yang kurang profesional antara lain cara menerima tamu, menata *homestay*, penyajian makanan, dan pengelolaan (*management*) pariwisata. Dalam kaitan dengan ketenagakerjaan kepariwisataan di Poncokusumo, hubungan antarpemangku kepentingan masih rendah, baik antara pekerja dan pengusaha maupun antara pengusaha dengan pengusaha kepariwisataan di luar Poncokusumo. Demikian pula dengan hubungan kemitraan antara pengusaha wisata di Poncokusumo dengan pihak pemerintah (level kabupaten maupun provinsi). Kondisi ini berpengaruh terhadap pengembangan kepariwisataan di kawasan ini yang relatif lambat dan terkesan ‘maju-mundur’.

Industri Krupuk Sidoarjo

Hubungan kerja yang terjadi pada industri krupuk Sidoarjo relatif sederhana karena pihak yang terlibat hanya dua pihak, yaitu pengusaha/pemilik usaha dan pekerja/buruh. Hubungan kerja yang terjadi adalah dalam bentuk hubungan pekerjaan yang didasarkan pada kesepakatan kerja tidak tertulis antara pemilik usaha dengan pekerja berdasarkan rasa saling percaya dan ketergantungan antar satu pihak dengan pihak lainnya. Tenaga kerja yang terlibat dalam hubungan kerja adalah keluarga atau tetangga (sistem kekerabatan) sehingga antara satu sama lain saling kenal (tetangga atau teman). Hubungan social dan kekerabatan antara pekerja dengan pengusaha menjadi

pengikat antara pekerja dan pengusaha meskipun sistem upah yang berlaku adalah sistem upah harian yang rentan terhadap kelangsungan pekerjaan karena sewaktu-waktu dapat terjadi pemutusan hubungan kerja baik dari sisi pemberi kerja maupun pekerja. Pemberdayaan terhadap tenaga kerja dengan sistem upah harian masih minim. Pemberdayaan tenaga kerja masih terbatas pada tahap kesejahteraan dengan pemberian upah dan uang makan, meskipun secara nominal, upah yang diberikan relatif rendah, bahkan dibandingkan dengan UMR. Begitu juga dengan pengembangan potensi tenaga kerja terkait dengan peningkatan kualitas dan kemampuan bekerja masih terbatas. Dalam kondisi keterbatasan kesempatan kerja, hal ini kurang terlihat dampaknya pada kelangsungan pekerjaan karena dalam keterbatasan kesempatan kerja, biasanya kelangsungan bekerja lebih prioritas dibandingkan dengan kecukupan upah yang diterima. Namun hal ini dapat menjadi potensi konflik antara tenaga kerja dengan pengusaha seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan social.

Dalam hal hubungan kemitraan antara industri kerupuk dengan pihak lainnya, menunjukkan bahwa kemitraan antarkelembagaan di sentra kerupuk di Desa Kedung Rejo cenderung belum optimal, antara lain disebabkan oleh belum adanya kelembagaan di tingkat desa yang dapat berperan sebagai mediator untuk menciptakan hubungan kemitraan kelambagaan. Akibatnya berbagai kegiatan kemitraan berbasis pemberdayaan ekonomi di daerah ini cenderung berjalan kurang terkoordinasi, tidak sesuai dengan target sasaran, dan tidak berkeberlanjutan dalam jangka panjang. Hingga saat ini sebagian besar kegiatan pemberdayaan dan kemitraan di sentra industri kerupuk di daerah ini masuk melalui fasilitator lokal yang berperan sebagai penghubung antara kelembagaan di luar desa dengan pengusaha industri kerupuk di desa tersebut. Namun demikian, karena fasilitator tersebut juga merangkap sebagai pelaku usaha industri kerupuk di daerah ini, seringkali berperan ganda sebagai konsultan maupun

pengusaha. Pandangan beberapa masyarakat terhadap kiprah fasilitator tersebut cenderung semakin tidak baik karena management kegiatan yang kurang transparan dan terfokus pada kelompok tertentu.

Di sisi lain peran pemerintah daerah belum optimal karena program pemberdayaan ekonomi dan kemitraan yang dikembangkan masih sebatas pada pelaksanaan kegiatan program di tingkat teknis kedinasan yang jangkauan sasaran kegiatannya terbatas pada capaian jangka pendek. Sementara dari kelembagaan swasta (perguruan tinggi) usulan kegiatan biasanya tidak disesuaikan dengan kebutuhan pelaku industri kerupuk di daerah ini, sehingga hasil yang dicapai tidak seperti yang diharapkan banyak pihak. Walaupun demikian potensi industri kerupuk di Kedung Rejo sebagai salah satu sentra industri kecil di Kabupaten Sidoarjo tetap dapat dikembangkan.

7.2. Rekomendasi

- Pemberdayaan tenaga kerja masih terbatas pada tahap kesejahteraan berupa pemberian upah, uang makan dan fasilitas lainnya. Namun tingkat upah yang diberikan masih rendah, lebih rendah dibandingkan upah UMR yang berlaku meskipun UMR hanya berlaku untuk sektor formal. Untuk memperbaiki tingkat upah disektor industri kecil, perlu dipertimbangkan untuk memberlakukan besaran UMR dalam sistim pengupahan pada sektor informal, termasuk usaha industri kecil.
- Dalam rangka pemberdayaan usaha agro industri pengolahan buah di Poncokusumo, peran dan partisipasi para pemangku kepentingan menjadi sangat strategis dan sangat diperlukan sehingga dapat tercipta hubungan kemitraan antara penyedia bahan baku, sumber bantuan permodalan, dan pemasaran hasil produksi untuk mencapai kelangsungan pekerjaan dan usaha agro

industri di daerah tersebut. Hubungan kemitraan juga diperlukan antara pelaku usaha dengan pengusaha lain sejenis untuk mengurangi persaingan yang tidak sehat diantara pengusaha dan meningkatkan kemandirian usaha sehingga kelangsungan usaha lebih terjaga.

- Diperlukan berbagai strategi dan kebijakan yang komprehensif dari dinas terkait di Kabupaten Malang untuk mendukung daerah yang dijadikan andalan menjadi daerah wisata seperti Desa Poncokusumo, sehingga dapat mempercepat sasaran pengembangan wisata umumnya dan pengembangan ekonomi di Kabupaten Malang pada umumnya.
- Dalam rangka pengembangan kawasan Poncokusumo menjadi daerah wisata, khususnya Wisata Desa, diperlukan keterkaitan ketiga unsur kepariwisataan yaitu obyek wisata, penyelenggara wisata dan pendukung wisata secara holistik. Hubungan antarunsur tersebut akan memperkuat pengembangan pariwisata di Poncokusumo sebagai embrio untuk menjadi Kawasan Agropolitan di Jawa Timur. Potensi besar yang dimiliki kawasan Poncokusumo harus mendapat dukungan kebijakan pemerintah dan keikutsertaan pemangku kepentingan lain, sehingga daerah tersebut dapat dikembangkan sesuai dengan target menjadi daerah agropolitan di Kabupaten Malang.
- Dalam rangka meningkatkan mutu SDM kepariwisataan, diperlukan memperbanyak pelatihan dan bimbingan kepariwisataan, baik dari pemerintah daerah maupun swasta, dan organisasi masyarakat lain, guna meningkatkan profesionalisme di bidang kepariwisataan.

1. Perlunya pelaksana kepariwisataan menjalin kemitraan dengan pihak swasta, baik yang terlibat langsung maupun tidak langsung pada kegiatan pariwisata untuk mempromosikan kepariwisataan di kawasan Poncokusumo dan usaha peningkatan kapasitas produk yang dihasilkan seperti produk pertanian dan usaha kerajinan masyarakat.
2. Perlunya membangun dan memperbaiki berbagai obyek wisata dan akses sarana-prasarana daerah yang akan mendukung pengembangan kepariwisataan di Poncokusumo, terutama sarana penginapan dan transportasi yang diperlukan untuk menjadi daerah wisata, sehingga dapat meningkatkan dinamika ekonomi di kawasan tersebut. .
3. Sebagai sebuah sentra industri, pengembangan usaha industri kerupuk di Kedung Rejo perlu mendapat dukungan dari kelembagaan di tingkat desa. Hal tersebut sangat penting karena seharusnya pengelolaan kegiatan usaha di daerah ini berbasis kelompok usaha dan bukan berdiri sendiri seperti yang berkembang selama ini.
4. Berdasarkan pembelajaran dari beberapa daerah melalui *best practice* pengelolaan usaha industri kecil (UMKM), hal terpenting yang dapat menjadi pendorong keberhasilan sebuah sentralisasi kawasan industri kecil adalah adanya dukungan pembentukan unit pelayanan yang terpisah dari struktur kelembagaan pemerintah daerah, seperti kelembagaan koperasi, klinik usaha/bisnis, pusat pelayanan industri kecil, dan forum *stakeholders* peduli industri kecil. Keberadaan kelembagaan tersebut perlu mendapat dukungan melalui kemitraan antara pemerintah daerah, kelompok usaha, dan unsur pendukung lain seperti perbankan dan

perusahaan/industri besar. Pada kasus sentra industri kerupuk di Desa Kedung Rejo, pembentukan kelembagaan tersebut diharapkan dapat mereduksi persaingan tidak sehat yang selama ini berkembang diantara pelaku industri kerupuk di daerah ini. Selain itu keberadaanya diyakini dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan program pemberdayaan dan kemitraan yang selama ini kurang terkordinasi dengan baik.

5. Untuk kasus sentra industri kerupuk di Desa Kedung Rejo diperlukan pembentukan kelembagaan koperasi yang tumbuh dari inisiatif, keaktifan dan kekompakan diantara pelaku usaha industri kerupuk di daerah ini. Peran kelembagaan koperasi memiliki posisi yang sangat strategis karena dapat menjadi *leading* seluruh kegiatan industri kerupuk di daerah ini, mulai dari kegiatan pengelolaan produksi, pemasaran, bantuan permodalan, hingga penghubung kegiatan pemberdayaan dan kemitraan dengan kelembagaan yang ada. Pada kegiatan produksi, kelembagaan koperasi yang dibentuk dapat berperan sebagai penyalur kebutuhan bahan baku, terutama penyediaan bahan tepung tapioka dan ikan. Peran ini diharapkan dapat meminimalisir ketidakstabilan harga bahan baku dan kelangkaan keatersediannya yang sering mengganggu kelancaran kegiatan produksi industri kerupuk di daerah ini. Di samping itu, peran tersebut dapat menghilangkan penguasaan (monopoli) persediaan bahan baku oleh pelaku tertentu sehingga dapat menghilangkan persaingan yang tidak sehat dalam kegiatan produksi industri kerupuk di daerah ini.

6. Terkait dengan kegiatan pemasaran, peran koperasi dapat diarahkan pada perluasan jaringan pemasaran dan pengawasan kualitas produk kerupuk. Kelembagaan koperasi juga dapat melakukan pemantauan kualitas kerupuk sehingga segmentasi pemasaran kerupuk dapat dipetakan dengan jelas, terutama untuk mengoptimalkan pemasaran produk kerupuk pada beberapa sentra perdagangan di seputar Kabupaten Sidoarjo yang masih terbuka luas. Di bidang permodalan, kelembagaan koperasi yang dibentuk dapat menjadi sebagai mediotor penjamin antara pelaku industri kerupuk dengan kelembagaan perbankan. Peran ini dapat menghilangkan keterbatasan kemampuan peningkatan permodalan pelaku usaha industri kerupuk di Kedung Rejo yang seringkali terkendala persyaratan administratif ketika berusaha mengajukan pinjaman modal kepada perbankan.

DAFTAR PUSTAKA

- Asiati, Devi, dkk (2010). *Kemitraan Antara Tenaga Kerja, Dunia Usaha dan Pemerintah Untuk Kelangsungan Pekerjaan*, Pusat Penelitian Kependudukan –LIPI.
- Afifuddin, MM, Beni Ahmad Saebani. *Metodologi: Penelitian Kualitatif*, CV Pustaka Setia Bandung.
- Ahimsa-Putra, Ed., 2003. *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa*, Essai-Essai Antropologi Ekonomi, KEPEL Perss, ISBN 979-9523-03-6.
- Apridawati, Fenny (2011), 'Kembalinya UMKM Sidoarjo Pasca Bencana Lumpur Lapindo', dalam *Ekonomi Sidoarjo : Jendela Ekonomi Sidoarjo*, Edisi 1 Maret 2011.
- A Guide to Gender – Analysis Framework*, Oxford: An Oxfarm.
- Basri, Faisal. Dalam *Kompas*, 8 Maret 2010, Angket dan Akselerasi Perbaikan Ekonomi.
- Badan Pusat Statistik Kab. Sidoarjo (2010), *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2010*, Sidoarjo : BPS Kabupaten Sidoarjo.
- Badan Pusat Statistik Kab. Malang (2010), *Kecamatan Poncokusumo Dalam Angka Tahun 2010*, Malang : Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.
- Badan Pusat Statistik Kab. Malang (2010), *Kabupaten Malang Dalam Angka Tahun 2010*. Malang: Badan Pusat Statistik Kabupaten Malang.
- BPS Kabupaten Malang. 2010. Kabupaten Malang dalam Angka 2010. Malang.

- Baroh, Istis. 2010. *Pemberdayaan perempuan dalam Agroindustri Pisang Agung Kabupaten Lumajang*.
- Chorul, Djamhari. 2004. Infakop Nomor 25 Tahun XX. 2003, *Orientasi Pengembangan Agroindustri Skala Kecil dan Menengah*; Rakungkuman Pemikiran
- Carlos A. da Silva , et al. 2009. *Agro-industries for development*. Published jointly by CAB International and FAO. Food and Agriculture Organization of the United Nations.
- Dipta, I Wayan. 2008. *Strategi Penguatan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) Melalui Kerjasama Kemitraan Pola CSR*, dalam INFOKOP Volume 16-September 2008:62-75
- Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang. *Directory Usaha Jasa Dan Sarana Wisata (Jasa Akomodasi Dan Rumah Makan) Kabupaten Malang tahun 2009*.
- Djohan, Eniarti,dkk. 2003. *Bukitting Dan Pariwisata: Perspektif Ketengakerjaan*. Jakarta:Pustaka Sinar Harapan.
- Dinas Koperasi UMKM. 2009. *Rekapitulasi Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2008 per Kecamatan Kabupaten Malang*. Malang
- Dinas Koperasi dan UKM Kab. Malang (2010). *Daftar Sentra Industri Kecil/Kerajinan Tahun 2010*. Malang : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Malang.
- Dinas Pariwisata Kabupaten Malang (tak ada tahun). *Desa Wisata Poncokusumo*. Malang : Dinas Pariwisata Kabupaten Malang
- Dinas Pariwisata Kabupaten Malang (tak ada tahun), *Simply Inspirational Nature It's All About Harmony Of Malang Regency*, Malang : Dinas Pariwisata Kabupaten Malang.

- Hafsah Jafar, M, *Upaya Pengembangan Usaha Kecil Menengah*, Infokop No 25 tahun XX, 2004.
- Iwantono, Sutrisno, 2004. Pengembangan Kemitraan Usaha Pola Sub Kontrak Berlandaskan Persaingan Sehat. dalam *Inkop* Nomor 25 Tahun XX,2004.
- Longwe, Hlupekile Sara. 1999. The Women's Empowerment (Longwe) Framework, dalam *A Guide to Gender-Analysis Framework* oleh Candida & Ines Smith, Oxpord: An Oxfam Publication.
- Pemerintah Kabupaten Malang. 2007. *Ringkasan Eksekutif Materplan Argopolitan Kabupaten Malang*. Bappeda Kabupaten Malang. Malang.
- Pemerintah Kabupaten Malang. 2004. *Manajemen Pariwisata Kabupaten Malang Tahun 2004*. Malang
- Pusat Kerajinan Kendedes Singosari Kabupaten Malang. 2010. *Data Perajin Ukm Pusat Promosi Perajinan Kendedes Singosari Kabupaten Malang januari/D 20 Oktober 2010*. Malang
- Kertasasmita, G. 1996. *Kemitraan Dalam Pembangunan Nasional dengan Tinjauan Khusus Dalam Pembangunan Perkotaan*, Makalah pada Seminar Nasional Urban dan Regional Development Institute (URDI, Jakarta, 23 September 1996.
- Media Promosi Ekonomi, *Ekonomika Sidoarjo : Jendela Ekonomi Sidoarjo*, Edisi 1 Maret 2011.
- Rustra, dkk. 2006. *Pengembangan Agribisnis Berbasis Palawija di Indonesia: Perannya dalam Peningkatan Ketahanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan*. Prosiding Seminar Nasional Bogor, 13 Juli 2006. ESCAP

- Swasono, Yudo. 1996. *Kebijakan Ketenagakerjaan di Indonesia Menghadapi Era Globalisasi*, dalam *Warta Demografi*, Th-ke 26, No. 1, 1996.
- Sumintarsih. 2003. *Merajut Kerjasama Menjangkau Pasar*, dalam *Ekonomi Moral, Rasional dan Politik Dalam Industri Kecil di Jawa*, Essai-Essai Antropologi Ekonomi, Ahimsa-Putra (ed), KEPEL Perss, ISBN 979-9523-03-6.
- Sumodiningrat. 2007. *Pemberdayaan Sosial: Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesai*, Kompas, Jakarta
- Sukada, Sonny dkk. 2006. *Membumikan bisnis berkelanjutan memahami konsep & praktek tanggung jawab social perusahaan*, Yayasan Indonesia Bissiness Links. March, Candida & Ines Smith, Maitrayee Mukhopadhyay (1999)
- Sastrayuda, Gumelar S. 2010. *Konsep Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Pariwisata Community Based Tourism*). Hand Out Mata Kuliah Concept Resort and Leisure, Strategi Pengembangan dan Pengelolaan Resort Leisure and dermawan.
- Wiralestari dkk, *Pembinaan Kemitraan Usaha Kecil Menengah pada Ukiran Jati Nugroho di Jambi*, dalam *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 2008.
- Yin, Robert. K. 1996. *Studi Kasus: Desain dan Metode*. (diterjemahkan oleh M. Djauzi Mudzakir). Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Internet:

Arifin, Zainal, Ir., 2009. *Alternatif Pola Kemitraan untuk Usaha Perikanan, dalam* (<http://web.ipb.ac.id/~psp/?pilih=news&mod=yes&aksi=lihat&id=339>)

Darwanto, Harry (2008). *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil* (www.bappenas.go.id)

Gede, Dewa Satria Ideas Blog. *Sendi-Sendi Pengembangan Desa Wisata Di Jatim.* jatim/ Desember 21, 2009. Diunduh 7 Juni 2011

Darwanto, Harry (2008). *Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Berbasis Masyarakat Terpencil* (www.bappenas.go.id)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah, <http://usaha-umkm.blog.com/2008/07/31/pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-menengah/>

Supriyanto dan Subejo. *Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dengan Pembangunan Berkelanjutan*. (<http://subejo.staff.ugm.ac.id/wp-content/supriyanto-ekstensia.pdf>)

Kartasmita, Ginanjar. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri* (<http://www.ginandjar.com/public/10PemberdayaanEkonomiRakyatMelaluiKemitraan.pdf>)

FTA ASEAN-CHINA Picu PHK Massal.
(<http://economy.okezone.com/read/2010/01/04/320/290530/320/fta-asean-china-picu-phk-massaldunia>)

Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil Menengah, <http://usaha-umkm.blog.com/2008/07/31/pemberdayaan-usaha-mikro-kecil-menengah/>

Supriyanto dan Subejo. *Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan Dengan Pembangunan Berkelanjutan* (<http://subejo.staff.ugm.ac.id/wp-content/supriyanto-ekstensia.pdf>)

Soetrisno, Noer. *Posisi dan Peran Pembangunan UKM 2004-2009* (http://www.smecda.com/deputi7/file_makalah/posisi&Peran.pdf)

Kartasasmita, Ginanjar. *Pemberdayaan Ekonomi Rakyat Melalui Kemitraan Guna Mewujudkan Ekonomi Nasional Yang Tangguh dan Mandiri* (<http://www.ginandjar.com/public/10PemberdayaanEkonomiRakyatMelaluiKemitraan.pdf>)

FTA ASEAN-CHINA Picu PHK Massal. (<http://economy.okezone.com/read/2010/01/04/320/290530/320/fta-asean-china-picu-phk-massaldunia>]

Gede, Dewa Satrya Ideas Blog. *Sendi-Sendi Pengembangan Desa Wisata Di Jatim* <http://tudearka.wordpress.com/2009/12/21/sendisendi-pengembangan-desawisata-di-jatim/> Desember 21, 2009. Tanggal Download 7 Juni 2011

Wayan Windia, Made Wirartha, Ketut Suamba, Dan Made Sarjana. *Model Pengembangan Agrowisata Di Bali.*

[http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/\(13\)%20soca-windia%20dkk-agrowisata\(2\).pdf](http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(13)%20soca-windia%20dkk-agrowisata(2).pdf). Tanggal Download 8 Juni 2011

<http://pariwisata.jogja.go.id/index/extra.detail/1689/pengembangan-pariwisata-indonesia.html>. Diunduh 10 Juni 2011

<http://jurnal-sdm.blogspot.com/2009/08/pengantar-industri-pariwisata-definisi.html>. Diunduh 10 Juni 2011

http://ejournal.umm.ac.id/index.php/tropika/article/viewFile/367/372_umm_scientific_journal.pdf

(http://poncokusumo.malangkab.go.id/?page_id=5)

(<http://www.malangkab.go.id/index1.php?kode=85>).

